

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN DICO-
BASUKI DALAM KONTESTASI PILKADA KABUPATEN
KENDAL 2020**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun oleh:

SRI PUJI LESTARI

NIM: 1706016055

PRODI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamualaikun Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Sri Puji Lestari

NIM : 1706016055

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN DICO-
BASUKI DALAM KONTESTASI PILKADA KABUPATEN
KENDAL 2020

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2021

Pembimbing Utama,



H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 150 274 614

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN DICO-BASUKI DALAM
KONTESTASI PILKADA KABUPATEN KENDAL 2020**

Disusun oleh

Sri Puji Lestari

1706016555

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 25 Juni 2021 dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji



Ketua

Ahwan Fanani, M.Ag

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary, Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag

Penguji I

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Penguji I, Dr. Hj. Misbah ZulfaElizabeth, M.Hum.

Dr. Hj. Misbah ZulfaElizabeth, M.Hum

Penguji II

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Penguji II, Solkhah Mufrikah, M.Si.

Solkhah Mufrikah, M.Si

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Supervisor, Drs. Nur Syamsudin, M.Ag.

Drs. Nur Syamsudin, M.Ag

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Puji Lestari

NIM : 1706016055

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN DICO-BASUKI
DALAM KONTESTASI PILKADA KABUPATEN KENDAL 2020

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain. Pendapat temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip/dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan di atas saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo.

Semarang, 19 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Sri Puji Lestari
NIM. 1706016055

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya serta atas izin-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “ Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dico-Basuki dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal 2020” dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang terbaik sepanjang masa. Sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, yang telah berhijrah dari satu masa menuju masa peradaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan selaknya menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. H. Adib, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik, dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu, nasehat, saran dan masukan.
4. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku selaku Dosen Pembimbing yang telah melaungkan banyak waktu untuk mengarahkan dan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Amin Farih, M.Ag selaku wali dosen yang telah mengarahkan dan memberi masukan kepada peneliti.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staff Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pendidikan, bimbingan, pengarahan, dan pengetahuan serta dukungan dan motivasi yang begitu luar biasa.
7. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Muhammad Kasman dan Ngamini yang telah membesarkan dengan kasih sayang, mendidik, dan yang selalu memberikan dorongan dan do'anya. Khususnya ibu yang telah menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya untuk memberikan yang terbaik, merawat, serta memberi dorongan semangat untuk peneliti untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa mendatang. Ibu adalah teladan dan harta yang paling

berharga bagi peneliti. Semoga ayah dan ibu selalu dalam perlindungan, kasih sayang, dan keridhoan Allah SWT. Aamiin.

8. Sahabatku tercinta Tri Kusumawati, Afiatu Sholecha, Yosy Safiradan Ariska Dewi yang telah membantu, memberikan semangat dan arahnya kepada peneliti selama proses penulisan skripsi.
9. Teman-teman mahasiswa Ilmu Politik A angkatan 2017, khususnya Timur, Alfayn, Ahya, Emilia, Cysa, Risma, Milla, Almadona, Efa, Nafisa, Fitria, Aas, Ending, Ifah, Wahyu dan semuanya yang telah sama-sama berbagi ilmu, berdiskusi, dan membantu peneliti selama proses perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini di masa mendatang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga tulisan ini bisa memberi manfaat bagi semua. Aamiin.

WassalamualaikumWr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2021



Sri Puji Lestari
NIM. 1706016055

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Muhammad Kasman dan Ibu Ngamini yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan baik secara lahir dan batin. dan juga atas segala do'a, dukungan, dan restunya bagi penulis selama ini dan seterusnya.
2. Untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk berkembang dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus menjadi awal kesuksesan saya di masa depan

MOTTO

“The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge”

(Napoleon Hill)

“A real decision is measured by the fact that you’ve taken action. No action: you haven’t truly decided”

(Tony Robbin)

ABSTRAK

Tujuan utama dari diadakanya pemilu adalah untuk penegakan kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yakni, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu ajang pertarungan antar calon kandidat kepala daerah untuk dapat menduduki tampuk pemerintahan eksekutif di tingkat lokal. Dalam upaya untuk memenangkan kontestasi tersebut tidak jarang seorang kandidat menggunakan berbagai macam strategi politik salah satunya adalah dengan menggunakan strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik merupakan salah satu bentuk strategi politik yang dibangun oleh seorang calon kandidat kepala daerah untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada konstituen dengan tujuan memperoleh dukungan dan memenangkan kontestasi pilkada.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pasangan Dico-Basuki menyusun komunikasi politik yang akan digunakan sebagai strategi politik kampanye pemenangan suara di pilkada Kabupaten Kendal 2020. Data lapangan diperoleh melalui observasi lapangan, dilanjutkan dengan proses wawancara, studi dokumen serta literature terkait. Dalam melakukan analisis terhadap temuan data di lapangan digunakan teori mengenai strategi komunikasi politik agar dapat menjabarkan data dalam sebuah analisa yang informatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Pasangan Dico-Basuki melakukan proses strategi komunikasi politik yang diawali dengan membentuk mesin politik, Menyusun langkah-langkah implemmentasi strategi komunikasi politik yang telah dilakukan melalui analisis situasi, segmentasi, *positioning* dan pemanfaatan saluran komunikasi. 2. Dalam kampanyenya, pasangan Dico-Basuki menerapkan strategi komunikasi politik langsung. Strategi ini dilakukan melalui pendekatan emosional dengan calon pemilih, memetakan pemilih potensial melalui basis daerah, membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak baik dengan partai politik pendukung dan stakeholder lainnya, serta melakukan kontrak politik di atas nota resmi dengan aliansi organisasi masyarakat dan LSM di Kabupaten Kendal sebagai upaya membangun basis dukungan untuk pemenangan Pilkada Kendal 2020. Pasangan Dico-Basuki juga menemui beberapa faktor penghambat saat menjalankan strategi komunikasi di lapangan seperti komunikasi (masyarakat) kurang memahami isi pesan yang disampaikan oleh komunikator (kandidat/relawan), serta faktor semantik, yaitu belum solidnya koordinasi dan komunikasi antar tim pemenangan.

Kata kunci: Pilkada, Strategi, Politik, Komunikasi Politik

ABSTRACT

The main purpose of holding elections is for the enforcement of people's sovereignty. This is in accordance with the principle of democracy, namely, from the people, by the people and for the people. Regional head elections (Regional Elections) become one of the events of the fight between candidates for regional head candidates to be able to occupy the executive government at the local level. In an effort to win the contest, it is not uncommon for a candidate to use a variety of political strategies, one of which is to use a political communication strategy. Political communication strategy is a form of political strategy built by a candidate for regional head to be able to convey his political messages to constituents with the aim of gaining support and winning the election contest.

This study uses qualitative method with case study approach. This is intended to see how dico-basuki couple composed political communication that will be used as a political strategy of the winning campaign in kendal district election 2020. Field data is obtained through field observation, followed by interview process, document study and related literature. In conducting analysis of data findings in the field used theory of political communication strategy in order to describe the data in an informative analysis.

The results showed that: 1. Dico-Basuki couple conducted a process of political communication strategy that began with forming a political machine, implementing the steps of implementing political communication strategies that have been carried out through situation analysis, segmentation, positioning and utilization of communication channels. 2..In his campaign, Dico-Basuki's partner implemented a direct political communication strategy. This strategy is carried out through an emotional approach with potential voters, mapping potential voters through regional bases, building political communication with various parties both with supporting political parties and other stakeholders, as well as conducting political contracts on official memorandums with alliances of community organizations and NGOs in Kendal District in an effort to build a support base for the winner of the Kendal Regional Election 2020. Dico-Basuki also encountered several inhibitory factors when carrying out communication strategies in the field such as communion (community) lacking understanding of the content of the message conveyed by communicators (candidates / volunteers), as well as semantic factors, namely the lack of solid coordination and communication between the winning team.

Keywords: Elections, Strategy, Politics, Political Communication

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	4
KATA PENGANTAR	5
PERSEMBAHAN.....	7
MOTTO.....	8
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL	14
DAFTAR GAMBAR	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Tinjauan Pustaka.....	21
F. Kerangka Teori	28
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DAN KONTESTASI.....	36
A. Strategi Politik dan Komunikasi Politik	36
1. Konsep Strategi Politik.....	36
2. Konsep Komunikasi Politik	39
3. KonsepStrategi Komunikasi Politik	43
4. Implementasi Strategi Komunikasi Politik.....	47
B. Pilkada dan Kontestasi Politik.....	51
1. Pilkada Sebagai Proses Implementasi dari Proses Demokrasi	53
2. Pilkada Bagian Tidak Terpisahkan dari Otonomi Daerah.....	55

3.	Latar Belakang Pelaksanaan Pilkada.....	57
4.	Pilkada dalam Perspektif Hukum Islam	58
BAB III LANDSCAPE DAERAH KABUPATEN KENDAL DAN DINAMIKA		
PILKADA KENDAL 2020		
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kendal.....	65
1.	Kondisi Geografi.....	65
2.	Kondisi Topografi	66
3.	Kondisi Demografi.....	66
B.	Profil Pilkada Kendal 2020	69
1.	Proses Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020	69
2.	Profil Bakal Calon Bupati Kendal dalam Pilkada tahun 2020.....	76
3.	Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kendal 2020.....	79
BAB IV PEMAHAMAN DICO-BASUKI TENTANG KONTEKS SEBAGAI		
BASIS STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK		
A.	Pemahaman Tentang Kendal Sebagai Wilayah Kontestasi	80
1.	Struktur Masyarakat Kendal	80
2.	Kondisi Sosial dan Budaya	81
3.	Dinamika Politik di Kabupaten Kendal.....	84
B.	Pemahaman Tentang Lawan Politik dalam Pilkada	93
1.	Pasangan Ali Nurudin dan Yekti Handayani.....	93
2.	Pasangan Tino Indra Wardono dan Mukh. Mustamsikin	95
BAB V EKSPRESI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM TINDAKAN		
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA		
A.	Ekspresi Strategi Komunikasi Politik Dico-Basuki.....	101
1.	Membangun Kedekatan Emosional	105
2.	Membidik Pemilih Potensial Berbasis Daerah	106
3.	Menggalang Dukungan Semua Kalangan	111
4.	Program Pro Rakyat	114
5.	Pemanfaatan Saluran Komunikasi/Media Komunikasi.....	117
6.	Penguatan Ketokohan (<i>Ethos</i>) Kandidat	119
B.	Sumber Daya dalam Komunikasi Politik Dico-Basuki	125
1.	Sumber Daya Finansial.....	125

2. Sumber Daya Manusia	127
BAB VI PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Strategi Politik Menurut Peter Schorder.....	37
Tabel 2. 2 Metode Segmentasi Pemilih	49
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal 2020	67
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal Tahun 2020.....	68
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, dan Distribusi Presentase Penduduk.....	69
Tabel 3. 4 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2020	70
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kaupaten Kendal 2020	80
Tabel 4. 2 Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Kendal Periode Pemilihan Legislatif 2019-2024.....	92
Tabel 5. 1 Hasil Perolehan Suara Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020	107
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal 2020.....	109
Tabel 5. 3 Harta Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal.....	126
Tabel 5. 4 Struktur inti Tim Pemenangan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Kendal.....	65
Gambar 4. 1 Pesebaran Suara Partai Politik Pemilu 2019	92
Gambar 5. 1 Struktur Tim Pemenangan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pemilu pada dasarnya merupakan salah satu tolak ukur dari suatu Negara yang menganut asas demokrasi dalam pemerintahannya. Pelaksanaan pemilu merupakan sebuah sarana bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif di dalam kehidupan politik sekaligus memenuhi hak politik masyarakat. Selain dapat dilihat sebagai sarana partisipasi masyarakat, pemilu juga dilihat sebagai sarana bagi seorang calon kandidat untuk maju sebagai calon legislative maupun eksekutif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiarjo (2008) yang menyatakan bahwa pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Perubahan dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan semenjak berakhirnya rezim orde baru dan bergulir ke era reformasi. Perubahan dinamika politik ini sekaligus membuka warna baru terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut dinamika pemilu juga mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan lahirnya banyak partai politik baru di awal bergulirnya era reformasi terutama di dalam pemilu legislatif tahun 1999. Tidak hanya pada sector legislatif saja, perubahan dinamika pemilu pasca reformasi juga tampak pada sector eksekutif. Salah satu yang mengalami dampak dinamika perubahan pemilu eksekutif adalah pemilihan kepala daerah.

Memasuki awal era reformasi, pemilihan kepala daerah dipilih oleh lembaga legislative di tingkat daerah (DPRD). Kita tentu mengetahui bahwa sebelumnya, pemilihan kepala daerah pada masa orde kewenangan dari menteri dalam negeri yang mana dibawah instruksi presiden. Dengan kata lain, masih terdapat intervensi dari pemerintah pusat terhadap pemilihan kepala daerah. Merujuk pada Kompas (7 Desember 2020), memasuki awal era reformasi intervensi pemerintah pusat terhadap pemilihan calon kandidat kepala daerah dihilangkan dan kewenangan memilih dan mengangkat kepala daerah merupakan kewenangan dari dewan perwakilan rakyat daerah setempat. Hal ini mengacu pada sistem perwakilan murni yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Memasuki tahun 2004 dinamika pemilu di Indonesia kembali mengalami perubahan yakni dengan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat tidak hanya berhenti pada pemilihan presiden dan wakil presiden saja akan tetapi dinamika ini berlanjut dengan diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung untuk yang pertama kalinya

pada tahun 2005. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Dinamika pilkada langsung kembali mengalami perubahan pada tahun 2008 dengan munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tertanggal 23 juli 2007. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya di implementasikan pada Undang-undang No 12 Tahun 2008. Berdasarkan dua landasan formal tersebut diatur bahwa calon perseorangan diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada kontestasi pilkada langsung setelah sebelumnya pencalonan kepala daerah dilaksanakan melalui mekanisme pencalonan partai politik semata (Kompas, Desember 2020).

Pada tahun 2018, dinamika pilkada memasuki era pilkada langsung serentak yang didasarkan pada terbitnya Undang-undang No.1 Tahun 2015. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung dan serentak akan lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Thaibah (2018) menyatakan, dengan Pilkada langsung itu diyakini memiliki peluang atau kesempatan yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Merujuk pada data Kemendagri dalam (Rani, 2018), Pilkada langsung serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan diikuti oleh 171 calon kepala daerah di seluruh wilayah republik Indonesia. Dari total peserta pilkada serentak 2018 tersebut, tercatat sebanyak 39 Kota, 115 Kabupaten dan juga 17 provinsi yang melaksanakan pilkada langsung. Pilkada serentak kembali dilaksanakan pada tahun 2020. Merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, di tahun 2020 ini. pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah di Indonesia dengan terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota (Adliima, 2021).

Melihat keberlanjutan fenomena pilkada langsung serentak menunjukkan bahwa aktifitas kehidupan politik di Indonesia pasca reformasi semakin menunjukkan iklim yang positif semakin terbuka. Menurut Budiyo (2016), Kegiatan politik seperti ini dalam negara demokrasi memang tidak dapat dilepaskan dengan aktivitas kebutuhan manusia. Dalam hal ini disadari secara langsung atau tidak, manusia akan terus terlibat dalam berbagai proses aktivitas politik. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang mengikuti pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Terdapat 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah melaksanakan pilkada langsung serentak tersebut. (Adliima, 2021).

Pelaksanaan pemilu tidak dapat dipisahkan dari sebuah strategi pemenangan. Hal ini karena pada dasarnya setiap calon yang mengikuti pemilu memiliki target untuk memperoleh dukungan suara yang besar dari masyarakat. Strategi pemenangan sendiri seperti yang disampaikan oleh Schroeder (2013) dalam (Adliima, 2021) , biasanya terimplementasikan dalam sebuah strategi politik yang digunakan untuk dapat merealisasikan cita-cita politik dari seorang calon kandidat yang mengikuti proses pemilu. Seorang calon kandidat yang mengikuti kontestasi pemilu dalam hal ini adalah pilkada akan menggunakan strategi politik ini dalam setiap kegiatan-kegiatan kampanyenya. Proses kampanye dalam pemilu merupakan hal yang paling utama dilakukan oleh seorang calon kandidat karena pada masa kampanye itulah kandidat dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya (Fatimah, 2018). Pesan-pesan politik itu di jabarkan kedalam program-program dan jani-janji politik dengan tujuan agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk memobilisasi dukungan suara kepada sang calon kandidat (Adliima, 2021).

Jauh sebelum proses kampanye dimulai, seorang calon kandidat membentuk tim sukses dari partai koalisi maupun dari stakeholder terkait yang akan menjadi penggerak utama untuk menjalankan strategi politik pemenangan kampanye kepada masyarakat (Adliima,2021).Tim sukses ini akan terjun kepada masyarakat menyampaikan program-program yang ditawarkan dan dijanjikan oleh calon kandidat melalui sebuah proses komunikasi politik yang efektif. Strategi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya membentuk citra politik, membentuk pendapat umum, dan dengan komunikasi politik yang dibangun secara tepat akan berdampak signifikan pada peningkatan dukungan dari masyarakat. Hal ini sangat efisien dan akan mampu menunjukkan kesan dan pesan politik dari calon kandidat kepada konstituen (Rani, 2018).Di dalam kontestasi Pilkada, komunikasi politik dapat berperan dengan efektif apabila strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh suatu partai politik, tim kampanye dan kandidat calon efektif dalam mencapai citranya untuk mendapatkan tujuan politiknya. Strategi komunikasi politik sendiri diartikan tentang bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung oleh calon pimpinan daerah yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya (Janitra, 2020).

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah dari 21 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Tengah yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020.Salah satu calon kandidat yang mengikuti kontestasi pilkada serentak di kabupaten Kendal adalah pasanganDico M. Ganinduto dan Windu Suko

Basuki. Dico tercatat sebagai politisi muda Partai Golkar. Pada Pemilu 2019, Dico sempat menjadi calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) I Jawa Tengah yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal. Akan tetapi, usahanya dalam pencalegan belum bisa membuatnya melangkah ke Senayan. Dalam kontestasi pilkada serentak 2020 ini, pasangan Dico-Basuki akan bersaing dengan dua pasangan calon kandidat lainnya yakni Ali Nurudin-Yekti Handayani, dan Tino Indra Wardono-Mukh. Mustamsikin.

Dalam kontestasi Pilkada Kendal 2020, pasangan Dico-Basuki merupakan pasangan yang cukup menarik perhatian di masyarakat. Hal ini dikarenakan baik Dico dan Basuki merupakan nama baru yang muncul dalam dinamika perpolitikan di Kabupaten Kendal. Hal ini menjadi semakin menarik ketika mengetahui bahwa keduanya juga bukan berasal dari Kabupaten Kendal. Fenomena ini menarik untuk diamatai mengingat saingan dalam pilkada serentak kali ini meliputi pasangan Ali Nurudin-Yekti Handayani yang diusung oleh PKB, Gerindra dan Nasdem serta PDIP dan PPP yang mengusung pasangan Tino Indra Wardono-Mukh. Mustamsikin seperti yang dirujuk dari *Detiknews.com*. (23 September 2020). Kedua pasangan calon penantang Dico-Basuki tersebut notabene adalah warga Kabupaten Kendal dan namanya sudah dikenal banyak oleh masyarakat Kabupaten Kendal. dalam kontestasi pilkada serentak 2020 ini keduanya diusung oleh mayoritas partai politik yang mengisi DPRD Kendal. Merujuk pada *halosemarang.id* (25 Agustus 2020), pencalonan Dico-Basuki mendapatkan dukungan dari empat partai politik yakni Golkar, Demokrat, PAN dan juga PKS. Dukungan ini semakin bertambah setelah partai Perindo pada akhirnya juga bergabung dalam partai koalisi pengusung Dico dan Basuki.

Munculya nama baru Dico dan Basuki sebagai pasangan calon kepala daerah di dalam pilkada serentak kabupaten Kendal merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Pasangan ini berhasil memperoleh dukungan dari koalisi lima partai politik yang ada di DPRD kabupaten Kendal. Dengan dukungan dari lima koalisi partai politik tersebut, pasangan Dico-Basuki segera membentuk mesin politik yang akan mereka gunakan dalam kampanye politik nantinya. Merujuk pada *Detiknews.com* tertanggal 23 September 2020, pasca mereka ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kendal sebagai calon bupati dan calo wakil bupati, pasangan Dico-Basuki segera melakukan manuver-manuver politik. Tim pemenangan Dico-Basuki menerapkan strategi dalam melakukan kampanye politik. Hal ini semakin diperkuat dengan strategi pendekatan langsung dengan melakukan silaturahmi ke beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kendal. Dengan adanya regulasi terkait pembatasan kampanye tatap

muka secara langsung akibat dampak pandemi Covid-19, membuat pasangan Dico-Basuki juga menerapkan strategi kampanye politik dengan memanfaatkan media massa dan media sosial. Cara ini digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan pesan politik dan mengenalkan beberapa program kerja yang sudah disusunnya kepada konstituen.

Segala strategi kampanye yang diterapkan oleh tim pemenangan Dico-Basuki membawa hasil positif. Hal ini ditunjukkan dari hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki, dengan perolehan suara sah 279.632 (49,2%). Sedangkan pasangan Ali Nurudin dan Yekti Handayani mendapatkan perolehan suara yang selisihnya tidak cukup jauh dari pasangan Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki yakni 214.299 suara (37,7%). Dan Tino Indra Wardono dan Mukh. Mustamsikin mendapatkan 74.371 suara (13,1%). Jumlah suara sah sebanyak 568.302 dari 596.437 orang yang menggunakan hak suaranya. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar sebanyak 789.187 pemilih. (KPU Kendal, 2020).

Berdasarkan keseluruhan latar belakang yang telah dijelaskan menjadi sangat menarik untuk diamati bagaimana pembangunan konsep strategi komunikasi politik yang diterapkan pasangan Dico-Basuki dalam kampanye politiknya. Strategi komunikasi yang diterapkan ini terbukti mampu membawa dampak signifikan sehingga pasangan Dico-Basuki memperoleh dukungan mayoritas partai politik di parlemen dan memperoleh dukungan mayoritas suara dari masyarakat kabupaten Kendal di Pilkada 2020. Tidak terlepas dari itu saja, penulis merasa perlu untuk mengetahui factor-faktor apa sajakah yang menjadi factor pendukung dan juga factor penghambat dari strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Dico-Basuki ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini dijabarkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep strategi komunikasi politik yang dibangun Dico-Basuki pada pilkada serentak Kabupaten Kendal 2020?
2. Bagaimana penerapan strategi komunikasi politik pemenangan Dico-Basuki pada Pilkada serentak Kabupaten Kendal 2020?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini berikut adalah uraian tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui konsep strategi komunikasi Politik yang dibangun Dico-Basuki pada pilkada serentak Kabupaten Kendal 2020.
2. Mengetahui penerapan strategi komunikasi politik kemenangan Dico-Basuki pada pilkada serentak Kabupaten Kendal 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini dijabarkan menjadi dua yakni manfaat teoritis dan juga manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penulisan skripsi ini dapat menjadi sebuah pembangun pengetahuan keilmuan dan sebagai sarana pengembangan wawasan mengenai konsep strategi komunikasi politik yang digunakan oleh pasangan Dico-Basuki Pada Pilkada Kendal 2020.
- b. Secara teoritis penulisan skripsi ini menjadi sebuah gambaran mengenai bagaimana seorang kandidat calon kepala daerah membangun komunikasi politik sebagai sebuah strategi politik dalam kemenangannya di kontestasi pilkada serentak 2020

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada khalayak mengenai bagaimana seharusnya penerapan strategi komunikasi politik yang tepat untuk memobilisasi suara konstituen dalam strategi kemenangan kontestasi kepala daerah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para politikus dalam penerapan strategi politik pada Pilkada mendatang dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman bagi para pelaku politik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengkaji skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dico-Basuki dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal 2020”, penulis membagi kajian pustaka menjadi dua tema kajian. Kajian pertama mengenai strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat kontestan pilkada dan kajian kedua mengenai dinamika komunikasi politik dalam kontestasi pilkada.

1. Strategi Komunikasi Politik

Dalam bagian pertama ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa tulisan dan juga penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan topik mengenai strategi Komunikasi Politik. Kajian mengenai strategi komunikasi politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Cibro (2018), Alhidayah (2020), Jamil (2016), Lubis (2018) dan Thaibah (2018).

Rahmawan Cibro (2018) memfokuskan kajiannya pada strategi komunikasi politik yang digunakan pasangan Dulmusrid-Sazali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2017. Pasangan Dulmusrid dan Sazali menggunakan sebuah strategi politik yang secara sistematis dijalankan oleh tim pemenangnya baik secara eksternal maupun internal. Faktor utama yang menjadi poin dari strategi komunikasi politik secara eksternal ini adalah pemilihan komunikator. Penelitian ini mengungkapkan bahwa poin-poin inti yang dimuat sebagai pesan kampanye politik tidak hanya disampaikan oleh tim pemenangan pasangan ini saja akan tetapi juga dilakukan oleh tokoh utama yakni pasangan Dulmursid dan Sazali sendiri. Selain itu propaganda media yang sangat massif digunakan oleh pasangan ini dalam strategi komunikasi politik kampanyenya. Selain melakukan strategi komunikasi politik secara eksternal dengan maksud untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat, pasangan Dulmusrid-Sazali dan juga tim pemenangnya juga sangat fokus untuk terus mempersolid komunikasi internal dari tim pemenangan itu sendiri. Sebab poin penting lain yang menjadi acuan pasangan ini adalah memperkuat internal dengan terus melakukan evaluasi terhadap kerja tim pemenangan dalam menyampaikan pesan-pesan kampanye kepada masyarakat. Disamping itu pengerahan seluruh lapisan elemen tim sukses baik di tingkat kabupaten, hingga ke tingkat masyarakat sangat terjalin konsisten dengan strategi komunikasi politik yang dibangun secara sistematis.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Ahmad Yozi Alhidayah (2020). Alhidayah memfokuskan kajian terkait strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh calon pertahana Rohidin Mersyah pada Pilkada Provinsi Bengkulu 2020. Rohidin Mersyah sebagai calon pertahana membangun strategi komunikasi politik dengan mengambil target masyarakat generasi milenial. Rohidin beserta tim pemenangan telah berhasil melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap masyarakat yang akan menjadi sasaran strategi kampanye yang akan dilakukan. Pembangunan komunikasi politik dengan cara menerapkan strategi kampanye terhadap generasi milenial dianggap sebagai sesuatu yang tepat. Hal ini dikarenakan masyarakat pemilih muda yang banyak di isi oleh kalangan milenial belum memiliki ketetapan pilihan terhadap calon kepala daerah. Dengan demikian Rohidin Menilai perlunya menjalin komunikasi politik terhadap kaum milenial ini dengan tujuan mampu meraup dukungan suara dari kaum milenial tersebut. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa calon kepala daerah dalam hal ini Rohidin dibantu dengan tim pemenangnya menggunakan setrategi

komunikasi politik seperti calon kepala daerah pada umumnya. Disamping pemanfaatan media kampanye yang konvensional seperti pamphlet, poster dan baliho, pemanfaatan media sosial secara massif masih menjadi cara jitu untuk mengimplementasikan pesan-pesan kampanye yang dibawanya. Namun munculnya tantangan dari rival penantang dengan membanjiri media social dengan muatan muatan yang berusaha untuk menurunkan elektabilitas dari rohidin ini masih berhasil di antisipasi. Rohidin sebagai seorang petahan juga mendapatkan berupa kritikan dari kandidat lawan yang menyerangnya dengan mengatakan bahwa Rohidin sebagai petahana memanfaatkan fasilitas Negara dalam proses kampanye yang dilakukan. Untuk menanggapi hal itu, dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa, Rohidin dan tim juga melakukan counter strategi komunikasi politik secara langsung dengan terjun ke masyarakat. Beberapa diantara strategi turun ke masyarakat itu berhasil dilakukan dengan cara mendatangi pesta pernikahan, olahraga pagi, sarapan pagi dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan calon ini berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung terhadap masyarakat.

Fadly Jamil (2016) dalam kajiannya menjabarkan fenomena lain tentang strategi komunikasi politik. Dalam kajian ini diungkapkan bahwa objek kajian merupakan pasangan calon kandidat Adnan dan Rauf, kandidat calon wakil bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gowa dari jalur perseorangan. Sesuatu hal yang menarik adalah meskipun berasal dari calon perseorangan akan tetapi berkat strategi komunikasi politik yang dibangun pasangan ini mampu memperoleh dukungan dari partai politik yang ada di Kabupaten Gowa. Hasil dari adanya dukungan beberapa partai politik ini nyatanya mampu di aplikasikan juga dalam tim pemenangan pasangan Adnan-Rauf. Penekanan mediasi sebagai sarana strategi komunikasi politik utama yang dibangun pasangan Adnan-rauf terhadap partai politik pendukung merupakan sebuah strategi jitu yang dilakukan dalam rangka pembangunan komunikasi internal tim pemenangan. Dengan kemampuan pasangan Adnan-Rauf dalam pembangunan komunikasi politik secara akomodatif menjadi sentral strategi utama mengapa pasangan ini mampu mendapatkan banyak dukungan meskipun bukan pasangan yang diusung oleh partai politik. Lebih lanjut, Fadly Jamil menuliskan bahwa di dalam proses kampanye, pasangan Adnan-Rauf memulai strategi politiknya dengan memperkuat tim pemenangan internal dan intens membangun komunikasi dengan tim pemenangan tersebut. Tindak lanjutnya, tim pemenangan melakukan pemetaan masyarakat untuk mengetahui Khalayak Politik (Penerima)

didasarkan pada karakteristik social masyarakat, geografis dan juga,tradisi social politik yang elekat di masyarakat Gowa.

Lutfi Rinaldi Lubis (2018) mengkaji tentang strategi komunikasi politik yang digunakan oleh pasangan Djarot-Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Diungkapkan Lubis bahwa dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kandidat Djarot memiliki tantangan yang cukup berat karena namanya yang relatif belum dikenal luas di Sumatera Utara. Pria kelahiran Magelang tersebut memiliki *track-record* (rekam jejak) yang cukup baik sebagai pejabat publik. Pengalamannya diawali dengan terpilihnya beliau sebagai Walikota Blitar dan dipercaya masyarakat Blitar selama dua periode (2000-2010). Tidak hanya itu, pada tahun 2014 Djarot pernah dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur dan mendampinginya hingga 2017. Di pertengahan tahun 2017, Djarot dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengundurkan diri setelah divonis bersalah dalam kasus penodaan agama. Berbeda dengan Djarot yang notabene nya bukan masyarakat asli Sumatera Utara, wakilnya Sihar Sitorus merupakan pengusaha sukses yang berasal dari provinsi Sumatera Utara. Putra dari tokoh Batak, DL Sitorus ini pernah dipercaya sebagai juru kampanye nasional oleh PDIP pada masa Pilpres 2014.

Strategi komunikasi yang digunakan oleh pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus adalah lebih kepada komunikasi secara langsung dan bersifat non formal. Berusaha selalu bertemu dengan semua jenis kalangan masyarakat dan berbaur dengan mereka. Menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh Sumatera Utara, dan tidak membedakan indentitas suku, ras, etnis, dan agama, serta melakukan kunjungan ke pasar-pasar tradisional untuk membangun citra politiknya. Kedua adalah mengampanyekan visi misi serta program kerja berbasis transparansi dan kesejahteraan. Akan tetapi, pencalonan Djarot sebagai calon gubernur Sumatera Utara tidak berjalan baik. Kegagalannya dalam kontestasi Pilkada bukan karena gagal menyampaikan program kerja, melainkan karena faktor identitas. Djarot yang posisinya bukan masyarakat asli Sumatera Utara menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasangan Djarot-Sihar sangatlah lemah. Sulitnya mengakses informasi juga diyakini mempengaruhi kegagalan Djarot-Sihar.

Terakhir Thaibah (2018) memfokuskan kajiannya pada strategi komunikasi politik pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar pada Pilkada

Kabupaten Aceh Barat Daya 2017. Dalam kajiannya diungkapkan bahwa kandidat Akmal Ibrahim yang sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi pengadaan lahan dan dipenjara selama 18 bulan mampu memenangkan Pilkada 2017 mengungguli delapan pasangan lainnya. Strategi komunikasi politik yang digunakan pasangan Akmal dan Muslizar diyakini Thaibah menjadi faktor utama kemenangan pasangan tersebut. Akmal Ibrahim dan Muslizar menggunakan strategi komunikasi politik dengan corak dakwah. Corak dakwah yang dimaksud adalah dengan melakukan pengajian, tausiyah, dan penyantunan anak yatim. Terdapat empat tahapan aksi strategi pemenangan yang dilakukan oleh pasangan Akmal-Muslizar yaitu mendengar, mengajak, bicara, dan menang. Dengan menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pilkada tersebut, pasangan Akmal-Muslizar menggunakan strategi komunikasi politik dengan dua pendekatan komunikasi. Pertama adalah pendekatan komunikasi interpersonal dilakukan dengan cara bertatap muka perorangan yang dituju dengan maksud melakukan promosi dan mengharap dukungan pemilih. Kedua, pendekatan komunikasi publik dilakukan dengan media massa baik cetak maupun elektronik seperti berita online, koran, spanduk, iklan dialog interaktif bahkan media sosial seperti *facebook* agar pesan-pesan politik yang disampaikan dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan strategi-strategi tersebut diyakini sangat efektif, dan terbukti pasangan Akmal-Muslizar memperoleh suara sebanyak 35,27% atau 28.183 suara dari total 79.485 suara sah. Perolehan pasangan ini dominan di delapan kecamatan dari sembilan kecamatan di Aceh Barat Daya.

2. Dinamika Komunikasi Politik dalam Kontestasi Pilkada

Pada bagian kedua, tinjauan pustaka ini akan berfokus pada penelitian-penelitian terdahulu dengan fokus kajian mengenai dinamika komunikasi politik dalam konteks kontestasi pilkada. Penelitian mengenai tema ini sudah dilakukan oleh Slamet (2019), Firdausi (2019), Susanto (2017), dan Indrawan (2017).

Slamet (2019) memfokuskan kajiannya mengenai komunikasi politik yang diimplementasikan dalam bentuk politik identitas. Metode tersebut digunakan oleh empat pasangan calon kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2018 sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat supaya masyarakat memberikan dukungan suaranya dengan menampilkan identitas kedaerahan khas sunda, dan juga identitas keagamaan. Keseluruhannya menggunakan strategi komunikasi politik melalui politik

identitas dengan menunjukkan gaya retorika kampanye identitas budaya sunda sebagai strategi politik . strategi komunikasi dengan menunjukkan identitas budaya dianggap mampu untuk meraih perolehan suara yang signifikan dari konstituen. Komunikasi politik dalam bentuk Identitas ini digunakan dengan lebih menonjolkan sisi symbol-simbol identitas non verbal sehingga masyarakat yang melihat akan terpengaruh dan diharapkan mampu untuk menarik dukungan masa di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat tersebut.

Dalam kaitanya dengan penelitian yang peneliti lakukan sangat jelas perbedaannya dengan apa yang ditulis oleh Adiyana Slamet. Perbedaan paling mencolok terdapat pada komunikasi politik yang digunakan oleh kandidat pasangan calon. Disamping itu terdapat perbedaan lingkup lokus penelitian dimana Slamet meneliti dengan lokus adalah provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian yang peneliti tulis lingkungnya adalah di level Kabupaten. Terlebih lagi dalam apa yang ditulis oleh slamet, para calon kandidat gubernur Jawa Barat berlomba-lomba menunjukkan identitas kedaerahan mengingat para calon kandidat tersebut sama sama berasal dari provinsi Jawa Barat. Sedangkan pasangan Dico-Basuki sebagai objek kajian peneliti, bukan merupakan warga asli Kabupaten Kendal. Dengan demikian menjadi menarik untuk dikaji apakah strategi komunikasi Politik yang dilakukan Dico-Basuki akan mampu menarik dukungan suara dari konstituen.

Kajian selanjutnya mengenai strategi komunikasi politik dilakukan oleh Firdaus dan Sururi (2019). Kaduanya memfokuskan pada strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Vera dan Nurhasan sebagai calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Serang. Dalam pelaksanaan pilkada Kota Serang pasangan ini telah memiliki modal berupa dukungan dari sejumlah partai besar seperti PDIP, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKPI, PBB dan Nasdem serta pihak-pihak lain yang terkait. Kedudukan Vera sebagai Istri dari walikota Incumbent yang telah menjabat selama dua periode sebelumnya diprediksi akan mendapatkan kemenangan dalam Pilkada Kota Serang 2018. Hal yang menarik justru terjadi pada saat pelaksanaan pilkada tersebut dimana pasangan Vera dan Nurhasan mengalami kekalahan. Firdausi dan Sururi menemukan fakta yang menjadi penyebab mengapa pasangan Vera dan Nurhasan mengalami kekalahan dalam pilkada Kota Serang yakni tidak matangnya perencanaan strategi komunikasi yang dibangun. Hal itu dibuktikan dengan penyampaian pesan kampanye yang tidak tepat dengan situasi kondisi yang terjadi di Kota Serang pada saat pelaksanaan pilkada tersebut. Kegagalan strategi komunikasi melalui gagalnya penyampaian pesan kampanye ditambah

dengan masyarakat pemilih rasional yang tidak mau memilih calon walikota dari keluarga dinasti.

Terdapat perbedaan dari apa yang ditulis oleh Firdausi dan Sururi dengan apa yang peneliti lakukan. Dalam tulisan Firdausi dan Sururi tersebut lebih menonjolkan mengenai sosok calon kandidat walikota yakni vera yang merupakan istri dari walikota incumbent dengan segala dukungan yang dimiliki akan diprediksi untuk memenangkan kontestasi pilkada. Terdapat perbedaan dengan apa yang peneliti tulis mengenai pencalonan pasangan Dico-Basuki dimana Pasangan ini memang didukung oleh mayoritas partai di DPRD Kendal namun pasangan Dico-Basuki tidak memiliki kaitan apapun dengan politik dinasti maupun dengan pemerintahan Incumbent sebelumnya, sehingga menjadi lebih menarik untuk dilihat ketika pasangan Dico-Basuki mendapatkan kemenangan dalam Kontestasi Pilkada Kendal 2020.

Susanto (2017) dalam kajiannya lebih memfokuskan pada media yang digunakan sebagai pendukung jaringan komunikasi politik. Susanto menyatakan bahwa faktor munculnya media sosial sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi politik yang berlangsung. Komunikasi politik yang terjadi disebabkan adanya fleksibilitas yang terjadi dalam pemanfaatan media sosial. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sosial politik untuk dapat memberikan pengaruh-pengaruh demi kepentingan politiknya melalui media sosial. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat dari penggunaan media sosial oleh elite politik untuk dapat memenuhi kesenangan semata seperti mencari tau kelemahan lawan politiknya, membangun konflik kepentingan, meminimalisir konflik, menebar propaganda dan mencari dukungan masa melalui kampanye politik. Apa yang diteliti oleh Susanto (2017) ini memberikan masukan yang kuat kepada penelitian yang peneliti tulis. Hal ini dapat dilihat bahwa memang sejatinya pemanfaatan media sosial dalam ranah politik sudah menjadi hal yang sangat sering dan umum terjadi. Dari sini kita dapat melihat bahwa terjadinya proses komunikasi politik yang terjadi pada proses kampanye hampir sama. Setiap calon kandidat yang maju dalam proses kampanye politik memanfaatkan media sosial sebagai media untuk menarik dukungan suara dari masyarakat dengan maksud untuk memenangkan kontestasi suatu pemilihan umum.

Berhubungan dengan hal tersebut akan diketahui bahwa memang proses terjadinya komunikasi politik akan bersamaan memunculkan opini publik sangat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat. Selanjutnya

Indrawan (2017) dalam kajiannya dijelaskan bahwa memang adanya komunikasi politik yang dibangun oleh seseorang ataupun kelompok orang yang memiliki kepentingan politik memiliki tujuan salah satunya adalah pembentukan opini publik. Disadari ataupun tidak suatu rencana kepentingan politis yang dijalankan oleh elite politik tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya upaya pembentukan opin publik. Seorang kandidat calon kepala daerah ataupun politisi misalnya tidak akan mampu memperoleh kemenangan dalam proses kontestasi politik apabila sebelumnya mereka tidak melakukan upaya pembangunan opini public dalam proses kampanye yang dilakukan. Dengan demikian disadari bahwa dua hal ini yakni komunikasi politik dan pembentukan opini publik sangatlah berpengaruh pada berhasil atau tidaknya suara masyarakat di mobilisasi dalam kontestasi politik. Merujuk dari apa yang ditulis oleh Indrawan, semakin kuat peneliti melihat bahwa pembangunan opini publik adalah modal penting yang harus dimiliki oleh seorang calon kandidat kepala daerah. Pasangan Dico-Basuki sebagai pasangan yang notabene merupakan nama baru dan terlebih lagi keduanya bukan merupakan warga asli dari kabupaten Kendal akan memiliki peluang lebih besar apabila pasangan ini mampu membangun opini publik agar dapat memberikan dukungannya dalam pilkada 2020. Dengan demikian apa yang ditulis oleh Indrawan ini menjadi dasar penguat bagi peneliti untuk melihat lebih jauh apakah di dalam proses elektroal, pasangan Dico-Basuki menggunakan strategi Komunikasi Politik akan membangun opini publik atau tidak. Tentunya dengan tujuan akhirnya adalah memenangkan pilkada Kendal di tahun 2020 ini.

Dari keseluruhan tinjauan pustaka yang peneliti rujuk, ada poin-poin yang membedakan antara penelitian yang akan peneliti tulis dan apa yang sudah orang lain tulis. Disisi lain ada pula poin-poin yang menguatkan penelitian yang peneliti tulis, sehingga hal ini akan peneliti gunakan sebagai bahan penguatan argumentasi yang peneliti sajikan dalam penelitian ini agar penelitian ini mampu menjadi penelitian yang baru dan juga dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

F. Kerangka Teori

a. Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik merupakan panduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan strategi komunikasi politik harus menunjukkan operasionalnya secara taktis, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu,

bergantung pada situasi dan kondisi. Perencanaan atau strategi komunikasi politik tidak hanya untuk mengetahui kemana arah dari kegiatan komunikasi politik tetapi juga memenangkan dukungan masyarakat secara politik (Thaibah, 2018).

Fred R. David (dalam Ridho, 2011: 20-21) mengemukakan bahwa proses penerapan sebuah strategi menggunakan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari perumusan strategi, implementasi strategi dan juga evaluasi strategi. merumuskan strategi dapat dikatakan sebagai proses menyusun langkah awal strategi. Langkah ini sudah mencakup pengembangan tujuan, mengenal peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objek/aktivitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

Setelah perumusan strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Kerjasama dalam pelaksanaan strategi dibutuhkan agar analisis strategi yang dirancang dan disusun dengan matang dalam berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi. Langkah akhir yang harus dilakukan adalah melakukan sebuah evaluasi strategi. Hal ini penting dilakukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai (Ridho, 2011). Terdapat aspek-aspek atau variable dalam strategi komunikasi politik yaitu *analisis situasi, segmentasi, positioning, dan saluran komunikasi*. *Analisis situasi* digunakan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. *Segmentasi* digunakan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok yang bermanfaat untuk mencari peluang. *Positioning* sebagai

strategi komunikasi yang berhubungan bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam khayalnya sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu. Dan saluran komunikasi merupakan sarana-sarana yang dapat memudahkan kita dalam menyampaikan pesan, pesan disini baik dalam bentuk lambang, gambar, kata ataupun tindakan dan bisa juga merupakan gabungan dari hal-hal tersebut (Ardial, 2010).

b. Pilkada dan Kontestasi Politik

Pilkada merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan yang terbuka (*transparent*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Prinsip utama dalam pembuatan tata cara dan mekanisme tahapan kegiatan (pendaftaran pemilih, pencalonan, penelitian syarat calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan calon terpilih) dan penunjang tahapan kegiatan (surat suara dan logistik pemilih, kartu pemilih, tempat pemungutan suara, dan sebagainya) adalah menciptakan pilkada langsung dengan prosedur yang terduga dengan hasil yang tidak terduga. Artinya ketentuan mengenai proses pemilihan dilakukan dengan tatacara dan mekanisme yang dapat diketahui dan diakses semua pemilih, partai politik, calon dan sebagainya untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan prosedur tersebut, persaingan atau kompetisi yang berlangsung dalam pemilihan diharapkan berjalan dengan bebas dan *fair* sesuai aturan sehingga calon terpilih tidak diketahui atau ditentukan sebelumnya (Djuyandi, 2017).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dico-Basuki dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal 2020” ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri menurut Kirk dan Miller merupakan suatu metode tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan social yang bergantung kepada pengamatan manusia sebagai dasar. Metode kualitatif ini digunakan guna memahami sebuah fenomena

mengenai apa yang terjadi pada obyek kajian yang sedang diteliti. Pengamatan terhadap obyek kajian ini biasanya meliputi persepsi, perilaku, motivasi dan juga tindakan diamati dengan cara deskripsi melalui bentuk kata atau kalimat pada suatu konteks khusus melalui pemanfaatan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011).

Menurut Sugiyono (2011), metode kualitatif terdefinisi sebagai sebuah metode dengan landasan postpositivisme. Sementara itu pada saat melakukan penelitian terhadap suatu objek alamiah, peneliti menempatkan posisinya sebagai sebuah instrument inti. Hal ini dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data melalui cara triangulasi data dan kemudian data tersebut di analisis secara induktif dengan hasil yang lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi.

Melalui judul yang diajukan, peneliti berusaha untuk dapat menarasikan suatu fenomena yang terlihat pada proses pencalonan pasangan Dico-Basuki dalam pilkada serentak Kabupaten Kendal 2020. Penggunaan metode kualitatif mengharuskan peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh untuk menggali informasi terkait objek yang menjadi kajian penelitian. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan metode ini peneliti akan lebih fokus pada kajian penelitian yang ditulis. Focus kajian penelitian dalam metode ini akan dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana strategi politik yang dilakukan tim pemenang Dico – Basuki dalam memenangkan Pilkada di Kabupaten Kendal 2020 dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

2. Sumber dan Jenis Data

Padapenelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yakni data primer dan juga data sekunder. Adapun penjabaran mengenai dua jenis data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari wawancara atau pengamatan secara langsung. Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian data melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berupa buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi atau resmi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari data melalui informan atau responden.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif adalah hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus dan lain-lain. Semua data dan informasi yang diperoleh dan dianalisis (Patilima, 2011).

Dalam proses pengumpulan data terdiri dari beberapa metode yang dapat digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Dimana metode-metode pengumpulan data tersebut dapat membantu peneliti mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian data ini merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian, karena proses inilah yang sangat menentukan keberhasilan penelitian.

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang lebih objektif, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatoris

Dalam sebuah penelitian, observasi partisipasi dapat dimaknai sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan dengan efisien dan sistematis untuk memperoleh sebuah data. Ketika observasi partisipatoris digunakan dalam sebuah penelitian, maka peneliti akan meleburkan diri dengan ikut serta dalam kegiatan objek kajian penelitian dan terjun langsung dalam social setting dari objek kajian tersebut dan mencatat data-data yang diperoleh di lapangan secara mendalam (Marsh & Stoker, 2017). Dalam penelitian ini, observasi partisipatoris digunakan peneliti untuk mengikuti dinamika kegiatan kampanye politik pasangan Dico-Basuki pada Pilkada Kendal 2020. Tujuan utama dari pengamatan mendalam ini adalah peneliti diharapkan mampu menemukan strategi komunikasi politik yang digunakan pasangan Dico-Basuki dalam kontestasi Pilkada Kendal 2020.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Menurut Moloeng (2010: 190-191), wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam penelitian kali ini, akan dilakukan kepada narasumber-narasumber yang berkaitan langsung dengan topic kajian yang peneliti ambil antara lain adalah

para ketua partai koalisi pendukung Dico-Basuki, Tim sukses dan juga beberapa masyarakat di kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi/Studi Pustaka

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh langsung dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada tentang strategi komunikasi politik kandidat dalam memenangkan Pilkada.

4. Analisis Data

Hasil temuan data di lapangan dari proses observasi dan wawancara selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan tafsir yang lebih mendalam. Penafsiran lebih dalam terhadap sebuah data lapangan disebut dengan teknik analisis data. Teknis analisis data sendiri adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Penggunaan teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan mencakup tiga hal inti. Tiga hal inti dari teknis analisis data menurut Miles dan Huberman adalah Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan juga penarikan kesimpulan atau verifikasi (Concluding Drawing). (Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti akan memulai langkah analisa data dengan pertama-tama memilih data-data yang merupakan data-data pokok yang berkaitan dengan tema kajian yang akan diteliti. Hal ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memberikan kemudahan pemahaman dari data yang ditemukan. Setelah selesai melakukan proses reduksi data, selanjutnya peneliti akan menyajikan data-data temuan untuk lebih memahami langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam analisa data. Proses analisa data dilakukan dengan seksama dan sistematis dengan hasil akhirnya peneliti akan menarik kesimpulan akhir dari hasil kajian penelitian yang dilakukan. Proses analisa data ini peneliti lakukan secara sistematis untuk melihat bagaimana pasangan Dico-Basuki dengan strategi komunikasi politik yang dibangun untuk kemenangan dalam kampanye pilkada Kendal 2020.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I akan disampaikan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dikaji. Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan menjadi rumusan-rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu pada bab ini pula akan diuraikan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Ditunjang dengan pemetaan definisi, teori dan juga konsep yang akan digunakan juga dalam penelitian ini.

BAB II STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DAN KONTESTASI

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan peneliti gunakan meliputi teori strategi komunikasi politik, dan juga teori pilkada sebagai landasan kontestasi politik. Teori-teori ini akan digunakan sebagai landasan analisis untuk mematangkan konsep penelitian yang dilakukan.

BAB III LANDSCAPE DAERAH DAN DINAMIKA PILKADA KENDAL 2020

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi lengkap daerah yang menjadi lokus penelitian yakni di Kabupaten Kendal. Gambaran ini meliputi profil Kabupaten Kendal, kondisi geografis, kondisi topografis, kondisi demografis kabupaten Kendal. Selain menjabarkan mengenai landscape kabupaten, dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai dinamika pilkada Kendal tahun 2020.

BAB IV PEMAHAMAN DICO-BASUKI TENTANG KONTEKS SEBAGAI BASIS STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK

Bab ini akan menjelaskan proses bagaimana pasangan Dico-Basuki memahami Kabupaten Kendal sebagai wilayah kontestasi. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai bagaimana Pasangan Dico-Basuki menggunakan strategi politiknya untuk memetakan potensi wilayah dan juga potensi yang dimiliki para pesaingnya untuk sebagai dasar komunikasi politik yang akan digunakan.

BAB VEKSPRESI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM TINDAKAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Pada bab ini akan diuraikan secara detail bagaimana pasangan Dico-Basuki menggunakan strategi komunikasi politiknya serta pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam upaya kampanye politik pemenangan pilkada Kendal 2020

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan akhir dari keseluruhan proses penelitian akan dijabarkan dalam bab ini.

BAB II STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DAN KONTESTASI

A. Strategi Politik dan Komunikasi Politik

1. Konsep Strategi Politik

Dalam kajian ilmu politik, sangat sulit memisahkan antara pengertian strategi dengan pengertian taktik, karena secara luas kedua istilah ini adalah mengarah pada sebuah seni dalam menggunakan ‘kekuatan bersenjata’ dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan. Menurut Carl von Clausewitz dalam (Pito dkk, 2006), mengatakan bahwa perbedaan antara taktik dan strategi sebagai berikut: taktik adalah seni menggunakan kekuatan bersenjata dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dengan tujuan akhirnya adalah mencapai perdamaian. Rencana jangka pendek itu disebut sebagai strategi. Dalam merumuskan strategi, Sun Tzu menjelaskan bahwa dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan. Selanjutnya ia berpendapat bentuk yang terbaik dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, yang terbaik kedua adalah menghancurkan aliansi lawan; yang paling buruk adalah menduduki kota-kota yang dibentengi lawan (Varma,2010).

Menurut Peter Schorder (1999: 110), untuk dapat menyerang lawan maka strategi lawan tersebut harus dikenali terlebih dahulu, oleh karena itu pengenalan atas pihak lawan sangatlah penting. Jika tidak, pelaku politik tidak akan dapat mengenali lawan. Penyerangan strategi lawan berarti secara terus menerus mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan. Sehingga lawan tidak dapat merealisasikan strateginya. Apabila tidak ada informasi yang tersedia berkenaan dengan strategi lawan, atau informasi yang ada kurang meyakinkan, maka aliansi lawan harus dihancurkan atau setidaknya diganggu. Apabila lawan memiliki hubungan yang baik dan berpengaruh dengan kelompok masyarakat (misalnya serikat kerja, gereja, masjid) maka ikatan-ikatan itu harus diregangkan. Hal ini dapat dilakukan, baik melalui penawaran yang menarik maupun dengan merusak kredibilitas lawan atau merusak kepercayaan aliansi terhadap lawan (dalam Fadly Jamil, 2016: 18).

Richard L. Daft (2010: 249) mendefinisikan strategi (*strategy*) secara eksplisit, yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang alokasi sumber daya serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan bersaing, dan mencapai tujuan perusahaan. Keunggulan bersaing (*competitive advantage*) adalah hal yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain dan memberi ciri khas bagi perusahaan untuk memenuhi

kebutuhan pasar konsumen. Inti perumusan strategi adalah menentukan bagaimana perusahaan kita akan berbeda dengan perusahaan lain.

Menurut Peter Schroeder dalam Pito dkk, (2006: 2010-2013), pola dasar strategi yang diperlukan haruslah dikenali dengan tepat. Hal ini menjadi penting sebab pilihan pola strategi sangat berpengaruh pada tujuan yang akan dicapai. Dengan berlandaskan definisi tersebut, Peter Schroeder mengklasifikasikan jenis strategi menjadi dua bagian yakni strategi ofensif dan juga strategi defensive. Penjabaran mengenai klasifikasi strategi tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 1 Strategi Politik Menurut Peter Schorder

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, stragei multiplikator)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

Peter Schroder menilai bahwa strategi ofensif selalu dibutuhkan, misalnya apabila partai atau pasangan calon yang maju pada bursa pemilihan ingin memperoleh atau meningkatkan jumlah pemilihnya. dalam hal ini, harus ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai atau pasangan calon tersebut, sehingga strategi berhasil. Strategi ofensif dibagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Dalam strategi pemilihan umum, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping pemilih yang telah ada dalam hal ini basis massa. Oleh karena itu harus ada penawaran yang lebih baik para pemilih yang selama ini memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau pasangan calon lain yang menjadi pesaing dalam pemilihan umum. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penawaran yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran yang berasal dari partai atau pasangan calon yang lainnya. (Schroeder, 2013)

Selain menjabarkan mengenai strategi perluasan pasar, Schroder mengemukakan strategi menembus pasar juga merupakan hal yang sama pentingnya. Hal ini bukan menyangkut ditariknya pemilih yang diindikasikan akan memilih pasangan calon lain atau masyarakat yang selama ini tidak aktif

dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal. (Schroeder, 2013)

Dalam sisi lain Schroeder juga menjabarkan mengenai Strategi defensif. Dalam kaitannya dengan konteks pemilu, Strategi defensive ini dimaknai sebagai sebuah strategi untuk mempertahankan basis konstituen (pemilih tradisionalnya) dan strategi untuk menutup penyerangan dari partai lain. Strategi defensif akan muncul ke permukaan, misalnya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya apabila pemilih potensial (*potential constituent*) ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga akan muncul apabila sebuah arena kontestasi tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan basis konstituen diharapkan akan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Strategi defensif terdiri dari strategi mempertahankan pasar dan strategi menyerahkan pasar. (Schroeder, 2013) .

Strategi Mempertahankan pasar menurut Schroeder, merupakan strategi yang khas untuk mempertahankan pasar atau basis massa. Dalam kasus semacam ini jika dikaitkan dalam sebuah pemilihan, partai atau pasangan calon akan memelihara pemilih yang sudah diperkirakan akan menjadi pemilih tetap mereka atau yang biasa disebut basis massa dan memperkuat para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Pasangan calon beserta tim pemenangannya yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap atau strategi yang bertentangan dari para pesaingnya yang menerapkan strategi ofensif. Apabila yang satu ingin menonjolkan perbedaan yang ada guna memberikan penawaran yang menarik, maka kelompok yang menerapkan strategi defensif justru ingin agar perbedaan yang ada tidak dikenali. (Schroeder, 2013)

Strategi lain Menurut Schroder adalah strategi menyerahkan pasar. Strategi ini memiliki dua arti seperti: (1) Sebuah partai ingin menyerah dan dalam situasi tertentu ingin melebur dengan partai lain; (2) Dalam pemilihan umum yang menggunakan kertas suara (*ballotage*), dimana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya diikuti oleh kandidat terkuat dalam pemilihan umum tahap pertama, penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang sangat sering terjadi. (Schroeder, 2013)

Fred R. David (dalam Ridho, 2011: 20-21) mengemukakan bahwa proses penerapan sebuah strategi menggunakan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari perumusan strategi, implementasi strategi dan juga evaluasi strategi. merumuskan strategi dapat dikatakan sebagai proses

menyusun langkah awal strategi. Langkah ini sudah mencakup pengembangan tujuan, mengenal peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objek/aktivitas, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

Setelah perumusan strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Kerjasama dalam pelaksanaan strategi dibutuhkan agar analisis strategi yang dirancang dan disusun dengan matang dalam berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi dan mekanisme kepemimpinan yang dijalankan bersama budaya perusahaan dan organisasi. (Ridho,2011). Langkah akhir yang harus dilakukan adalah melakukan sebuah evaluasi strategi. Hal ini penting dilakukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.

2. Konsep Komunikasi Politik

Secara etimologi kata komunikasi berasal dari bahasa latin *communico* artinya membagi, dan *communis* artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara etimologi proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara paradigmatik adalah pola yang meliputi sejumlah komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Suprpto, 2009).

Definisi komunikasi secara utuh dapat dilihat dari pandangan para pakar komunikasi. Menurut Evvert M Rogers dan D Lawrence Kincaid, komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau kelakuan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Trenholm dan Arthur Jensen mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Menurut Hoverland bahwa komunikasi adalah proses dimana individu

mentransmisikan stimulus untuk mengubah respon individu yang lain. Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi sebagai berikut: *“The act by one or more persons of sending and receiving message distorted by noise, within a context, with some effect and with some opportunity for feedback”*. (komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam menyampaikan dan menerima pesan dalam suatu konteks yang menimbulkan efek dan terjadinya umpan balik meskipun dalam penyampaian pesan itu kadang-kadang mengalami gangguan). Jika ditarik kesimpulannya yaitu bahwa komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan satu orang atau suatu kelompok kepada yang lain untuk menyusun makna. Makna yang disusun merupakan citra mereka dan untuk bertukar citra itu terutama melalui simbol-simbol.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai komunikasi politik. Seperti yang kita tau bahwa Komunikasi Politik tidak berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada isi atau pesan yang dikandung dalam proses komunikasi tersebut yaitu pesan atau informasi politik. Komunikasi politik mempunyai peranan yang penting dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak luas, karena merupakan tolak ukur keberhasilan bagi para politisi atau institusi politik. Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan opini publik atau pendapat umum, dan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Menurut Ramlan Surbakti (2010) Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat.

Dalam definisi lain, komunikasi politik merupakan komunikasi yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga dalam rangka memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, baik dalam peranannya dalam pejabat pemerintahan maupun sebagai anggota suatu badan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (Effendi, 2005: 277).

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan opini publik atau pendapat umum, dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Terdapat berbagai macam bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus meliputi antara lain :

1) Retorika Politik

Retorika berasal dari bahasa Yunani *rhetorica*, yang berarti seni berbicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling memengaruhi sehingga bersifat kegiatan antarpersona. Kemudian berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada orang banyak atau khalayak umum (Arifin, 2003)

2) Agitasi Politik

Agitasi banyak sekali digunakan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang paling manjur atau mendapat tempat istimewa, namun sebaliknya, agitasi di negara demokrasi (termasuk Indonesia) sangat tidak disukai bahkan ditolak. Agitasi berasal dari bahasa Latin, *agritare* (bergerak, menggerakkan) atau dalam bahasa Inggris *agritation*. Agitasi adalah suatu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan dan tulisan, dengan jalan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak.

3) Propaganda Politik

Propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa mengindahkan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang disampaikan. Qualter mengatakan bahwa propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengawasi atau mengubah sikap dari kelompok-kelompok lain dengan menggunakan media komunikasi dengan tujuan bahwa pada setiap situasi yang tersedia, reaksi dari mereka yang dipengaruhi akan seperti yang diinginkan oleh si propagandis.

Propaganda sebenarnya sudah lama merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam bidang politik. Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam politik adalah yang dilakukan oleh Hitler (NAZI)

dalam Perang Dunia II, yaitu dengan melakukan kebohongan dengan cara menyebarkan ideologi NAZI (fasisme) untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Sebelumnya propaganda digunakan dalam bentuk kegiatan keagamaan (umat Katholik). Pada tahun 1622, Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi kardinal yaitu *cogretgionde propaganda fide*, untuk menambahkan keimanan Kristiani.

Seperti yang dikemukakan Ellul, propaganda adalah suatu alat yang dipergunakan oleh sekelompok yang terorganisir untuk menjalankan individu-individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam suatu organisasi. Bagi Ellul (dan juga bagi sarjana-sarjana yang lain), perkembangan kelompok itu terjadi secara serentak dengan perkembangan propaganda.

4) *Public Relations* Politik

Secara umum *public relations* dipahami sebagai suatu usaha penyampaian ideal atau pesan kepada masyarakat. Kemudian pengertian ini dikembangkan secara luas menjadi usaha-usaha untuk menciptakan dan menjaga hubungan yang harmonis dan menguntungkan. *Public relations* tidak hanya digunakan sebagai salah satu bentuk politika, namun juga dipakai dalam komunikasi lain, seperti komunikasi bisnis dan lain-lain.

Public relations politik adalah bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat secara jujur, terbuka, rasional dan timbal balik sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang dimulai dengan menciptakan rasa memiliki bagi masyarakat.

5) Kampanye Politik

Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan ulang dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi. (Suparman, 2005)

Ada berbagai macam jenis kampanye politik diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif massa. Metode ini biasanya digunakan dalam bentuk “imbau” kepada massa yang dilakukan baik

melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media perantara, yaitu media elektronik, media cetak atau poster. Salah satu kampanye yang biasa digunakan adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa atau orang banyak. Persuasi yang digunakan dalam penyampaian pesan politik melalui tatap muka secara langsung antara pasangan calon dengan masyarakat dan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik.

Kedua, kampanye interpersonal adalah kampanye yang dilakukan terhadap diri sendiri atau lebih kepada sikap-sikap pribadi. Hal-hal yang biasanya dilakukan oleh para kandidat/kerabat dekat/juru bicara utama dalam setting yang relatif informal. Bentuk kampanye interpersonalnya yang biasa dilakukan adalah kampanye melalui kantor pemuka pendapat. Para kandidat membina iktikad baik tokoh-tokoh lokal, negara bagian, dan yang mempunyai nama nasional.

Ketiga, kampanye organisasi. Di dalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah mengarahkan anggota, dan memberikan tekanan kepada calon penjabat: serikat buruh, asosiasi perusahaan, kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, *lobby* konsumen, pecinta lingkungan, dan lain-lain. Hal tersebut semuanya dilakukan agar dukungan suara mengarah kepada kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan umum. (Suparman, 2005)

6) *Lobby* Politik

Lobi politik adalah pengaruh pribadi, dalam hal ini kompetensi, penguasaan masalah, jabatan dan kepribadian politisi sangatlah berpengaruh. Lobi politik merupakan gelanggang terpenting dalam pembicaraan politisi atau kader politik, pengaruh otoritas, konflik, dan konsensus. Kecakapan pribadi dalam berinteraksi akan sangat mempengaruhi pencapaian misi dan juga program partai dalam mendapat dukungan masyarakat. Dengan adanya lobi politik maka akan mudah tercapainya tujuan yang dimaksud.

3. Konsep Strategi Komunikasi Politik

Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermassa). Teori komunikasi berdasarkan formula Harold D. Laswell secara gamblang menjelaskan bahwa proses komunikasi melibatkan lima unsur komunikasi, yaitu:

a. Komunikator Politik (*Who*)

Dalam komunikasi politik yang dimaksud dengan komunikator yaitu individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu-individu yang berada dalam suatu instansi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan kebijaksanaan komunikasi nasional.

b. Pesan Politik(*Say What*)

Pesan merupakan suatu muatan atau konten komunikasi yang dikemas atau dikonstruksi sebagai informasi yang bermuatan politik dan ditransformsikan kepada khalayak dengan menggunakan media, baik media massa maupun media sosial. Pesan politik merupakan salah satu unsur penting dalam komunikasi politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dalam ragam pesan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik.

Indikator yang berhubungan dengan komponen strategi ini mencakup (a) Benar, (b) Autentik, (c) Rasional, (d) Terukur, (e) Banyak, (f) Valid, (g) Cepat dan (h) Jelas sumbernya.

c. Saluran dan Media Politik(*In Which Channel*)

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, seperti surat kabar, tabloid, majalah. Media elektronik seperti film, radio, televisi, komputer, internet. Media format kecil seperti leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (*outdoor media*) seperti baliho, spanduk, reklame, bendera, logo, topi, rompi, kaos oblong, kalender, blok note, dan segala sesuatunya yang biasa digunakan untuk membangun citra *image building*.

d. Sasaran atau Target Politik (*To Whom*)

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Khalayak adalah suatu peran yang sementara sifatnya, penerima pesan akan memprakarsai penyampaian suatu pesan berikutnya. Maka pada saat itu pihak yang tadinya sebagai khalayak sudah berubah peran menjadi komunikator. Dalam komunikasi politik, khalayak yang menerima pesan-pesan politik adalah khalayak politik. Jadi khalayak atau masyarakat luas atau publik yang menerima, memaknai, dan terpengaruh dengan berita dan informasi atau pesan yang mempunyai muatan politik dalam bentuk apapun adalah khalayak politik. khalayak politik juga dapat berubah peran menjadi komunikator politik dan situasi dan kepentingan tertentu.

Indikator komponen ini mencakup (a) Personal, (b) Kelompok terbatas, (c) Masyarakat luas dan (d) Lawan tujuan.

e. Pengaruh/Efek Komunikasi Politik (*With What Effect*)

Efek dari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh para caleg dalam pemilihan umum bisa berpengaruh pada khalayak dengan cepat. Misalnya seseorang memilih calon karena adanya pengaruh-pengaruh/efek dalam strategi komunikasi politik yang telah digunakan oleh para kandidat. Khalayak cenderung memilih seorang kandidat karena secara tidak sadar telah terpapar berbagai macam kampanye (Cangara, 2009).

Indikator komponen ini mencakup (a) Pemahaman pesan oleh komunikan, (b) Kerjasama dalam memahami pesan, (c) Terjalin pemahaman bersama, (d) Terjadinya perbedaan persepsi, (e) Ingin menunjukkan arah dari pesan dan (f) Saling memperkaya pemahaman pesan.

Menurut Onong U. Effendy strategi komunikasi Politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Maka dalam merumuskan/menyusun strategi komunikasi diperlukan perumusan yang jelas. Komunikasi proses yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran atau taktik operasional komunikasi dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. (Thaibah, 2018)

Dalam sebuah partai politik ataupun bagi pasangan calon sudah tentu mempunyai strategi yang akan dijalankannya dalam menghadapi sebuah pesta demokrasi, seperti halnya Pilkada. Komunikasi politik yang merupakan salah satu fungsi dalam politik juga mempunyai strategi yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari pesan-pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat luas. Dari itu keberhasilan sebuah strategi komunikasi yang diterapkan oleh sebuah partai atau pasangan calon akan sangat berdampak kepada hasil dari penyelenggaraan umum. (Thaibah, 2018)

Strategi komunikasi politik merupakan panduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan strategi komunikasi politik harus menunjukkan operasionalnya secara taktis, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu, bergantung pada situasi dan kondisi. Perencanaan atau strategi komunikasi politik tidak hanya untuk mengetahui kemana arah dari kegiatan komunikasi politik tetapi juga memenangkan dukungan masyarakat secara politik. (Thaibah, 2018)

Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya. Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik tersebut. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya. (Jamil, 2016)

Politik dan strategi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan apabila mengejar tujuan berpolitik dalam kemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu strategi juga membutuhkan taktik, prasyarat dalam sebuah perencanaan adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Jadi perencanaan taktik dapat memberikan jawaban atas pertanyaan siapa, akan melakukan apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Keputusan taktis semacam ini digunakan untuk mencapai setiap

tujuan strategis. Keputusan-keputusan ini terutama tergantung pada pengenalan akan ruang lingkup, kerangka prasyarat, dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, perencanaan taktis hendaknya tidak direncanakan dari tingkat strategis, melainkan oleh pimpinan yang ada di tingkat taktis, karena hanya disinilah pengetahuan yang dibutuhkan berada. (Schroeder, 2013)

Strategi komunikasi politik dalam konteks Pilkada memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitas maupun posisinya sebagai kandidat incumbent saja, namun ada strategi komunikasi politik yang bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi diselenggarakan. Apabila untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misalnya untuk memenangkan pertarungan antar kandidat dalam Pilkada. (Schroeder 2013)

4. Implementasi Strategi Komunikasi Politik

Dalam sebuah kontestasi electoral, menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi itu diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut.

Menurut para pakar, tahapan-tahapan strategi komunikasi sebagai berikut:

1) Mengamati Permasalahan

Hal itu merupakan gabungan dari aktivitas-aktivitas seperti meneliti, mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap serta perilaku masyarakat yang memiliki kepentingan terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan. Sehingga mereka mencari dan berpatokan terhadap karakter publik atau masyarakat. Ini merupakan pengetahuan dasar dari strategi komunikasi yang akan diimplementasikan.

2) Perencanaan dan Pembuatan Program

Setelah informasi dan data terkumpul, langkah selanjutnya yakni menyusun program, tujuan, tindakan serta strategi komunikasi. Ini dilakukan apabila karakteristik masyarakat sudah diketahuinya, karena bagaimanapun perencanaan dan program adalah tahap lanjutan dari pengamatan permasalahan dari kondisi dan situasi di masyarakat.

3) Mengambil Tindakan Berkomunikasi

Tahap ini adalah implementasi dari perencanaan dan program yang telah diagendakan secara matang. Bagaimana mendesain citra atau *image* seefektif mungkin untuk menarik perhatian masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan pesan-pesan yang disampaikan secara komunikatif. (Schroeder, 2013)

4) Evaluasi Program

Tahap ini adalah mengevaluasi dari semua yang telah dilakukan mulai dari mengamati permasalahan, perencanaan dan program serta pelaksanaan dan komunikasi. Alasan dari evaluasi adalah hak untuk memfokuskan usaha, mengetahui keefektifan, mendukung manajemen baik dan memfasilitasi pertanggungjawaban. Dan pada tahap ini juga bisa mengetahui keberhasilan dan kesuksesan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. (Schroeder, 2013)

Masih berkaitan dengan strategi komunikasi, pakar komunikasi, Ardial (2010: 73) menyatakan bahwa pada hakikatnya strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Karena pada kenyataannya keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kegiatan komunikasi politik. Setelah itu, langkah yang tepat bagi seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan antara lain dengan merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta memantapkan kelembagaan politiknya.

Berikut beberapa aspek-aspek atau variabel dalam strategi komunikasi politik sebagai berikut:

1) Analisis Situasi

Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Dalam bidang politik, kepentingan seorang komunikator politik dan timnya melakukan analisis situasi adalah mengerti dan memahami situasi politik di masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam melakukan berbagai strategi komunikasi politik. Seorang komunikator politik atau kandidat sangat membutuhkan data yang akurat di daerah konstituennya.

2) Segmentasi

Masyarakat terdiri dari banyak individu yang memiliki nilai kebenaran masing-masing dalam menilai sesuatu. Begitupula dalam melalui kandidat hingga penentuan kandidat mana yang akan dipilih. Dinamika masyarakat yang berbeda satu sama lain menuntut partai politik atau kandidat untuk dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terdapat di dalam masyarakat untuk memahami karakteristik masing-masing. Aktivitas ini dapat dikatakan sebagai proses segmentasi.

Segmentasi pemilihan menurut Kollat dalam Wulan Purnama Sari (2018: 28-29) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Metode Segmentasi Pemilih

Dasar Segmentasi	Detail Penjelasan
Geografi	Masyarakat dapat disegmentasikan berdasarkan geografis dan kerapatan (<i>density</i>) populasi. Misalnya produk dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di pedesaan akan berbeda dengan produk politik yang dibutuhkan oleh orang perkotaan. Begitu juga antara pegunungan dengan pesisir, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain.
Demografi	Konsumen politik dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial. Masing-masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda tentang isu politik satu sama lain. Sehingga perlu untuk dikelompokkan berdasarkan kategori demografi.
Psikografi	Psikografi memberikan tambahan metode segmentasi berdasarkan geografi. Dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan kebiasaan, <i>lifestyle</i> , dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-isu politik.
Perilaku (<i>behavior</i>)	Masyarakat dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik. Masing-masing kelompok memiliki permasalahan politik. Masing-masing

	kelompok memiliki perilaku yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk didefinisikan.
Sosial budaya	Pengelompokan masyarakat dapat dilakukan melalui karakteristik sosial dan budaya. Klasifikasi seperti budaya, suku, etnik, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik.
Sebab-akibat	Selain metode segmentasi yang bersifat statis, metode ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan perilaku yang muncul dari isu-isu politik. Sebab-akibat ini melandaskan perspektif pemilih (<i>voters</i>). Pemilih dapat mengelompokkan berdasarkan pemilih rasional, tradisional, kritis dan pemilih mendua.

Sumber: Kollat et al; Dalrymple & Parson; Cui & Liu dalam Wulan Purnama Sari (2018: 29)

Orientasi pasar sangat tergantung pada segmentasi yang merupakan aktivitas seperti deteksi, evaluasi dan pemilihan kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga memungkinkan untuk mendesain suatu strategi yang sesuai dengan karakteristik tersebut (Francisco dalam Firmanzah, 2012: 182). Segmentasi sangat diperlukan untuk menyusun program yang sesuai dengan karakteristik kelompok. Dengan adanya segmentasi juga akan memudahkan kandidat dalam berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat.

3) *Positioning*

Menurut Kasali (2007), *Positioning* merupakan strategi komunikasi untuk menjembatani produk, merek, atau nama seseorang dengan calon konsumen atau audiens. Dalam penjabaran lain Haryanto dan Rumalu (2013) Mendefinisikan *Positioning* sebagai strategi komunikasi yang berhubungan bagaimana khalayak menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam khayalnya sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu. *Positioning* juga merupakan kalkulasi berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan seorang kandidat dalam kontestasi politik. Permasalahan mendasar dalam *positioning* adalah penciptaan *consistent image* yang mengerucut pada suatu tema tertentu dimana *image* politiknya terdiri atas

program kerja partai, isu politik dan *image* pemimpin partai.(Firmanzah, 2012)

4) Saluran komunikasi

Saluran komunikasi politik merupakan sarana-sarana yang dapat memudahkan kita dalam menyampaikan pesan, pesan disini baik dalam bentuk lambang, gambar, kata ataupun tindakan dan bisa juga merupakan gabungan dari hal-hal tersebut. Selain hal tersebut manusia merupakan sarana bagi saluran komunikasi yang paling utama. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan pola komunikasi politik yang berlaku dalam sistem politik, namun saluran komunikasi politiknya pada umumnya adalah sama. Lebih tepatnya, saluran komunikasi politik dapat diambil pengertian bersama siap berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana dan sejauh mana dapat dipercaya.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya saluran komunikasi politik memiliki banyak saluran dan yang paling sering digunakan adalah melalui saluran media massa. Namun, tidak hanya media massa yang menjadi saluran informasi politik. Komunikasi politik pun dapat terjadi melalui kelompok-kelompok kepentingan maupun partai-partai politik. Dalam hal ini, kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik berperan sebagai saluran yang memungkinkan terjadinya kontak-kontak antara pejabat-pejabat politik dan pejabat-pejabat administrasi serta dengan rakyat banyak. Kontak-kontak yang sering terjadi membuat hubungan mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Dengan demikian bisa terbina komunikasi politik vertikal dan horizontal secara baik. Dibandingkan dengan media massa sebagai saluran komunikasi lebih khusus. Namun harus diakui bahwa organisasi-organisasi semacam ini lebih sering terlibat dalam proses komunikasi politik, baik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal.

B. Pilkada dan Kontestasi Politik

Pemilihan umum dikenal dengan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat umum dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum pada negara

demokrasi juga berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. (Hasan, 2017)

Pilkada langsung merupakan langkah politik yang sangat strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dari rakyat dalam kerangka kepemimpinan kepala daerah. Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang bedimensi hukum, moral dan sosial. Jelasnya, seorang kepala daerah yang memiliki legitimasi adalah kepala daerah yang terpilih dengan prosedur atau tata cara yang sesuai ketentuan perundang-undangan, melalui proses kampanye dan pemilihan yang bebas, *fair* dan adil sesuai dengan norma-norma sosial dan etika politik, didukung oleh suara terbanyak dari seluruh pemilih sesuai objektif, dan menjalankan tugas serta fungsi kepala daerah sesuai dengan komitmen dalam proses kampanye dan pemilihan. (Hasan, 2017)

Pilkada langsung telah mengembalikan kedaulatan sepenuh ya diserahkan dan digunakan oleh rakyat dalam menentukan kepala daerah, sehingga lebih menjamin keterwakilan dan demokratisasi. Hasil pemilihan menjadi konsekuensi keputusan rakyat sendiri, termasuk jika di kemudian hari kinerja kepala daerah buruk dan mengecewakan. Oleh sebab itu, kualitas pemilih dalam sistem langsung sangat dibutuhkan. Kualitas pemilih mengandung rasionalitas dalam menyeleksi calon-calon kepala daerah yang ada. Pertanggung jawaban kepala daerah dilakukan kepada rakyat melalui mekanisme politik sehingga mekanisme *checks and balances* menuntut keterlibatan rakyat. (Hasan, 2017)

Pilkada merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan yang terbuka (*transparent*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Prinsip utama dalam pembuatan tata cara dan mekanisme tahapan kegiatan (pendaftaran pemilih, pencalonan, penelitian syarat calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan calon terpilih) dan penunjang tahapan kegiatan (surat suara dan logistik pemilih, kartu pemilih, tempat pemungutan suara, dan sebagainya) adalah menciptakan pilkada langsung dengan prosedur yang terduga dengan hasil yang tidak terduga. Artinya ketentuan mengenai proses pemilihan dilakukan dengan

tatacara dan mekanisme yang dapat diketahui dan diakses semua pemilih, partai politik, calon dan sebagainya untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan prosedur tersebut, persaingan atau kompetisi yang berlangsung dalam pemilihan diharapkan berjalan dengan bebas dan *fair* sesuai aturan sehingga calon terpilih tidak diketahui atau ditentukan sebelumnya (Djuyandi, 2017).

1. Pilkada Sebagai Proses Implementasi dari Proses Demokrasi

Konsep demokrasi secara umum tergolong luas, meliputi sejak konsep demokrasi Yunani kuno, demokrasi yang berkembang di Kota Madinah, Jazirah Arab pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, sampai kepada gagasan demokrasi modern yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara, demikian pula di kawasan Nusantara berkembang beberapa tradisi demokrasi yang kelak mengilhami berbagai pemikiran demokrasi di Indonesia (Azhari, 2015). Gagasan demokrasi yang disebut terakhir inilah yang akan dikemukakan seperlunya dalam pembahasan ini (Yaqin, 2011).

Pasca Reformasi 1998, banyak perubahan yang mendasar terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diantaranya pemilihan umum (Pemilu) 1999 yang bersifat multi partai, kemudian yang sangat signifikan terjadi dalam Pemilu 2004 yang lalu, selain bersifat multi partai, Pemilu 2004 juga Pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung. Tidak cukup sampai disitu, perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan presiden, karena rakyat langsung memilih pasangan presiden dan wakil presiden pilihannya. Pemilihan presiden secara langsung ini juga berdampak dalam proses pemilihan kepala daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Wedyanto, 2010).

Sistem demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. sistem ini menyadari pentingnya pengakuan terhadap hak-hak rakyat. demokrasi dalam tataran ini didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan hak serta kewajiban yang sama (Hamzah, 2013: 38).

Demokrasi dalam suatu negara sangatlah penting. Deliar Noer (dalam Hamzah, 2013: 38) menyebutkan bahwa demokrasi mempunyai arti penting dalam suatu negara, dalam rangka menjamin jalannya organisasi negara tersebut. Demokrasi merupakan dasar hidup bernegara

yang berarti bahwa pada tingkat terakhir, rakyatlah yang memberikan ketentuan terhadap masalah-masalah pokok kehidupannya, termasuk melakukan penilaian terhadap kebijakan negara. Karena itu, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, seluruh perkembangan ketatanegaraan, harus dilihat sebagai upaya untuk menemukan sistem ketatanegaraan terbaik yang dianggap sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Untuk itu ada kesepakatan, bahwa demokrasi dinilai sebagai sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Tetapi untuk demokrasi itupun bangsa Indonesia harus berupaya keras untuk menemukan formatnya yang terbaik. Pernyataan ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia selalu berupaya untuk menggali dan menemukan sistem penyelenggaraan tata negara yang dianggap terbaik secara bersama. Ini merupakan salah satu faktor terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 (Rozak, 2013).

Sri Soemantri mengungkapkan bahwa terjadinya amandemen UUD 1945 diantaranya menunjukkan adanya permasalahan demokrasi dalam UUD 1945. Konsepsi demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 dipandang telah melahirkan sistem ketatanegaraan yang bercorak otoriter. Karena itu amandemen tersebut harus dipahami sebagai bagian dari gagasan demokrasi dalam UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kedaulatan rakyat di Indonesia (Hamzah, 2013).

Sejak bergulirnya era reformasi, tuntutan masyarakat tentang pembaruan semakin kompleks dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang politik ketatanegaraan Indonesia. Hal yang sama juga terjadi tuntutan reformasi dalam politik pemerintahan di daerah. Hal inilah yang menandai terbitnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Hamzah, 2013)

Sebagai kelanjutan dari proses demokratisasi, di era reformasi ada sesuatu yang baru dalam praktek politik ketatanegaraan Indonesia yaitu pemilihan presiden langsung dan pemilihan kepala daerah langsung. Kebijakan Pemilu langsung merupakan respon dari semakin meluasnya harapan seluruh bangsa dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat secara demokratis. Hal ini juga untuk menjamin terciptanya mekanisme

check and balances di antara lembaga-lembaga pemerintahan. (Hamzah, 2013)

Berdasarkan latar belakang Pilkada di atas, dipahami bahwa Pilkada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, Pilkada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Selain itu, Pilkada merupakan upaya demokratisasi dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, yang telah dirampas oleh rezim otoriter Orde Baru sebelumnya. Pilkada lahir sebagai tuntutan dalam rangka kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang sebelumnya pemerintahan bersifat sentralistik dan otoriter. (Hamzah, 2013).

HAW Widjaja (dalam Hamzah, 2013: 42-43) mengemukakan semangat yang mendasari perlunya Pilkada secara langsung oleh rakyat daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan aturan pendukung lain di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan, karena adanya amandemen UUD 1945, terutama pada Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis;
- 2) Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih akan mampu membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran. Selama berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 aspirasi rakyat daerah terabaikan khususnya keinginan terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, tidak KKN dan keseimbangan dalam keadilan;
- 3) Adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota DPRD terutama pada penyampaian LPJ dan pemilihan kepala daerah.

2. Pilkada Bagian Tidak Terpisahkan dari Otonomi Daerah

Otonomi daerah dimaksudkan sebagai suatu proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi yang ditandai dengan diserahkannya urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional untuk mengelolanya sendiri. Proses peralihan ini dilakukan dengan tujuan agar terjadi efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, penumbuhkembangan dan kemandirian serta peningkatan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. (Hamzah, 2013)

Sejak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarah tata laksana pemerintahan di daerah secara otonom. Yang paling penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem otonom tersebut adalah penyelenggaraan Pilkada baik di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota (Hamzah, 2013).

Otonomi daerah tersebut pada dasarnya termuat dalam sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 yang memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Hamzah, 2013).

Secara historis, otonomi daerah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 yang penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004, maka undang-undang tersebut menjadi landasan penyelenggaraan otonomi daerah yang baru tentang pemerintahan daerah. dalam sejarah, sebenarnya desentralisasi telah lama dianut dalam negara Indonesia, secara historis asas desentralisasi telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan ke arah sentralisasi. Sementara Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah berusaha agar terjadi tendensi ke arah desentralisasi (Widjaja, 2013).

Dengan semangat desentralisasi tersebut, pemerintah daerah diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menentukan dan memilih pemimpinnya sendiri melalui Pilkada. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut terakhir di atas yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Esensi terpenting dalam otonomi daerah itu adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri, karena itu

pula daerah secara otomatis berwenang melaksanakan Pilkada. Secara konseptual teoritis, Pilkada sesungguhnya merupakan wujud penyelenggaraan demokrasi, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, atau menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. Dalam kasus yang sama, otonomi daerah juga merupakan perwujudan dari demokratisasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Hal ini terlihat dari paradigma mengalihkan sentralisasi pemerintahan pusat ke tangan pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah atau desentralisasi. Sehingga, Pilkada di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain (Hamzah, 2013).

3. Latar Belakang Pelaksanaan Pilkada

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama, yaitu pemerintah daerah. Perundangan ini tidak secara khusus mengatur tentang Pilkada saja, melainkan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Salah satu hal yang sangat penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan Pilkada. Salah satu tujuan pokok dari pemberian kewenangan tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerahnya (Hamzah, 2013).

Dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki serta tidak jelasnya hubungan hirarkis dengan pemerintahan di atasnya. Selain itu dengan terbukanya peluang yang sangat luas untuk mengelola kekayaan dan keuangan daerah, membuka peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah. Akibatnya, terjadi korupsi besar-besaran di daerah, baik di kalangan eksekutif maupun di kalangan legislatif. Selain itu, terjadi politik uang dalam Pilkada, Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah dan terjadinya sengketa antar daerah.

Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan koreksi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya sebagaimana dikemukakan di atas. Karena itu ada upaya evaluasi baik dari pemerintah

maupun masyarakat dalam rangka mengobati kekecewaan masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat beberapa kelemahan yang berdampak pada munculnya problem yang cukup serius. (Hamzah, 2013)

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah mempunyai dasar hukum sebagaimana diamatkan UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas ini kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Syarifin & Jubaedah, 2014).

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengurus sendiri pemerintahannya, maka yang terpenting ialah adanya peran pemerintah tersebut, yaitu menyelenggarakan Pilkada dalam rangka memilih pemimpin daerahnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. uraian tersebut dipahami bahwa terbitnya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak lain sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi yang menetapkan urusan pemerintahan tidak lagi bersifat sentralistik. Undang-undang memberikan jaminan kepada pemerintah daerah secara otonomi untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. hal yang sangat penting adalah penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan secara langsung oleh rakyat melalui penyelenggara yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu KPU, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. (Hamzah, 2013)

4. Pilkada dalam Perspektif Hukum Islam

Perubahan dalam perpolitikan Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto telah memberikan ruang demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya era reformasi, dimana Indonesia menjadi negara yang kian menghargai hak-hak warganya terutama dalam menentukan pemimpinnya. Masyarakat mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin yang bertarung dalam sebuah kontestasi untuk menduduki jabatan di suatu pemerintahan. Dalam kajian politik Islam, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban dan sangat penting. Hal ini bisa dimengerti, karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat (Jamil, 2016).

Persoalan pemimpin dalam Islam biasanya dibahas dalam hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang terdapat di dalam masyarakat. Pemilihan pemimpin, dalam Islam biasanya selalu dikaitkan dengan masalah fungsi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang menjalankan dakwahnya, beliau memegang dua fungsi sekaligus yaitu fungsi menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawa-Nya. Dua fungsi ini biasanya disebut dengan fungsi pemimpin agama (fungsi religius) dan pemimpin negara atau politik (fungsi politik). (Hamzah, 2013)

Dalam Islam, kedua fungsi ini dijalankan secara bersama-sama dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya, sebab keduanya terdapat hubungan timbal balik dan hubungan yang sangat erat. Inilah sebenarnya yang kemudian menimbulkan pandangan, khususnya kalangan pemikir modern, bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus. Artinya, Islam agama dan negara memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab agama hanya dapat berjalan jika ada institusi atau alat yaitu negara yang mendukungnya. Sedangkan sebaliknya negara hanya bisa tegak jika ditopang oleh agama, sebab negara dan proses pelaksanaan yang berkenaan dengan negara, harus sesuai dengan ajaran agama (Hamzah, 2013).

Pentingnya kehadiran seorang pemimpin disebabkan karena pemimpin memiliki fungsi dan peran sentral, terutama untuk menciptakan kemaslahatan agi rakyat. bahkan bagi kalangan *Syi'ah*, kepemimpinan (imamah) tidak saja menjadi penting, tetapi merupakan salah satu prinsip atau rukun iman, karena itu pemilihan seorang imam adalah wajib hukumnya. Berbeda pandangan, kalangan Suni tidak hanya memandang kepemimpinan sebagai bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam, akan tetapi mereka berpandangan bahwa kepemimpinan bukanlah salah satu bagian dari rukun iman. Akan tetapi dalam pandangan tertentu, masalah pemimpin ini menjadi bagian yang prinsipil, seperti terlihat dalam fakta sejarah politik Islam. Pada realitasnya, persoalan pertama yang muncul sesaat pasca wafatnya Rasulullah SAW adalah masalah politik atau persoalan imamah, yakni masalah pergantian Nabi SAW selaku kepala negara. Persoalan ini juga yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam teologi. (Nasution, 2014)

Salah satu esensi dari pernyataan di atas, bahwa eksistensi seorang pemimpin sangat penting, karena ia merupakan alat bagi terciptanya kemaslahatan manusia, sedangkan menciptakan dan memelihara kemaslahatan

hukumnya wajib. Pentingnya memilih pemimpin, dalam hadis Nabi SAW disebutkan adanya keharusan mengangkat salah seorang menjadi pemimpin dari tiga orang yang sedang dalam perjalanan:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

“Jika ada tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua (pemimpin) rombongan.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Konteks hadist tersebut di atas, dapat dipahami akan wajibnya memilih seorang pemimpin, meski dalam jumlah komunitas kecil, apalagi jika menyangkut rakyat banyak dalam suatu wilayah. Berkaitan dengan masalah ini, Hasbi Ah-Shiddiqy (2011) menjelaskan bahwa para ulama berkata apabila terhadap tiga orang saja yang bermukim di gurun pasir, sudah diwajibkan memilih pimpinan, konon pula bila jumlah jamaah yang cukup besar, memilih pemimpin tentu lebih diwajibkan. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengomentari keharusan menunjuk pemimpin bahwa Nabi SAW mewajibkan mengangkat seorang pemimpin dalam sebuah komunitas kecil yang sementara dalam perjalanan sebagai peringatan terhadap semua macam komunitas yang lain.

Al Mawardi (dalam Hamzah, 2013:227) lebih lanjut menegaskan bahwa Jumhur ulama sepakat bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib dengan kategori wajib kifayah. Jumhur ulama yang sepakat tentang wajibnya memilih pemimpin berbeda pendapat dan argumentasi tentang apakah kewajiban itu berdasarkan akal atau berdasarkan wahyu. Golongan *Mu'tazilah* berpandangan bahwa kewajiban menegakkan kepemimpinan itu didasarkan pada alasan-alasan rasional, bukan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan akal wahyu. Menurut mereka, segala sesuatu yang diharuskan akal pikiran, merupakan suatu keharusan dan karena Allah SWT telah menganugerahkan akal pikiran, maka dia berhak akan kesyukuran baik sebelum maupun sesudah adanya syariat.

Kewajiban memilih pemimpin dalam Islam pada dasarnya dilandaskan kepada agama. Prinsip-prinsip pokok tentang kekuasaan politik dan pemerintahan, demikiran jga tentang keharusan adanya pemimpin, telah disinggung secara umum dalam Al-Qur'an. Tentang hadis sebagaimana telah dikemukakan, tentu semakin mempertegas pendapat tentang kewajiban memilih pemimpin. Tentang argumentasi kewajiban memilih pemimpin berdasarkan akal pikiran, hal tersebut merupakan jalan yang seiring dengan

tujuan menciptakan kemaslahatan umat, seperti yang terkandung dalam *al-maqaid al-syari'ah*. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Muhammad Yusuf Musa (dalam Hamzah, 2013) bahwa pengangkatan imam bagi kaum muslimin merupakan tujuan terpenting dari Islam, sehingga secara syariat merupakan kewajiban keagamaan.

Kewajiban memilih pemimpin atas dasar agama, dapat dilihat antara lain dalam ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam tentang kekuasaan politik dan pemerintahan, seperti terdapat dalam Surah an-Nisa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat tersebut di atas menunjukkan adanya perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman agar menaati Allah, Rasul-Nya, termasuk kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik. Ketaatan rakyat kepada pemimpinnya telah disepakati oleh ulama. Ayat di atas menjelaskan, menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Ulil amri adalah orang yang mendapat mandat untuk memerintah rakyat. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan. Pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib ditaati. Akan tetapi, yang akan dijelaskan terkait ayat di atas adalah adanya kewajiban untuk menaati pemimpin. Jika menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih dan mengangkat pemimpin hukumnya juga wajib.

Pada awal Islam, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya sebuah negara di Madinah. Hal ini dapat dibuktikan dengan terciptanya sebuah baiat yang disebut baiat *'aqabah*. Baiat ini merupakan momentum perjanjian yang jelas antara kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW di dalam pembentukan pertama atau persiapan negara Islam memberikan kekuasaan kepada beliau.

Kewajiban mendirikan sebuah negara, selain merupakan praktek Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau, juga negara memang salah satu alat

untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat Islam, menciptakan kemaslahatan dan memeliharanya dengan pemimpin tertinggi sebagai pemegang tanggung jawab politik utama yang harus ditaati oleh masyarakat. Konsekuensi dari fungsi kepemimpinan tersebut, sehingga seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dari kemungkinan berpecah belah, membuka jalan bagi terciptanya kemaslahatan bersama. Pemimpin, dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas-tugas sebagai penjabaran dari fungsi kekuasaan politik yang dimilikinya yaitu *pertama*, menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial dan *kedua*, memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara. (Hamzah, 2013)

Argumentasi di atas menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin dalam Islam merupakan satu bagian tak terpisahkan dengan pendirian negara sebab sebuah negara bisa disebut negara jika memiliki seorang pemimpin, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Konsekuensi dari keberadaan sebuah negara dalam Islam, menjadikan pemilihan pemimpinnya sebagai sesuatu yang ikut menjadi bagian penting, memiliki peran dan fungsi sentral. Karena itu, memilih pemimpin dalam Islam merupakan rangkaian yang sangat erat kaitannya dengan masalah kenegaraan atau pemerintahan, karena di dalam negara dan oleh negara di selenggarakan pemilihan pemimpin tersebut. Karena pentingnya pemilihan pemimpin ini, dalam rangka pelaksanaan sebagian besar ajaran Islam, bahkan dapat dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam (Basyir, 2011).

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilukada tersebut dimaksudkan sebagai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung. Kata “langsung” dimaksudkan sebagai pemilihan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat sendiri tanpa melalui sistem perwakilan sebagaimana pemilihan-pemilihan sebelumnya (Hamzah, 2013).

Pemilukada merupakan rangkaian pelaksanaan demokratisasi yang memegang peran dan arti penting bagi sebuah daerah di tingkat lokal. Pemilukada merupakan penyejewantahan dari nilai-nilai atau konsekuensi logis dari sistem demokrasi, sebab rakyat diberikan sepenuhnya hak-hak

untuk memilih sendiri pemimpinnya secara langsung. Menurut Cornelis Lay (2016) dalam tulisannya “Pemilukada Langsung dan Pendalaman Demokrasi” dijelaskan bahwa sejarah perpolitikan Indonesia, bahwa pelaksanaan pemilukada langsung dilakukan pertama kali sejak 2005. Pelaksanaan pemilukada tersebut, didasarkan pada Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan pemilukada tersebut, dipahami, dalam konteks demokratisasi di Indonesia, pemilukada sebagai suatu instrumen yang amat penting peran dan artinya. Ia merupakan implementasi dan pengejawantahan nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan yang disandarkan kepada rakyat. Hanya saja, seiring dengan pentingnya pelaksanaan pemilukada tersebut, pada realitasnya bermunculan berbagai macam problem, yang menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan roda pemerintahan, terutama di daerah, sebagai akses yang ditimbulkan dari pemilukada yang bermasalah.

Dari fakta secara nasional, pelaksanaan pemilukada banyak menuai polemik dan konflik. Faktor konflik dan polemik ini antara lain diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik, mengingat watak masyarakat yang pada umumnya bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pemilukada ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Rusyaidi, 2011).

Fakta-fakta lain yang dapat dilihat, terdapat beberapa kabupaten/kota yang pelaksanaan pemilukada mengalami gejolak konflik politik yang cukup serius dan cenderung destruktif sampai kepada kerusuhan, baik antar masa pendukung kandidat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Munculnya masalah ini mengakibatkan, demokrasi yang terbangun, bukannya proses demokrasi sejatinya, tetapi anarki, atau apa yang disebut oleh sejumlah pengamat dengan “democracy”, yakni suatu proses demokrasi yang berorientasi kepada kepentingan kekuasaan pribadi, kelompok dan golongan yang cenderung menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan (Kaloh, 2012).

Selain itu tidak kalah gaungnya adalah politik uang, menguatnya fenomena “makelar politik” pada seleksi tingkat partai politik, juga rendahnya penghormatan terhadap hukum (hasil keputusan sengketa pemilukada).

Berkaitan dengan hal tersebut, J. Prihatmoko (2012) menjelaskan nilai minus pemilukada terletak pada: Pertama, kebutuhan dana yang sangat besar. Hal tersebut disebabkan membengkaknya biaya operasional logistik kampanye, hadiah kepada masing-masing konstituen yang dibungkus dalam bentuk sumbangan, baik secara terbuka maupun tertutup di setiap berlangsungnya perhelatan kampanye. pemilukada juga akan memberatkan pemerintah daerah karena memiliki tanggung jawab dalam pendanaan khusus bagi penyelenggaraan pemilukada. Pembengkakan biaya akan semakin besar jika harus dilaksanakan tahap putaran kedua pemilukada akibat akumulasi suara yang tidak memenuhi standar minimal jumlah suara 25% pemenang pertama. Kedua, pemilukada telah terbukti menciptakan konflik secara terbuka, baik antara elit dan massa, antara elit dan elit lainnya dan antara massa dengan massa lainnya. Karakter pemilukada yang terbuka itu dapat memancing konflik massa yang lebih besar seperti kekecewaan atas kegagalan kandidatnya meraih kemenangan. Ketiga, pemilukada dapat mengganggu aktivitas rakyat sehari-hari karena menyedot konsentrasi mereka akibat kampanye para kandidat, pikiran mereka tersedot dengan isu-isu dan manuver yang dilakukan kandidat.

Pemilukada tergolong ke dalam salah satu masalah-masalah kontemporer dan dalam prakteknya di hampir seluruh wilayah di Indonesia ini, tidak jarang ditemui kasus penyimpangan baik secara politik, maupun secara sosial, dan bahkan secara ekonomi. Kasus-kasus tersebut, bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, karena telah mengancam eksistensi kebutuhan primer umat manusia, sementara dalam konteks hukum Islam, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda merupakan bagian-bagian penting dari objektivitas syariat Islam (*al-maqa'id al syari'ah*). Karena itu, penetapan hukum pemilukada harus sesuai dengan tujuan penetapan hukum dalam Islam (*al-maqa'id al syari'ah*). (Effendi, 2015)

BAB III

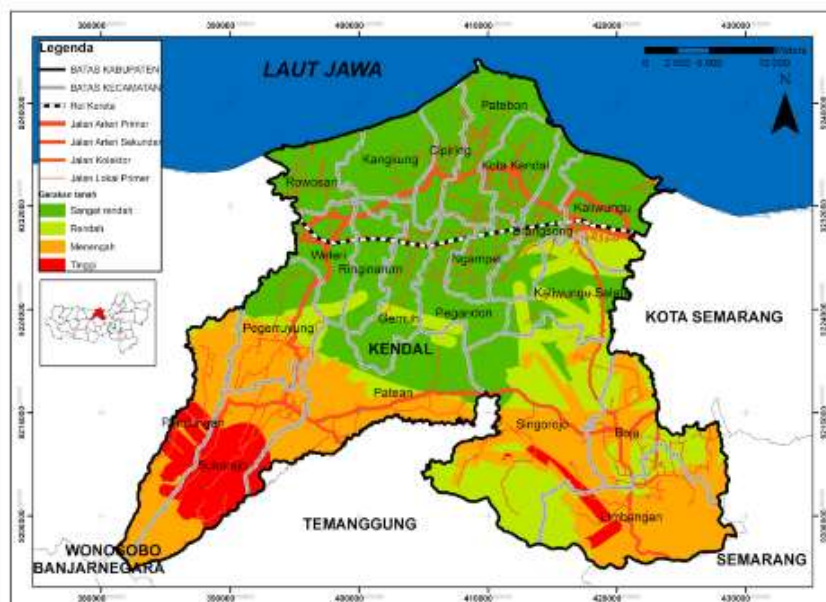
LANDSCAPE DAERAH KABUPATEN KENDAL DAN DINAMIKA PILKADA KENDAL 2020

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Kendal terletak antara 109° 40' – 110° 18' Bujur Timur dan 60° 32' – 70° 24' Lintang Selatan dan merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kabupaten Kendal dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota Semarang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang



Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Kendal

Luas Kabupaten Kendal sebesar 1.002,23 km² dan merupakan kabupaten terluas ke-20 di Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Singorojo merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kendal dengan luas 119,32 km² atau 11,91 persen dari luas Kabupaten Kendal secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Ringinarum, luas wilayahnya sebesar 23,49 km² atau 2,34 persen dari luas Kabupaten Kendal secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Kendal terbagi dalam 20 kecamatan dan 285 desa/kelurahan.

2. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 meter dpl, yang meliputi 12 kecamatan. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10-2.579 meter dpl, yang meliputi 8 kecamatan.

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak dan kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan.

Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 641 mdpl. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 560 mdpl. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4 mdpl.

3. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 971.086 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal selama 9 tahun terakhir (2010-2019) sebesar 0,85%.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut sensus penduduk (September) 2020 sebanyak 1.018.505 jiwa terdiri dari 514.795 (50,54%) laki-laki dan 503.710 (49,46%) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 82.443 jiwa atau 8,09% dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal, kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 32.586 jiwa atau 3,20% dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Kendal dan Weleri. Berdasar hasil sensus penduduk pada

kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 2.177 dan 1.978 jiwa setiap kilometer persegi sedangkan di Kecamatan Singorojo dan Limbangan kepadatan penduduknya hanya 443 dan 487 setiap kilometer persegi.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 493.062 jiwa dan pengangguran sebesar 40.314 jiwa. Dari seluruh jumlah angkatan kerja, jumlah angkatan kerja laki-laki yang bekerja paling besar dibanding jumlah angkatan kerja lainnya yaitu 289.663 jiwa dan yang terkecil adalah pengangguran perempuan 15.306 jiwa.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal 2020

Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	36.443	34.949	32.586
5-9	40.116	38.278	60.399
10-14	39.818	37.849	35.671
15-19	40.645	38.106	52.105
20-24	40.728	38.642	52.854
25-29	42.975	41.137	34.937
30-34	44.741	42.304	82.443
35-39	40.879	39.853	66.157
40-44	38.495	38.495	51.999
45-49	33.927	35.313	50.611
50-54	32.720	33.771	37.954
55-59	28.771	28.373	35.855
60-64	23.220	22.797	52.409
65-69	16.204	16.016	36.620
70-74	7.940	8.598	59.885
>75	7.173	9.231	53.566
Jumlah	1.018.505	9.231	1.018.505

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kendal Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Plantungan	16.704	15.882	32.586
02. Sukorejo	30.871	29.528	60.339
03. Pegeruyung	18.277	17.394	35.671
04. Patean	26.459	25.646	52.105
05. Singorojo	26.699	26.155	52.854
06. Limbangan	17.594	17.343	34.937
07. Boja	41.455	40.988	82.443
08. Kaliwungu	33.325	32.832	66.157
09. Kaliwungu Selatan	26.329	25.670	51.999
10. Brangsong	25.633	24.978	50.611
11. Pegandon	3,73	1220	37.954
12. Ngampel	18.133	17722	35.855
13. Gemuh	26.454	25.955	52.409
14. Ringinarum	18.710	17.910	36.620
15. Weleri	30.249	29.636	59.885
16. Rowosari	27.050	26.516	53.566
17. Kangkung	25.063	24.820	49.883
18. Cepiring	26.314	26.340	52.654
19. Patebon	30.342	29.743	60.085
20. Kota Kendal	30.122	29.710	59.832
Jumlah	514.795	503710	1.018.505

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Laju pertumbuhan penduduk (*population growth rate*) di Kabupaten Kendal setiap tahunnya rata-rata 1,20% jika mengacu kepada data penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Dengan luas wilayah Kabupaten Kendal yang terbangun 1.002,23 km² dan jumlah penduduk yang mendiami 1.018.505 jiwa maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kendal adalah sebanyak 1016 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kendal sebanyak 2177 jiwa/km² sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Singorojo sebanyak 443 jiwa/km².

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, dan Distribusi Presentase Penduduk

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>
	2018	2019	2020	2010-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Plantungan	29.555	32.044	32.586	1,19
02. Sukorejo	62.592	59.738	60.399	0,55
03. Pegeruyung	32.868	35.522	35.671	1,21
04. Patean	50.753	52.373	52.105	1,03
05. Singorojo	50.479	52.743	52.854	1,19
06. Limbangan	32.961	35.073	34.937	1,25
07. Boja	79.178	77.636	82.443	1,68
08. Kaliwungu	64.100	63.498	66.157	1,20
09. Kaliwungu Selatan	48.743	48.779	51.999	1,52
10. Brangsong	47.952	50.577	50.611	1,22
11. Pegandon	35.057	38.966	37.954	1,24
12. Ngampel	32.625	36.300	35.855	1,39
13. Gemuh	46.802	52.448	52.409	1,41
14. Ringinarum	32.876	37.326	36.620	1,35
15. Weleri	58.137	61.740	59.885	0,69
16. Rowosari	47.533	53.481	53.566	1,45
17. Kangkung	44.673	50.776	49.883	1,65
18. Cepiring	49.131	53.704	52.654	1,12
19. Patebon	59.336	60.298	60.085	0,93
20. Kota Kendal	58.957	58.917	59.832	0,98
Jumlah	948.493	1.011.939	1.018.505	1,20

Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2021

B. Profil Pilkada Kendal 2020

1. Proses Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020

Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020 yang memilih Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Pada Pilkada ini,

pasangan calon yang akan maju dapat berasal dari partai maupun independen. Berikut adalah jadwal tahapan-tahapan dalam Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020.

Tabel 3. 4 Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1. PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2. PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3. KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1. PPK		
		PPK (sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2. PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3. KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
		1. Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2. Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA			

	SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
		1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019 2 Desember 2020
		2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019 8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		1 November 2019 8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4		23 Januari 2020 25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		26 Januari 2020 22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		21 Maret 2020 23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		21 Maret 2020 23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS		15 Juni 2020 14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020 13 Agustus 2020
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020 29 Agustus 2020
		3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020 1 September 2020
		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampainnya kepada KPU Kabupaten/Kota	2 September 2020 4 September 2020
		5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020 14 September 2020
		6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020 16 September 2020
		7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	14 September 2020 18 September 2020
		8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020 28 September 2020
		9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020 3 Oktober 2020
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan	4 Oktober 2020 6 Oktober 2020

			kepada PPK		
		11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober 2020	9 Oktober
		12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
			a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
			b. Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
			c. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
			d. Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			28 Agustus 2020	3 September 2020
	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			4 September 2020	6 September 2020
	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON				
	a.	Verifikasi syarat pencalonan		4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		4 September 2020	5 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat		4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan		4 September 2020	11 September 2020

	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
		3) Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
		7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK	22 Desember 2020	22 Desember

			kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota		2020	
		9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
		10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA						
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara				
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020	
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020	
	b.	Pemungutan suara				
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020	
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA						
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK			9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK			10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota			10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota			10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota			13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			13 Desember 2020	17 Desember 2020

	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota		13 Desember 2020	23 Desember 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		13 Desember 2020	19 Desember 2020
	i.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		16 Desember 2020	20 Desember 2020
	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumuman di KPU Provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU Provinsi		16 Desember 2020	26 Desember 2020
PENETAPAN CALON TERPILIH					
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN				Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
		Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH					
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN					
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota			
		1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksudkan dalam angka 10 huruf a angka 1)	
		2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksudkan dalam angka 10 huruf a angka	

				2)
--	--	--	--	----

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

2. Profil Bakal Calon Bupati Kendal dalam Pilkada tahun 2020

a. Dico M Ganinduto

Dico M Ganinduto lahir di Jakarta pada 19 Februari 1990. Ia dikenal sebagai politisi muda Partai Golkar dan juga merupakan seorang pengusaha sukses yang bergerak di bidang pertambangan. Dico menyelesaikan pendidikan SMA di Pendleton School, Florida, Amerika Serikat pada 2008 dan meraih gelar sarjananya di University of Tulsa, Petroleum Engineering, Tulsa, Oklohoma hingga 2012. Dico menikah dengan artis Chacha Frederica pada 2015. Dari pernikahan ini ia dikaruniai satu anak yaitu Cassia Shakir Gainduto.

Tahun 2018 Dico Gainduto masuk sebagai anggota Partai DPP Paartaai Golkar. Di tahun 2019, Dico M Ganinduto terpilih menjadi wakil sekretaris jenderal DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Calon bupati termuda di Jawa Tengah ini juga aktif di organisasi sayap Partai Golkar seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan membentuk Gema Golkar dengan posisi ketua.

Dico adalah putra dari politikus senior Partai Golkar Dito Ganinduto. Mengikuti jejak ayahnya, Dico kemudian terjun ke kancah politik dengan mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif 2019 Dapil I Jawa Tengah meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Akan tetapi usahanya dalam pencalegan belum bisa membuatnya melangkah ke Senayan.

Tidak hanya aktif di organisasi AMPG dan Gema Golkar, Dico M Ganinduto memiliki latar belakang organisasi yang cukup banyak, antara lain Petroleum Engineering sebagai *Member of Society* tahun 2008-2012, PERMIAS Tulsa sebagai Anggota tahun 2008-2010, PERMIAS Tulsa sebagai Wakil Presiden tahun 2010-2011, PERMIAS Tulsa sebagai Presiden tahun 2011-2012 dan ISSI DKI sebagai Bendahara Umum tahun 2019. Ia juga mendapat berbagai penghargaan diantaranya Golf Team dari Tim Nasional Indonesia tahun 2000-2003 dan Nasional Go-Kart dari Tim Nasional Indonesia tahun 2004-2006.

Dalam Pilkada tahun 2020, Dico maju sebagai bupati berpasangan dengan Windu Suko Basuki yang merupakan kader Partai Demokrat dan mantan anggota perwira TNI Angkatan Darat Unit Kopassus. Pasangan dengan jargon “Bolone Dibas” ini didukung oleh gabungan koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PKS dan Perindo yang memiliki 12 kursi di DPRD Kabupaten Kendal. Windu Suko Basuki lahir di Semarang, 3

Juni 1961. Ia pernah menjadi politikus Nasdem dan berhasil menjadi anggota DPRD Kota Semarang.

Politikus Partai Demokrat dan juga pengusaha ini memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak antara lain LPMK Kelurahan Kemijen sebagai Ketua tahun 1990-1995, SOKSI Kota Semarang sebagai Ketua tahun 1998-2000, PENGKAB PSSI Kota Semarang sebagai Pengurus tahun 2000-2004, PGSI Jawa Tengah sebagai Ketua tahun 2005-2008, PSSI U-15 sebagai Manager tahun 2011-2014, PSSI U-17 sebagai Manager tahun 2014-2017 dan Ketua DPC Demokrat Kendal. ia juga mendapat penghargaan diantaranya GOM IX Irian Jaya dari TNI AD tahun 1984, Satya Lencana Seroja Timtim dari TNI AD tahun 1986, Kesetiaan VIII dari TNI AD tahun 1992, Kesetiaan XVI dari TNI AD tahun 2000, Kesetiaan XXIV dari TNI AD tahun 2008, Satya Lencana Nara Riya dari Presiden RI tahun 2000, Peringkat 1 Agen BBM Terbaik dari PT. Pertamina tahun 2010, Peringkat 1 Agen BBM Terbaik dari PT. Pertamina tahun 2012, Best Growth Volume Agen BBM Terbaik dari PT. Pertamina tahun 2013, 100 Agen BBM Terbaik Seluruh Indonesia dari PT. Pertamina tahun 2015, Agen Terbaik Wilayah 1 IFM MOR IV dari PT. Pertamina tahun 2016, Peringkat 1 Agen BBM Terbaik dari PT. Pertamina tahun 2017-2019.

b. H. Ali Nurudin, S.Sos., M.Si

Ali Nurudin lahir di Kendal, 23 Juni 1966. Ali Nurudin adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia pesantren. Dari aspek pendidikan, Ali Nurudin memiliki gelar S2 (M.Si) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang tahun 2015-2017.

Ali Nurudin memiliki latar belakang organisasi yang cukup banyak, antara lain Nahdlatul Ulama Ranting Kutoharjo sebagai Rois Syuriah tahun 2006-2011, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwungu sebagai Wakil Rois Syuriah tahun 2010-2015, Penasihat Srikandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah tahun 2015-sekarang, Ketua Pembina Yayasan Yatim Piatu Al-Ikhlas Kaliwungu sebagai pengasuh tahun 2000-sekarang, Pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur Kaliwungu tahun 2000-sekarang, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kendal tahun 2018-2023 dan Ketua Paguyuban Sokolima Kabupaten Kendal tahun 2018-2023.

Pada Pilkada tahun 2020, ia maju sebagai calon Bupati berpasangan dengan Yekti Handayani. Pasangan ini didukung oleh koalisi PKB, Gerindra, dan Nasdem yang memiliki 18 kursi di DPRD Kabupaten

Kendal. Yekti Hidayani dikenal publik sebagai pengusaha dan menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdikan di pelosok Kabupaten Kendal.

c. H. Tino Indra Wardono

Tino lahir di Gresik, 26 April 1983. Berbeda dengan dua calon lainnya yang memiliki riwayat pendidikan sampai ke jenjang universitas, Tino merupakan calon Bupati yang hanya mengenyam pendidikan sampai SLTA. Akan tetapi, pengalaman organisasi Tino sangatlah banyak khususnya pengalaman organisasi kepemudaan antara lain DPD BMI (Banteng Muda Indonesia) Jawa Tengah sebagai Bendahara tahun 2012-2020, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah sebagai Ketua tahun 2018-2021, PW GP Ansor Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan tahun 2018-2023, MPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang Pengembangan Usaha tahun 2017-2021, PW PRIMA-DMI (Perkumpulan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia) Jawa Tengah sebagai Pembina tahun 2019-2022, Gerakan Orang Tua Asuh Jawa Tengah (Gn-OTA) Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua tahun 2018-2023, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah sebagai Bendahara tahun 2010-2014, DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Wakil Bendahara tahun 2016-2019, BP3 (Badan Pengusaha Pemuda Pancasila) Jawa Tengah sebagai Sekretaris tahun 2019-2021, BPD HIPMI Jawa Tengah sebagai Sekretaris Umum tahun 2017-2018, BPD HIPMI Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014-2017, BPC HIPMI Jawa Tengah sebagai Ketua Umum tahun 2010-2014, CSR Jawa Tengah sebagai Ketua Umum tahun 2016-2017 dan Karang Taruna Jawa Tengah sebagai Wakil Bendahara tahun 2010-2014.

Dalam Pilkada tahun 2020, Tino yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kendal berpasangan dengan Mukh. Mustamsikin yang dikenal sebagai tokoh ulama Kendal yang berpengalaman dalam pemerintahan. Pria kelahiran Kendal, 6 Agustus 1965 pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kendal periode 2010-2015. Latar belakang organisasi beliau antara lain Jamiyah Syar'iyah PP Lirboyo Kediri sebagai Ketua tahun 1986-1987, Jamiyah Pusat Remas Batu PP Lirboyo sebagai Ketua tahun 1987-1988, KESIS Pusat Jawa Timur sebagai Ketua tahun 1986-1989, Pondok Pesantren Lirboyo sebagai Sekretaris tahun 1987-1988, PAC GP Ansor Kaliwungu sebagai Ketua tahun 1992-1995, MWC NU Kecamatan Kaliwungu sebagai Ketua tahun 2003-2008, PC NU Kabupaten Kendal sebagai Ketua I tahun 2007-2012, MUI Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris tahun 2012-2017, Yayasan Masjid Besar Al-Muttaqin

Kaliwungu sebagai Sekretaris tahun 2005-2010, JATMAN Syubiyah Kabupaten Kendal sebagai Mudir tahun 2017-2022, FUSPAQ Kabupaten Kendal sebagai Ketua tahun 2003-2023, F-KBIH Kabupaten Kendal sebagai Ketua tahun 2019-2024, KBIH AROFAH Kaliwungu sebagai Ketua tahun 2019-2024, BWI Kabupaten Kendal sebagai Ketua tahun 2016-2021, dan HIMASAL Jawa Tengah sebagai Ketua I tahun 2019-2024.

3. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kendal 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal dilaksanakan pada 9 Desember 2020, telah terjaring tiga kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan tersebut antara lain pasangan Dico M Ganinduto-Windu Suko Basuki, pasangan Ali Nurudin-Yekti Handayani, dan pasangan Tino Indra Wardono-Mukh. Mustamsikin. Hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki dengan perolehan suara sah 279.632 (49,2%). Sedangkan pasangan Ali Nurudin dan Yekti Handayani mendapatkan perolehan suara 214.299 (37,7%), serta pasangan Tino Indra Wardono dan Mukh. Mustamsikin mendapatkan 74.371 suara (13,1%). Jumlah suara sah sebanyak 568.302 dari 596.437 orang yang menggunakan hak suaranya. Jumlah pemilih tetap yang terdaftar sebanyak 789.187 pemilih.

BAB IV
PEMAHAMAN DICO-BASUKI TENTANG KONTEKS SEBAGAI BASIS
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK

A. Pemahaman Tentang Kendal Sebagai Wilayah Kontestasi

1. Struktur Masyarakat Kendal

Proses kampanye sebagai dinamika politik pasangan calon tidak bisa terlepas dari keberadaan masyarakat multietnis yang ada di Kabupaten Kendal. struktur masyarakat Kabupaten Kendal yang multietnis tentu menjadi suatu perhatian khusus guna melihat lebih jauh terhadap pengaruh yang ditimbulkan dan dampaknya terutama dalam dinamika politik yang ada di Kaupaten Kendal.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kaupaten Kendal 2020

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	984.440
2	Katolik	5.184
3	Protestan	5.795
4	Hindu	478
5	Budha	284
6	Konghuchu	38
7	Aliran Kepercayaan	5

Sumber: BPS Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan banyaknya pusat-pusat pengajian Islam didukung dengan sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal semakin memperkuat identitas Kabupaten Kendal sebagai wilayah yang memiliki tingkat religius yang tinggi. Struktur masyarakat Kabupaten Kendal yang religius dengan tingkat kepatuhan dan fanatisme yang tinggi kepada ulama menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan Dico-Basuki. Kyai dan ulama memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kemenangan seorang kepala daerah. Mereka memiliki santri dalam jumlah besar yang dapat digerakkan untuk memilih calon tertentu.

Para kyai dan ulama tidak hanya memiliki pengaruh yang besar di dalam perpolitikan. Pandangan dan sikap politik yang ditunjukkan oleh kalangan kyai dan ulama berpengaruh di Kabupaten Kendal ini akan menentukan pandangan dan sikap politik masyarakat Kabupaten Kendal terutama kalangan masyarakat muslim. Sehingga tidak jarang setiap ada

penyelenggaraan kontestasi politik, para elit dan tokoh-tokoh politik baik lokal ataupun nasional selalu datang dan mengunjungi para kyai dan ulama untuk mendapatkan restu/persetujuan dari kyai dan ulama yang berada di daerah tersebut. Peran kyai dan ulama seperti KH Danial Royyan dan KH Dimiyati Rois tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan dinamika politik di Kabupaten Kendal. Setiap orang yang hendak maju dalam setiap pemilihan umum khususnya pemilihan umum kepala daerah pasti akan menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke kediaman kyai dan ulama. Kuatnya pengaruh dari para kyai dan ulama juga berpengaruh kepada suara mayoritas masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Kendal seorang calon haruslah memperoleh do'a restu dan dukungan dari para kyai dan ulama tersebut.

2. Kondisi Sosial dan Budaya

Kabupaten Kendal memiliki segala aspek persyaratan untuk tumbuh menjadi daerah unggul di Jawa Tengah maupun nusantara. Kekayaan sumber daya alam yang ditopang dengan posisi strategis di sepanjang jalur Pantura dan Tol Jawa, menjadi kelebihan Kendal dibandingkan daerah lain. Topografi wilayah yang lengkap, mulai dari kawasan pesisir, perbukitan hingga pegunungan membuka berjuta peluang pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu, perpaduan tradisi santri dan *abangan* juga menjadi daya tarik tersendiri dengan menghasilkan banyak ragam seni budaya di Kabupaten Kendal.

Namun sangat disayangkan, berbagai keunggulan tersebut ternyata lebih dipahami oleh pemerintah pusat dan provinsi dibandingkan pemerintah daerah. Lokasi Kabupaten Kendal yang representatif, ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi kawasan industri pada 2016 dengan mendatangkan banyak investor asing. Keputusan tersebut disambut dengan kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo memperjuangkan Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga berhasil ditetapkan pada 2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019. Akan tetapi, inisiatif pemerintah pusat dan provinsi dengan mendorong masuknya investasi sebesar 5 miliar USD dan penyerapan tenaga kerja hingga 20 ribu tenaga kerja tidak dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Bahkan saat ini, Kabupaten Kendal tertinggal dengan daerah sekitar.

Di tengah menggeliatnya perekonomian Kendal oleh investasi pusat dan provinsi, angka pengangguran di Kendal justru tertinggi di kawasannya.

Pada 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kendal mencapai 6,6 persen, jauh di atas Kabupaten Batang sebesar 4,23 persen, Temanggung 3,24 persen dan Kabupaten Semarang yang hanya 2,28 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada indikator partisipasi angkatan kerja. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal juga lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang berada dalam satu kawasan. Pada 2019, TPAK Kabupaten Kendal hanya sebesar 67,7 persen, Sedangkan Kabupaten Batang sebesar 68,53 persen, Kabupaten Semarang 74,38 persen dan bahkan Temanggung mencapai angka 76,09 persen. Data tersebut menunjukkan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja.

Tingginya angka pengangguran disertai ketidakmampuan mengembangkan potensi keunggulan daerah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan. Hingga 2019, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal cukup relatif tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal sebesar 9,41 persen, sedikit lebih baik dari Temanggung sebesar 9,42. Namun berada jauh di bawah Kabupaten Batang sebesar 8,35 persen dan Kabupaten Semarang sebesar 7,4 persen. Permasalahan kemiskinan menjadi benang kusut seiring dengan minimnya keberanian pimpinan daerah melakukan terobosan kebijakan. Padahal dengan berbagai potensi yang dimiliki, Kabupaten Kendal seharusnya dapat mengejar ketertinggalan. Sedikit sentuhan kreatif dari pemimpin yang memiliki kemampuan (*competence*) akan dapat mendorong Kabupaten Kendal melaju lebih cepat daripada kabupaten lainnya. Data Indeks Inovasi Daerah 2018 menunjukkan bahwa “inovasi” menjadi barang langka di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal menduduki peringkat 140 Indeks Inovasi Daerah secara nasional, jauh tertinggal dengan Kabupaten Semarang yang berada di peringkat 84, Temanggung 112 dan Kabupaten Batang 127.

Disamping minimnya inovasi, kepemimpinan daerah juga belum mampu menata kelola pemerintahan dengan baik. Janji-janji politik semasa kampanye, tidak tergambar dalam prestasi kerja pemerintah daerah dikarenakan tidak optimalnya kinerja perangkat daerah. Data terbaru (2019) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kendal hanya berada di peringkat 81, sedangkan Kabupaten Semarang melesat jauh di peringkat 28 dan Temanggung di peringkat 58. Disisi lain, kemampuan pimpinan daerah mengelola dan menyerap anggaran juga sangat rendah, ditunjukkan dengan tingginya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang pernah mencapai 25 persen dari total APBD atau setara dengan angka lebih dari 300 miliar.

Sementara itu, Kabupaten Kendal juga tidak pernah sepi dari pemberitaan kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang memiliki banyak hal menarik yang cukup unik. Kabupaten Kendal masuk dalam wilayah metropolitan Kedungsepur yang merupakan wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusilo, dan Bandung Raya (Wedhari, 2021).

Kendal juga dikenal sebagai Kota Santri karena terdapat puluhan pondok pesantren terutama di Kecamatan Kaliwungu dan juga dikenal dengan Kota Seni dan Budaya. Kendal kaya dengan kegiatan budaya baik yang bersifat tradisional maupun agamis seperti Syawalan, Tari Rodhat, Sedekah Laut Tanggul Malang, Pesta Laut Tawang dan Pantai Bandengan dan Weh-Wehan. Yang paling terkenal di Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu adalah tradisi syawalan dimulai sepekan setelah usai Idul Fitri. Nuansa keagamaan berbalut kearifan lokal itu dirayakan dengan berziarah ke makam wali, ulama, serta kyai yang berperan menyebarkan Agama Islam di Kabupaten Kendal. Sedangkan tradisi weh-wehan (saling memberi atau berbagi) telah menjadi agenda rutin bagi warga kampung mulai dari kalangan anak kecil, remaja, hingga orang dewasa di Kaliwungu untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Keragaman budaya dan tradisi yang bermunculan di Kendal tidak lain karena latar belakang sejarah yang dulunya berkembang di Kabupaten Kendal.

Jika dilihat dari kuantitasnya, masyarakat Kendal sebagian beragama Islam. Namun jika diamati lebih cermat lagi, di kalangan mereka akan dijumpai dua golongan, yaitu golongan santri dan abangan. Di pihak lain ada golongan yang disebut priyayi. Priyayi ini sering dimasukkan ke dalam golongan abangan. Hal ini dikarenakan mereka masih lekat menggunakan unsur kejawen walaupun sebagian masuk golongan santri. Santri yang dimaksud pada saat itu adalah santri salaf.

Di Kabupaten Kendal golongan abangan jumlahnya cukup banyak. Mereka disebut abangan karena dalam menjalankan agama Islam masih bercampur dengan hal-hal yang berbau tahayul, bid'ah dan khufarat. Mereka juga masih menjalankan kepercayaan kepada nenek moyang. Mereka masih menjalankan ajaran sinkretisme dari kehidupan nenek moyang, yaitu agama Hindu dan Islam terlihat dalam banyak kegiatan. Contohnya adalah upacara

meminta restu kepada danyang dan yang mempunyai kekuatan tertentu dengan harapan agar dapat tercapainya keinginan dari si pemintanya. Adat yang demikian ini terlihat dalam pelaksanaan adat kalang yaitu upacara pemberian bekal kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan cara membakar benda terutama pakaian yang menjadi kesukaan dari orang yang sudah meninggal. Masyarakat Kendal juga masih lekat dengan upacara selamatan yang berkaitan dengan lingkaran hidup seseorang, misalnya kelahiran, perkawinan dan kematian. Mengenai upacara kematian ini, biasanya mengadakan selamatan mulai dari tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, setahun pertama (*mendhak pisan*), setahun kedua (*mendhak pindho*) dan seribu hari.

Dalam masyarakat Kabupaten Kendal yang berada di daerah bagian Selatan (pedalaman) banyak berkembang kesenian yang berbau tradisional seperti kuda lumping yang masih ada kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan lama atau animisme dan dinamisme. Selain itu juga banyak ditemui upacara nyadran atau ziarah dan bersih makan setiap menjelang bulan puasa. Berbeda dengan di daerah bagian Utara (pantai), kebiasaan nyadran dilakukan dengan upacara larung sesaji yang dilakukan di laut sebagai bentuk syukur kepada sang pencipta.

Kondisi seperti itu berlangsung sejak pertama kali agama Islam masuk ke Kabupaten Kendal. pelaksanaan ajaran Islam tidak murni lagi seperti yang ada di Arab Saudi karena sudah bercampur dengan kebudayaan lokal, yaitu kebudayaan yang ada di Jawa khususnya kebudayaan Hindu-Jawa. Kedatangan Muhammadiyah di Kabupaten Kendal berangsur-angsur dapat mengurangi tradisi yang masih bercampur dengan bid'ah, tahayul dan kufarat. Namun kebiasaan-kebiasaan seperti tersebut di atas tidak sepenuhnya hilang bahkan sampai sekarang.

3. Dinamika Politik di Kabupaten Kendal

a. Sejarah Politik Kabupaten Kendal

Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintahan Kendal sudah dimasukkan ke dalam struktur pembagian wilayah administratif Jawa Tengah. Dalam perkembangannya pembagian wilayah administratif tersebut mengalami beberapa perubahan. Sebelum dikeluarkannya *Decentralisatie Belsuit* atau Undang-Undang Otonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang bertujuan untuk mengatur pembagian daerah administratif pemerintahan, daerah Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa *gewesten* (wilayah) yang terdiri dari:

- Semarang *Gewest*, meliputi *Regenschap* (wilayah administratif pemerintah setingkat dengan Kabupaten) Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara dan Grobogan.
- Rembang *Gewest*, meliputi *Regenschap* Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro.
- Kedu *Gewest*, meliputi *Regenschap* Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen dan Karanganyar.
- Banyumas *Gewest*, meliputi *Regenschap* Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga.
- Pekalongan *Gewest*, meliputi *Regenschap* Brebes, Tegal, Pemasang, Pekalongan dan Batang.

Istilah *Regenschap* tersebut digunakan pada masa sebelum tahun 1905. Setelah dikeluarkannya *Decentralisatie Belsuit* tahun 1905 semua *gewesten* memiliki hak otonomi yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya *Indische Staatsregeling* (Undang-Undang Pemerintahan) yang berisikan pembagian wilayah administratif dalam bentuk provinsi yang dijelaskan pada *Province Ordonatie* pasal 19. Berdasarkan *Province Ordonatie* maka pembagian wilayah administratif di Jawa Tengah dibagi dalam bentuk Karesidenan, Kabupaten dan Kawedanan. Sejak saat itu Semarang *Gewest* berubah menjadi Karesidenan Semarang yang memiliki beberapa wilayah administratif antara lain Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan dan *Stadsgemente* (daerah administratif yang otonom atau mandiri dan bercorak perkotaan) Semarang dan Salatiga. Dalam pembagian wilayah administratif tersebut Kendal merupakan wilayah pemerintahan setingkat Kabupaten yang ada dalam Karesidenan Semarang.

Perubahan dalam sistem pemerintahan kembali terjadi pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang tatanan sistem pemerintahan sama seperti sebelumnya, hanya saja terjadi perubahan nama dalam pemerintahan karesidenan. Karesidenan Semarang berubah menjadi *syuu* yang membawahi beberapa *si* (kota praja), kemudian di dalam *si* terdapat beberapa *ken* (kabupaten), *gun* (distrik), *son* (onder distrik) dan *ku* (kelurahan). Kemudian setelah masa pendudukan Jepang sistem pemerintahan dirubah kembali, Kabupaten Kendal pada masa awal kemerdekaan, secara administratif dibagi ke dalam 5 (lima) wilayah Pembantu Bupati atau Kawedanan, yang meliputi 17 wilayah Asisten Wedana atau Kecamatan, terdiri dari 306 Desa.

Dalam perkembangannya, berdasarkan wilayah administratif, Kendal terdiri dari 20 Kecamatan yang kemudian terbagi menjadi 266 Desa dan 20 Kelurahan. Meskipun menurut data pada tahun sebelum kemerdekaan wilayah Kendal hanya terbagi menjadi beberapa wilayah dengan sistem *district* saja. Penjelasan pembagian wilayah dapat dilihat dari kondisi topografinya. Wilayah Kendal bagian selatan atau juga wilayah yang terdiri dari pegunungan meliputi Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan. Dan wilayah Kendal bagian Utara yang bertopografi dataran rendah meliputi Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong dan Kaliwungu.

Mengenai struktur pemerintahan sendiri, Kendal sejak tahun 1615-1949 terjadi 25 kali pergantian bupati. Bupati yang menjabat pada tahun 1900-an sampai berakhirnya perang kemerdekaan tahun 1949, antara lain:

- 1) Soerohadiningrat (1850-1857)
- 2) Pangeran Ario Notoprojo (1857-1890)
- 3) Raden Mas Adipati Notonegoro (1891-1914)
- 4) Raden Mas Adipati Aryo Notohamijoyo (1914-1938)
- 5) Raden Mas Purbonegoro (1939-1942)
- 6) Raden Koesumohoedojo (1942-1945)
- 7) Soekarmo (1945-1948)
- 8) Raden Roeslam (1948-1949)

Pada masa awal kemerdekaan di Kendal terjadi pergantian bupati. Pergantian bupati tersebut tidak dilakukan secara pemilihan namun dilakukan melalui protes pemuda yang dipimpin oleh Soekarmo. Para pemuda dan rakyat yang setuju untuk menggulingkan pemerintahan yang dinilai merugikan rakyat pada masa pendudukan Jepang berkumpul di alun-alun Kendal untuk menggelar rapat. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Bupati Kendal adalah Raden Kusumuhudoyo yang menjabat selama periode pendudukan Jepang dengan pangkat *Kencho*. *Kencho* merupakan jabatan pemerintahan tingkat Kabupaten masa pendudukan Jepang. Kabupaten disebut sebagai *Ken* dan yang menjabat sebagai bupati adalah *Kencho*. Kemudian, kelompok pemuda Kendal yang dipimpin oleh Sukarmo mengadakan rapat di Alun-Alun Kendal tahun 1945. Keputusan rapat tersebut adalah memberhentikan bupati, patih, semua wedono dalam Kabupaten Kendal.

Rapat yang dilakukan di alun-alun tersebut menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

- 1) Memberhentikan Bupati Raden Koesoemohoedojo;
- 2) Menunjuk Soekarmo sebagai Bupati Kendal dan Patihnya adalah Partoikromo;
- 3) Melantik M. Soesatio sebagai Wedono Kendal, Hardiwinoto sebagai Wedono Weleri, Mardihadi sebagai Wedono Boja, Iskandar Martowidagbo sebagai Wedono Sukorejo dan Oepoyo Prawirodologo sebagai Wedono Kaliwungu.

Wedono adalah sebutan untuk kepala pejabat pemerintah setingkat Kecamatan. Keputusan rapat tersebut segera disampaikan oleh Soekarmo dan beberapa perwakilan pemuda kepada Raden Koesoemohoedojo sekaligus dengan penyerahan jabatan. Pertemuan antara Soekarmo dan pemuda dengan Raden Koesoemohoedojo tersebut menghasilkan keputusan yang tidak terduga, yaitu bupati R. Koesoemohoedojo tidak ingin menyerahkan jabatannya. Hal tersebut menimbulkan reaksi perwakilan pemuda yang mendampingi Soekarmo. Akhirnya R. Koesoemohoedojo dan keluarganya diamankan di Pabrik Gula Cepiring untuk menghindari reaksi yang lebih besar dari pemuda. Setelah kejadian tersebut, Soekarmo dan perwakilan pemuda segera melakukan rapat kembali untuk merombak susunan pemerintahan dengan mengganti pejabat-pejabat yang dilantik pada masa pendudukan Jepang.

Perombakan susunan pemerintah tidak sepenuhnya lancar. Seperti halnya dengan pengambilan keputusan pergantian wedono di Sukorejo, Wedono S. Soerjowidagdo merupakan orang yang tidak menyerahkan jabatannya sebagai wedono, karena wedono Sukorejo tersebut dirasa masih layak untuk menjabat. Namun hal tersebut menimbulkan protes dari perwakilan rakyat Sukorejo yang hadir dalam rapat tersebut, mereka memprotes keputusan pemerintah yang baru, hal tersebut dikarenakan wedono S. Soerjowidagdo merupakan wedono yang diangkat oleh Jepang dan dinilai merugikan rakyat selama pemerintahan pendudukan Jepang.

Pada masa pemerintahan Bupati Sukarmo terbentuk badan-badan pemerintah antara lain:

- 1) BPKNI (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia), badan ini bertujuan sebagai wadah wakil-wakil rakyat;
- 2) Markas Umum, markas ini dibentuk dan berkantor di Kawedanan Kaliwungu di bawah pimpinan Mohammad Kasan yang

anggotanya terdiri dari orang-orang terkemuka sipil dan militer. Badan ini bertujuan sebagai pusat komando taktik dan strategi perjuangan menghadapi gangguan keamanan. Dalam perjalanannya Markas Umum kemudian berganti menjadi Dewan Perjuangan Kendal sebagai koordinator badan-badan kelaskaran;

- 3) Setelah Dewan Perjuangan Kendal dirasa telah menyelesaikan tugasnya maka kemudian dibentuklah Inspektorat Biro Perjuangan, badan ini bertujuan sebagai pusat komando keamanan yang memberikan komando kepada kesatuan-kesatuan garis depan.

Sebagai sebuah kabupaten, Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Bupati. Dari rentang waktu mulai dari 1614 sampai dengan 2021 Kabupaten Kendal sudah dipimpin oleh 42 Bupati dan Pj Bupati. Layaknya tugas kepala daerah sebagai pemangku tanggung jawab pemerintahan daerah, Bupati Kendal tentunya akan terfokus pada program-program kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Dalam catatan yang ada di arsip Kabupaten Kendal, nama-nama Bupati Kendal tidak tercatat adanya nama Raden Ronggo Hadimenggolo sampai dengan Hadinegoro III. Dengan demikian, maka sebelum pemerintahan dipindahkan ke Kota Kendal, maka Kaliwungu merupakan induk atau pusat pemerintahan. Sehingga tujuh orang keturunan Panembahan Djoeminah itu adalah Bupati Kaliwungu. Berikut di bawah ini para Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Kendal antara lain:

- Tumenggung Bahurekso (28 Juli 1605 – 26 Agustus 1628)
- Raden Ngabehi Wiroseco (1629 – 1641)
- Raden Ngabehi Mertoyudo (1641 – 1649)
- Raden Ngabehi Wongsodiprojo (1649 – 1650)
- Raden Ngabehi Wongsowiprojo (1650 – 1661)
- Raden Ngabehi Wongsowirosroyo (1661 – 1663)
- Tumenggung Singowijoyo I atau Singowonggo (1663 – 1668)
- Tumenggung Mertowijoyo I (1688 – 1700)
- Tumenggung Mertowijoyo II (1700 – 1725)
- Tumenggung Mertowijoyo III (1725 – 1739)
- Tumenggung Singowijoyo II (1739 – 1754)
- Tumenggung Soemonegoro I (1755 – 1780)
- Tumenggung Soemonegoro II (1780 – 1785)
- Tumenggung Soerohadinegoro II (1780 – 1785)
- Raden Tumenggung Prawirodiningrat I (1896 – 1811)

- Raden Tumenggung Prawirodiningrat II (1813 – 1830)
- Raden Tumenggung Purdadiningrat atau Prododiningrat (1831 – 1850)
- KRT. Soerohadiningrat atau Sosrohadiningrat (1850 – 1857)
- Pangeran Ario Notoproto atau Notohamiprojo (1857 – 1890)
- Raden Mas Adipati Notonegoro (1891 – 1914)
- Raden Mas Adipati Aryo Notohamijoyo (1914 – 1938)
- Raden Mas Purbonegoro atau Poerboatmojo Adisoerjo (1939 – 1942)
- Patih Kendal, Raden Koesumohoedojo (1942 – 1945)
- Soekarmo (1945 – 1949)
- Raden Roeslan (1949 – 1950)
- Raden Prajitno Partididjojo (1950 – 1959)
- Raden Soedjono (1957 – 1960)
- Raden Salatoen (1960 – 1965)
- Mayor R. Sunardi (1965 – 1967)
- Letkol RM Soeryosuseno (1967 – 1972)
- Drs. H. Abdussaleh Ranawijaya (1972 – 1979)
- Drs. H. Herman Soemarmo (1979 – 1984)
- H. Soedono Jusuf, BA (21 Maret 1984 – 21 Maret 1989)
- Drs. Soemojo Hadiwinoto, SH (21 Maret 1989 – 21 April 1999)
- Drs. H. Djoemadi (21 April 1999 – 2000)
- H. Hendy Boedoro, SH, M.Si (2000-2005)
- Drs. Suwanto Nasucha, M.Si Pj Bupati Kendal (13 Juni 2005 – 22 Agustus 2005)
- H. Hendy Boedoro, SH, M.Si (22 Agustus 2005 – 22 Desember 2008)
- Dra. Hj. Siti Nurmakesi (22 Juli 2009 – 23 Agustus 2010)
- dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM (23 Agustus 2010 – 23 Agustus 2015)
- Drs. Kunto Nugroho, HP, M.Si Pj Bupati Kendal (1 September 2015 – 17 Februari 2016)
- dr. Mirna Annisa, M.Si (17 Februari 2016 – 17 Februari 2021)
- Dico Mahtado Ganinduto (26 Februari 2021- Sekarang)

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kendal

b. Kondisi Politik di Kabupaten Kendal Tahun 2019-2020

Dalam bidang politik, kepentingan seorang komunikator politik dan timnya melakukan analisis situasi adalah mengerti dan memahami

situasi politik di masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam melakukan berbagai strategi komunikasi politik. Situasi politik dapat dilihat dari hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019.

Pileg 2019 akan menentukan jumlah kursi setiap partai di DPRD Kabupaten Kendal yang berdampak pada koalisi antar partai dalam mengajukan bakal calon yang diusung pada Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020. Untuk wilayah Dapil Kendal 1 (Kecamatan Kendal, Patebon, Pegandon, Ngampel), suara terbanyak diraih oleh PKB sebesar 26,6%, disusul PDIP sebesar 20%, di posisi ketiga diraih Partai Golkar sebesar 10,2%, dan Gerindra di posisi keempat dengan 7,9%.

Untuk wilayah Dapil Kendal 2 (Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kaliwungu Selatan), dimenangkan PDIP sebesar 20,5%, disusul PPP sebesar 16,9%, PKB di tempat ketiga dengan 15,3%, Golkar sebesar 13,4% di posisi keempat dan Demokrat di posisi kelima dengan perolehan suara sebesar 6,9%. Hal ini cukup mengejutkan, PDIP dan PPP mampu mengungguli PKB, padahal basis agama yang ditunjukkan dengan pengaruh kyai kharismatik seperti KH Dimiyati Rois. Selisih suara cukup besar antara PKB dengan PDIP yakni sebanyak 5,2% akan tetapi selisih dengan PPP relatif kecil yakni sebanyak 1,6% saja.

Untuk wilayah Dapil Kendal 3, Partai Nasdem mampu memperoleh suara terbanyak sebesar 22,1% mengungguli PDIP yang memperoleh suara 21%. Hasil tersebut dirasa cukup mengejutkan meskipun selisih relatif kecil, karena jika mengingat hasil perolehan suara Pemilu Legislatif tahun 2014 yang dimana PDIP menempati urutan pertama dan unggul dalam perolehan suara di Dapil 3 (Kecamatan Singorojo, Limbangan, Boja). Bagi PDIP, Kecamatan Boja-Limbangan-Singorojo adalah basis loyal PDIP serta berdekatan dengan kediaman keluarga besar Hendy Boedoro (Bupati Kendal tahun 2000-2008), Murdoko (Ketua DPRD Jawa Tengah onaktif tahun 2009-2014) dan Don Murdono (mantan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013). Ketiga tokoh politik tersebut adalah salah satu kader senior PDIP yang memiliki masa loyal, terutama di sekitar lingkungan rumah keluarga di Cangkiran Kota Semarang. Posisi ketiga diraih oleh Gerindra dengan suara sebesar 9,7%, PPP diposisi keempat dengan perolehan suara sebesar 9,3% dan disusul PKB di posisi kelima dengan suara 8,3%.

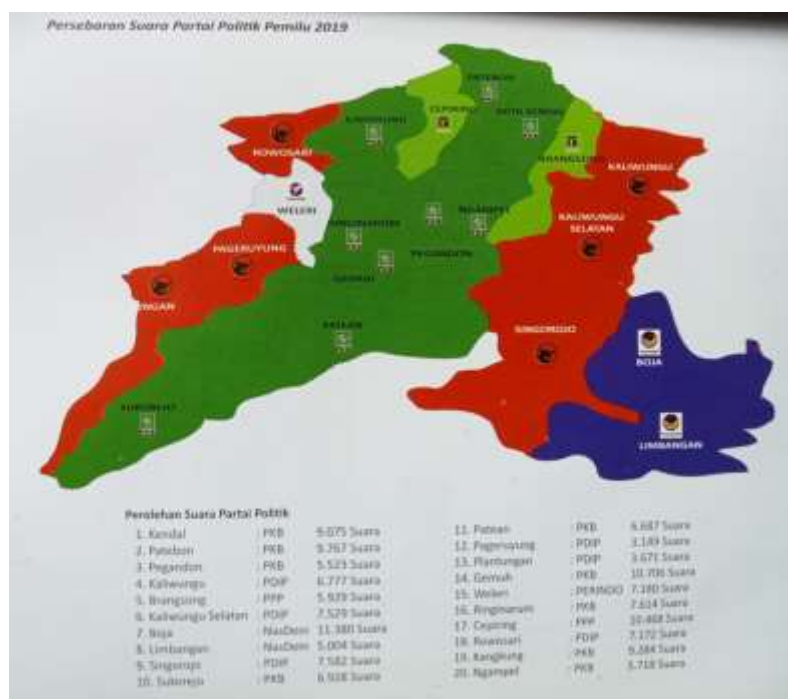
Dapil Kendal 4 yang meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo dan Patean dimenangkan oleh PKB dengan perolehan suara

sebesar 18,5%, disusul oleh PDIP sebesar 17,4% dan Golkar di posisi ketiga dengan 14%, Gerindra di posisi keempat dengan 11,6% serta PAN diposisi kelima dengan suara sebesar 9,4%. Di tahun 2014, Dapil 3 dan 4 merupakan basis PDIP. Akan tetapi, dalam Pileg 2019 basis PDIP di dua Dapil tersebut sepertinya sudah berkurang karena dapat dilihat bahwa PDIP selalu menempati posisi kedua.

Dapil Kendal 5 yang meliputi Kecamatan Gemuh, Weleri, Ringinarum menunjukkan bahwa PKB menang telak dengan perolehan suara sebesar 28,4%. Padahal, Kecamatan Weleri adalah salah satu basis PAN dan Muhammadiyah di Kabupaten Kendal. banyak tokoh PAN yang berdomisili di wilayah ini. Peringkat kedua dipegang oleh PDIP dengan suara sebesar 17,5%, disusul PAN dengan perolehan suara 13%.

Dapil Kendal 6 meliputi Kecamatan Cepiring, Rowosari, dan Kangkung. Seperti di tiga dapil lainnya yaitu Dapil 1, 4, dan 5, PKB juga memperoleh suara terbanyak sebesar 23,5%, disusul oleh PDIP sebesar 18%, PPP di posisi ketiga dengan 16,1%, Golkar di posisi keempat sebesar 14% dan PAN sebagai partai lima besar terakhir dengan 12,4%.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat partai yang mendominasi masing-masing wilayah di Kabupaten Kendal. PKB telah mendominasi di empat Dapil sekaligus. Pesebaran suara PKB pada Pemilu tahun 2019 mendominasi di 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo, Patean, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Kangkung, Patebon, dan Kendal. sedangkan di posisi kedua ditempati PDIP dengan pesebaran suara di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Limbangan, Pageruyung, Rowosari, Singorojo, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan. Disusul Partai Nasdem di wilayah Kecamatan Limbangan dan Boja, dan terakhir Partai Perindo di wilayah Kecamatan Weleri.



Gambar 4. 1 Pesebaran Suara Partai Politik Pemilu 2019

PKB mampu memperoleh kemenangan di pemilihan legislatif Kabupaten Kendal usai serangkaian pemilihan umum serentak yang diadakan di seluruh Indonesia. Pemilihan serentak untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kendal menghasilkan 45 nama yang akan menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Merujuk pada data Komisi Pemilihan Umum tahun 2019 ditetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kendal. adapun rincian hasil pemilihan legislatif Kabupaten Kendal untuk periode masa jabatan 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Kendal Periode Pemilihan Legislatif 2019-2024

PARTAI	KURSI
PKB	10
PDIP	10
Gerindra	6
PPP	5
PAN	3
Demokrat	3
Golkar	3
PKS	2
Nasdem	2
Perindo	1
JUMLAH	45 Kursi

Sumber: KPU Kabupaten Kendal

Setelah dilakukan pelantikan terhadap 45 nama anggota DPRD Kabupaten Kendal, selanjutnya DPRD Kabupaten Kendal menetapkan komposisi pimpinan definitif DPRD untuk masa periode 2019-2024 melalui rapat paripurna. PKB sebagai partai pemenang dengan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2019 dengan perolehan kursi sebanyak 10 kursi memilih Muhammad Makmun untuk menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Kendal untuk periode 2019-2024. Selain menunjuk ketua DPRD Kabupaten Kendal, dalam rapat paripurna ini juga terpilih Akhmat Suyuti yang ditunjuk dari PDIP sebagai Wakil Ketua I, Ainurrochim dari Gerindra sebagai Wakil Ketua II dan Maberur dari PPP sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Kendal periode 2019-2024.

Kondisi politik di Kabupaten Kendal berbeda dengan kontelasi politik nasional. Jika di ranah politik nasional terdapat dua koalisi yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS, dan PBB. Sedangkan di Kabupaten Kendal, anggota legislatif terpecah menjadi tiga kubu yakni Koalisi DIBAS yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Kemudian Koalisi NURANI yang terdiri dari Fraksi PKB, Gerindra, dan Nasdem. Yang terakhir Koalisi TIM hanya berisi Fraksi PDIP dan PPP. Secara keseluruhan, Koalisi DIBAS memiliki 12 kursi, Koalisi NURANI memiliki 18 kursi, dan Koalisi TIM dengan 15 kursi.

B. Pemahaman Tentang Lawan Politik dalam Pilkada

1. Pasangan Ali Nurudin dan Yekti Handayani

Ali Nurudin lahir di Kendal, 23 Juni 1966. Ali Nurudin adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia pesantren. Dari aspek pendidikan, Ali Nurudin memiliki gelar S2 (M.Si) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang tahun 2015-2017.

Ali Nurudin memiliki latar belakang organisasi yang cukup banyak, antara lain Nahdlatul Ulama Ranting Kutoharjo sebagai Rois Syuriah tahun 2006-2011, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kaliwungu sebagai Wakil Rois Syuriah tahun 2010-2015, Penasihat Srikandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah tahun 2015-sekarang, Ketua Pembina Yayasan Yatim Piatu Al-Ikhlash Kaliwungu sebagai pengasuh tahun 2000-sekarang, Pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur Kaliwungu tahun 2000-sekarang, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kendal tahun 2018-2023 dan Ketua Paguyuban Sokolima Kabupaten Kendal tahun 2018-2023.

Pada Pilkada tahun 2020 Ali Nurudin berpasangan dengan Yekti Handayani. Pasangan ini didukung oleh koalisi PKB, Gerindra, dan Nasdem yang memiliki 18 kursi di DPRD Kabupaten Kendal. Yekti Handayani dikenal publik sebagai pengusaha dan menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdikan diri di pelosok Kabupaten Kendal. Nurani satu-satunya perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020. Munculnya Yekti Handayani di Pilkada Kendal 2020 cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, calon wakil bupati Kendal itu belum familiar di telinga masyarakat Kendal. Meskipun Yekti Handayani tidak mempunyai pengalaman dalam dunia politik, dengan dibekali dukungan dari berbagai elemen masyarakat, baik kalangan tokoh agama, ormas, profesi dan lain sebagainya, Yekti Handayani mantap maju sebagai calon wakil bupati Kendal mendampingi Ali Nurudin.

Keduanya yakin akan dipilih oleh masyarakat Kendal. Keyakinan tersebut didasari oleh asal kedua pasangan calon Ali Nurudin – Yekti Handayani yang merupakan putra daerah. Penggunaan putra daerah dalam kampanye sebagai politik identitas dianggap sebagai bentuk kearifan lokal. Penggunaan putra daerah sebagai *brand* politik pasangan Nurani adalah sah dan tidak menyalahi aturan.

Mengutip dari *TribunJateng.com*, Iqbal Wibisono selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jateng dan DIY DPP Partai Golkar menanggapi isu putra daerah yang seringkali dipergunakan untuk menekan lawan politiknya yang berasal dari luar daerah tersebut bahwa domisili calon dianggap tidak penting, sepanjang pemimpin yang berasal dari luar daerah tersebut memiliki kemampuan dan membawa daerah yang akan dipimpin bisa menjadi lebih baik.

“Domisili pasangan calon tidak penting, asalkan mempunyai tekad untuk membangun Kendal lebih bagus. Contohnya Jokowi yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan berhasil terpilih. Semuanya sudah ada perhitungan dan strateginya sendiri,” (pernyataan Iqbal Wibisono, dikutip *TribunJateng.com*).

Isu putra daerah menjadi salah satu nilai jual yang selalu didengungkan oleh sebagian marketing politik pihak lawan yang dianggap rival terberat dengan tujuan agar masyarakat tidak memilihnya. Hal ini jelas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja merupakan hak partai politik yang bersangkutan untuk mengusung kandidat yang memiliki kapabilitas dan nilai jual tinggi. Tardi menjelaskan

dalam wawancara bahwa soal putra daerah atau bukan putra daerah adalah perkara sekunder belaka. Sementara yang lebih primer adalah kelayakan kepemimpinan sang kandidat.

Ali-Yekti menyorot lima program unggulan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu: *Pertama*, bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. *Kedua*, tata kelola birokrasi dan penguatan pemerintah desa. *Ketiga*, bidang perekonomian rakyat. *Keempat*, bidang kebudayaan, kepemudaan dan kemasyarakatan. Dan *kelima*, bidang infrastruktur, tata ruang, pengelolaan Sumber Daya Alam dan perlindungan lingkungan hidup. Kelima program tersebut diyakini dapat menyorot semua aspek yang dibutuhkan masyarakat Kendal. Pesantren, petani, guru, UMKM, industri, pemuda, pembangunan desa, pelestarian lingkungan dan semua potensi yang ada di Kendal.

2. Pasangan Tino Indra Wardono dan Mukh. Mustamsikin

Tino lahir di Gresik, 26 April 1983. Berbeda dengan dua calon lainnya yang memiliki riwayat pendidikan sampai ke jenjang universitas, Tino merupakan calon Bupati yang hanya mengenyam pendidikan sampai SLTA. Akan tetapi, pengalaman organisasi Tino sangatlah banyak khususnya pengalaman organisasi kepemudaan. Dalam Pilkada tahun 2020, Tino yang mencalonkan diri sebagai Bupati Kendal berpasangan dengan Mukh. Mustamsikin yang dikenal sebagai tokoh ulama Kendal yang berpengalaman dalam pemerintahan. Pria kelahiran Kendal, 6 Agustus 1965 pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kendal periode 2010-2015.

Pria asal Kaliwungu ini saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Ukhuwah Silaturahmi Pendidikan Al Qur'an (FUSPAQ) Kabupaten Kendal. selain itu, Mustamsikin juga aktif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kendal dan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kendal. Ulama jebolan Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur memulai karirnya sebagai guru ngaji. Mustamsikin adalah pemilik agen perjalanan Kubah Tour & Travel. Dirinya diusung PDIP yang berkoalisi dengan PPP untuk mendampingi Calon Bupati Kendal Tino Indra Wardono dalam Pilbup Kendal 2020.

Latar belakang organisasi beliau antara lain Jamiyah Syar'iyah PP Lirboyo Kediri sebagai Ketua tahun 1986-1987, Jamiyah Pusat Remas Batu PP Lirboyo sebagai Ketua tahun 1987-1988, KESIS Pusat Jawa Timur sebagai Ketua tahun 1986-1989, Pondok Pesantren Lirboyo sebagai Sekretaris

tahun 1987-1988, PAC GP Ansor Kaliwungu sebagai Ketua tahun 1992-1995, MWC NU Kecamatan Kaliwungu sebagai Ketua tahun 2003-2008, PC NU Kabupaten Kendal sebagai Ketua I tahun 2007-2012, MUI Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris tahun 2012-2017, Yayasan Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu sebagai Sekretaris tahun 2005-2010, JATMAN Syubiyah Kabupaten Kendal sebagai Mudir tahun 2017-2022, FUSPAQ Kabupaten Kendal sebagai Ketua tahun 2003-2023, F-KBIH Kabupaten Kendal sebagai Ketua tahun 2019-2024, KBIH AROFAH Kaliwungu sebagai Ketua tahun 2019-2024, BWI Kabupaten Kendal sebagai Ketua tahun 2016-2021, dan HIMASAL Jawa Tengah sebagai Ketua I tahun 2019-2024.

Dengan kolaborasi keduanya, diharapkan mampu membawa perubahan positif Kabupaten Kendal yang lebih baik. Keduanya dipandang sebagai pemimpin Kabupaten Kendal yang ideal, yaitu pengusaha-kyai, nasionalis-religius dan muda-berpengalaman.

Pasangan Tino-Mustamsikin memiliki program-program unggulan yang ditawarkan kepada calon pemilih, yaitu: *Pertama*, Kendal wirausaha (PROKAWIRA). *Kedua*, Kendal Pintar dan Berbudaya (PROKARYA). *Ketiga*, Kendal sehat (PROKES). *Keempat*, Kendal Kerja (PROKERJA). *Kelima*, Bantuan Hukum Masyarakat Kendal (PROBAKUM). Dan *keenam*, Tim Tanggap Bencana Kendal (PROTAGANA).

Setelah memahami kondisi sosial masyarakat dan dinamika politik di Kabupaten Kendal, tim pemenangan Dico-Basuki mulai melakukan strategi pemetaan wilayah. Tim pemenangan melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang diprediksi akan memberikan dukungan suara yang signifikan bagi Dico-Basuki. Mesin politik yang terbagi menjadi empat sektor mulai dari tim pemenangan pusat hingga tim RT mulai melakukan kinerjanya untuk melakukan pemetaan wilayah. Menurut wawancara terhadap Khusnul, pemetaan wilayah ini sudah dilakukan sejak awal 2020 dengan menerjunkan tim-tim RT ke warga masyarakat. Hal ini dilakukan agar mengetahui wilayah mana yang berpotensi besar sebagai lumbung suara Dico-Basuki di dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal 2020 ini. Para tim pemenangan Dico-Basuki juga mulai merencanakan strategi yang dilakukan untuk menghitung jumlah suara yang mereka butuhkan sebagai target kemenangan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat menggunakan kemenangan. Tim pemenangan ini selanjutnya akan memetakan wilayah sebagai identifikasi geografis di mana potensi wilayah dengan potensi suara dukungan akan mereka peroleh. Pemetaan wilayah ini disesuaikan dengan pembagian administratif yang ada guna melakukan identifikasi mengenai

potensi kekuatan atau kelemahan calon kandidat di wilayah tersebut (Aspinall dan Barends, dalam Adliima, 2021).

Dengan adanya pemahaman kondisi sosial masyarakat dan dinamika politik di Kabupaten, tim pemenangan Dico-Basuki melakukan pemetaan terhadap potensi wilayah dan juga melihat target kondisi struktural masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat potensi dari segmentasi yang ada. Segmentasi dibutuhkan sebagai aktivitas untuk mengidentifikasi, mendeteksi, mengevaluasi dan memilih kelompok yang memiliki karakteristik sehingga memungkinkan untuk mendesain sebuah strategi yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Segmentasi diperlukan untuk memudahkan calon kandidat atau tim pemenangan dalam menganalisis perilaku masyarakat, kemudian akan memberikan kemudahan dalam menyusun program kerja, terutama cara berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat.

Proses segmentasi diterapkan dan dilaksanakan oleh tim pemenangan Dico-Basuki sebagai upaya memenangkan Dico-Basuki dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2020. Dengan melihat segmentasi, calon kandidat dapat lebih memahami kelompok-kelompok masyarakat sebagai target untuk dapat melakukan mobilisasi suara di suatu wilayah tersebut. Dengan melihat segmentasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, tim pemenangan akan mampu mengetahui segmentasi apa yang ada dan kelompok masyarakat mana yang dibidik di tiap-tiap wilayah Kabupaten Kendal. Dengan demikian Dico dan tim pemenangannya akan mampu merumuskan produk politik apa yang akan dipasarkan pada saat kampanye berlangsung.

Secara geografis wilayah Kabupaten Kendal dapat dipilah menjadi dua wilayah pemilihan yaitu wilayah Utara dan wilayah Selatan. Kecamatan yang berada di Utara adalah Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, Gemuh, Weleri, Cepiring, Patebon, Kendal, Rowosari, Kangkung, Ringinarum dan Ngampel. Daerah Kendal bagian Utara identik dengan wilayah pesisir dan perkotaan. Isu-isu utama yang berada di Kenda bagian utara adalah penanggulangan bencana banjir rob, infrastruktur dan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal.

Di wilayah Kendal bagian utara, tim pemenangan memiliki segmentasi dan target masyarakat yang berbeda. Menurut hasil pemetaan wilayah yang dilakukan oleh tim pemenangan Dico-Basuki, di wilayah Kendal bagian utara, kebutuhan masyarakat atas penanganan bencana banjir rob masih menjadi isu utama. Seperti yang diketahui bahwa wilayah Kendal bagian utara merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Naiknya permukaan air laut menyebabkan

bencana banjir rob. Akibat adanya bencana banjir rob ini pada akhirnya mengganggu mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh warga masyarakat di wilayah Kendal bagian utara adalah mengenai permasalahan infrastruktur khususnya jalan Pantura Kendal. Jalur Pantura Kendal merupakan urat nadi transportasi dan logistik utama dan merupakan jalan nasional. Kondisi jalan diperparah dengan intensitas curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan adanya genangan dan akhirnya berdampak mengelupasnya aspal jalan di jalan tersebut. Daya rekat aspal akan berkurang ketika terkena air, ditambah lagi dengan frekuensi dan beban kendaraan tonase tinggi dari kendaraan berat yang melintas di Jalur Pantura akan cepat menimbulkan kerusakan.

Selain itu, keberadaan Kawasan Industri Kendal (sekarang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus) juga menjadi isu utama yang diangkat di wilayah Kendal bagian utara ini. Karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah menjadi agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Sedangkan wilayah Selatan yang diidentikkan dengan wilayah pegunungan/perbukitan yang meliputi Kecamatan Plantungan, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja dan Kecamatan Kaliwungu Selatan. Isu-isu utama yang berada di Kendal bagian selatan adalah hasil perkebunan/pertanian dan optimalisasi wisata alam.

“Penekanannya ketika kampanye nanti tentu akan berbeda. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah bagian utara (pesisir dan perkotaan) dan dengan masyarakat yang tinggal di daerah bagian selatan (pegunungan) tentunya akan ditawarkan produk yang berbeda. Misalnya di daerah Kaliwungu yang masuk dalam wilayah bagian utara yang daerahnya dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), nanti yang akan ditekankan di daerah Kaliwungu adalah tentang industri dan penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran. Lain lagi di daerah Bandengan yang sering terjadi bencana banjir rob, nanti juga yang akan ditekankan masalah penataan lingkungan dan solusi dari bencana banjir rob tadi. Sedangkan di daerah Limbangan, yang masuk wilayah Kendal bagian selatan biasanya wisata alamnya yang paling disenangi, sehingga penekanannya nanti terkait pengelolaan pariwisata,” (wawancara Tardi, 17 Mei 2021).

Setelah melakukan upaya untuk mengidentifikasi serta memetakan struktur sesuai dengan karakteristik masyarakat melalui strategi segmentasi dan targeting politik, pada tahap selanjutnya tim kampanye akan melakukan strategi selanjutnya

yaitu positioning politik (Firmanzah, dalam Adliima, 2020:133). Positioning politik merupakan aktifitas yang dilakukan untuk memberikan gambaran kepada para konstituen agar konstituen mampu membedakan produk yang dihasilkan dari organisasi politik yang bersangkutan. Positioning politik merupakan upaya yang dilakukan oleh calon kandidat ataupun tim pemenangan suatu kandidat untuk menciptakan sebuah *image* yang mencirikan sebuah produk politik yang diproduksinya sesuai dengan segmentasi dari masyarakat. Hal ini menjadi lazim digunakan dalam kontestasi Pilkada oleh seorang calon kandidat ataupun tim sukses dengan tujuan masyarakat mampu membedakan citra yang ditampilkan antara calon kandidat satu dengan calon kandidat lainnya melalui *image*, produk, pesan serta program kerja yang dimunculkan (lihat Adliima, 2021:133).

Setelah berhasil memetakan potensi wilayah dan juga melihat segmentasi yang ada, tim pemenangan Dico melakukan koordinasi untuk merencanakan strategi *positioning* dalam rangka menciptakan produk-produk politik yang akan dijadikan sebagai sebuah “*barang dagangan*” di dalam melakukan kampanye kepada masyarakat. Tim sukses membangun strategi untuk mengkombinasi *image* keduanya dalam bentuk program kerja dan strategi kampanye pasangan Dico-Basuki. Pemetaan lawan politik dengan memahami profil, rekam jejak, dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat tentunya akan menjadi modal bagi kandidat maupun tim pemenangan dalam merencanakan strategi komunikasi.

Pasangan Ali dan Yekti yang diusung oleh PKB, Gerindra, dan Partai Nasdem ini merupakan pasangan calon yang mengusung *image* sebagai pasangan yang merepresentasi dari tokoh pesantren dan putra daerah. Ali Nurudin memiliki latar belakang santri dan kultur NU, dipasangkan dengan Yekti Handayani yang memiliki latar belakang pengusaha dan guru honorer di pelosok Kabupaten Kendal merupakan kombinasi dengan kekuatan yang cukup besar. *Tagline* putra daerah dan mendapatkan dukungan dari para kyai dan ulama di Kendal menambah kesan bahwa kekuatan yang dimiliki pasangan ini sangatlah besar dan diyakini dapat memobilisasi suara pemilih.

Pasangan lain yaitu Tino Indra Wardono dan Mukh. Mustamsikin yang diusung oleh PDIP dan PPP. PDIP memiliki basis yang cukup besar di Kabupaten Kendal, mengingat PDIP memperoleh suara terbanyak kedua setelah PKB dalam pemilihan legislatif 2019. Pengalamannya dalam organisasi kepemudaan menjadikan modal yang cukup besar untuk mendulang suara pemilih muda. Tino dipasangkan dengan Mustamsikin, warga asli Kendal yang sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Mustamsikin pernah menjabat sebagai wakil bupati Kendal periode

2010-2015, waktu itu beliau berpasangan dengan Widya Kandi Susanti. Pasangan Tino-Mustamsikin mengusung *image* sebagai pasangan nasionalis dan religius.

Yang menjadi pekerjaan rumah bagi Dico M Ganinduto adalah identitasnya yang bukan masyarakat asli Kendal. Setidaknya, menjadi putra daerah merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kepercayaan pemilih dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Kendal 2020. Faktor identitas ini patut diwaspadai, karena Dico M Ganinduto dipersepsikan tidak bisa membangun Kabupaten Kendal karena tidak mengerti situasi di Kabupaten Kendal. Hal semacam ini dicontohkan Joko Widodo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diserang melalui sisi primordial karena bukan warga DKI Jakarta. Tim pemenangan membentuk *image* politik pasangan Dico-Basuki sebagai langkah awal mengenalkan sosok kandidat dalam benak pemilih. Pembentukan *image* politik diperkuat dengan karakter Dico M Ganinduto sebagai sosok pemuda yang cerdas, aktif, dan inovatif dengan banyak pengalaman serta prestasi yang dimilikinya, serta pengalaman dan prestasi yang dimiliki Windu Suko Basuki. Pemetaan lawan politik diindikasikan dapat memudahkan Dico-Basuki dan tim pemenangannya merencanakan strategi komunikasi seperti apa yang akan dilakukan dan menyusun program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

BAB V

EKSPRESI STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM TINDAKAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa tindakan yang dilakukan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki untuk mendapatkan kepercayaan dan meraih suara dari masyarakat pada kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020. Tidak hanya tindakan, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya finansial dan sumber daya manusia sebagai mesin politik yang dibangun sebagai salah satu faktor kekuatan Dico-Basuki dalam meraih suara.

A. Ekspresi Strategi Komunikasi Politik Dico-Basuki

Di dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kendal pada tahun 2020, pasangan Dico-Basuki berusaha merebut hati para pemilih melalui berbagai strategi komunikasi yang diterapkan. Strategi komunikasi ini telah dilakukan oleh Dico M Ganinduto, akrab disapa Dico, jauh-jauh hari sebelum pemilihan dilakukan. Dico telah aktif mendatangi atau menyambangi masyarakat hingga ke pelosok-pelosok. Dico berusaha membangun ketokohnya sendiri sebagai calon pemimpin yang peduli terhadap kebutuhan warga masyarakat. Kekalahan Dico-Basuki dalam pemilihan legislatif 2019 membuat Dico-Basuki melakukan refleksi untuk berbenah dan memperbaiki diri.

Dico dan tim sukses menyadari, bahwa dalam pemilihan calon pemimpin atau kepala daerah, yang akan sangat dilihat adalah kualitas figur atau ketokohan Dico itu sendiri. Sejauh mana Dico bisa diterima baik dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, berbagai strategi komunikasi untuk membangun ketokohan Dico di masyarakat Kendal. Ketokohan sendiri di dalamnya ada faktor kredibilitas calon pemimpin, yaitu pemimpin yang benar-benar dipercaya masyarakat untuk membawa pada kesejahteraan dan keadilan. Bukan sekedar pencitraan tanpa realita.

Konsep tindakan strategi komunikasi yang dilakukan pasangan Dico-Basuki, antara lain membangun kedekatan emosional dengan masyarakat di semua level, membidik pemilih potensial berbasis kedaerahan (geografis), menggalang dukungan semua kalangan baik secara ketokohan maupun kelembagaan, dan membuat program atau kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Dari semua strategi komunikasi yang dilakukan oleh pasangan Dico-Basuki, muaranya adalah membangun ketokohan atau calon pemimpin yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Dico menyadari bahwa pencalonan kali ini cukup berat, karena didukung oleh lima partai yang tidak terlalu dominan meraih suara

di Kabupaten Kendal, yaitu Golkar, Demokrat, PAN, PKS dan Perindo. Sementara calon-calon lain didukung oleh partai-partai besar yang mendominasi selama pemilihan legislatif 2019, termasuk pasangan calon Ali-Yekti yang notabene putra daerah yang diusung oleh PKB dan beberapa partai pendukung, serta pasangan calon Tino-Mustamsikin yang diusung oleh PDIP dan PPP. Meskipun dukungan di parlemen sedikit dibandingkan dua pasangan calon lain, banyaknya partai tentunya dapat memudahkan jaringan kemenangan yang dimiliki oleh partai-partai politik pendukung sampai ke akar rumput.

Strategi yang dimainkan Dico adalah menjual ketokohan dan program, bukan baju atau atribut partai. Dico hanya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa partai boleh berbeda, tetapi dalam mencari pemimpin harus benar-benar orang yang bisa dipercaya untuk membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Dico berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih, dan menjadi pemimpin yang bisa membawa perubahan. Maka, Dico berusaha menampilkan sosok pemimpin yang memiliki kompetensi, kepercayaan, dinamis, dan mampu mengarahkan semua elemen untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang diinginkan yaitu Kendal handal unggul, makmur, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pada uraian selanjutnya akan dipaparkan mengenai tindakan strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh pasangan Dico-Basuki dalam rangka menguatkan ketokohan pasangan, untuk benar-benar bisa dipercaya masyarakat, yang pada akhirnya adalah memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kendal tahun 2020.

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan tentang perencanaan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Dico-Basuki untuk meraih kemenangan dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2020. Selanjutnya pada bagian ini akan diketengahkan tentang tindakan strategi komunikasi politik yang dilakukan Dico-Basuki bersama tim suksesnya.

Sebagaimana diketahui dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat Kendal dalam Pilkada 2020, pasangan Dico-Basuki memiliki visi “Kendal Handal: Unggul, Makmur, Berkeadilan”. Kemudian istilah-istilah yang muncul dalam visi tersebut dijabarkan oleh pasangan ini. Kendal handal adalah adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Unggul dimaksudkan pemerintah berkewajiban mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berdaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.

Makmur dimaksudkan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (*start up*, UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal. Berkeadilan adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasis wilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal dengan ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Masih dalam upaya untuk membangun kepercayaan publik, pasangan Dico-Basuki mengemban misi yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipais masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”. Misi ini dimaksudkan untuk membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas serta dedikasi tinggi untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Kendal yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparatur pemerintahan yang profesional dan memanfaatkan sistem modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasangan ini, bahwa demokratis, transparan dan akuntabel memiliki arti untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih memiliki konekuensi perlu pelibatan segenap elemen masyarakat, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dengan menyediakan ruang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah harus peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan pelaksanaan yang terbuka dan transparan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem perencanaan pembangunan komprehensif, terpadu, efektif, yang didukung sistem pemerintahan yang inovatif dan kreatif.

Kemudian hal-hal yang bisa secara langsung mempengaruhi kepercayaan publik adalah dengan program pembangunan infrastruktur yang masif di segala lini, termasuk daerah-daerah pelosok. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan. Pasangan Dico-Basuki berusaha mewujudkan Kabupaten Kendal yang nyaman melalui perencanaan tata ruang yang baik, ketersediaan sarana dan prasarana publik, baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik seperti prasarana jalan, jembatan, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan pelayanan dasar di area-area wisata dan lain-lain. peningkatan ketersediaan

infrastruktur akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Selain itu, pasangan Dico-Basuki memiliki program membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pariwisata, pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal. Pasangan ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Maka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan kerja, menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif mengembangkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing berkelanjutan.

Pasangan Dico-Basuki berusaha mempengaruhi persepsi publik dengan rumusan-rumusan visi, misi, dan program yang konkret dan operasional. Salah satunya misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah. Misi ini merupakan upaya serius dalam meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi generasi yang produktif dan kompetitif, yang bukan hanya memiliki intelektualitas tinggi, akan tetapi juga memiliki kekuatan moral dan akhlak yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Menurut pasangan ini, bahwa masyarakat Kendal yang sehat, cerdas dan berbudaya dapat diukur dengan peningkatan ketahanan keluarga dan menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingginya peran masyarakat terutama usia produktif dalam pembangunan, meningkatnya prestasi di segala bidang, dan terpeliharanya seni dan warisan budaya. Sedangkan dalam bidang pendidikan formal dan informal, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, yang didukung pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama.

Di dalam bisang kesehatan, capaian pembangunan dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara kontinyu/terus menerus, dengan pendekatan layanan kesehatan secara terpadu dan integral dimulai dari usia dini sampai usia lanjut, baik pada layanan kesehatan secara umum sampai pada layanan kesehatan secara khusus. Dilaksanakan dengan mengedepankan rasa

kemanusiaan, mengacu pada perkembangan kebutuhan masyarakat, didukung peralatan memadai dan melibatkan tenaga profesional di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, pada uraian selanjutnya akan dipaparkan mengenai program-program strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh pasangan Dico-Basuki, dalam rangka menguatkan ketokohan. Dengan menguatnya ketokohan atau figur pasangan, diharapkan kepercayaan masyarakat juga akan tinggi dan pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan Dico-Basuki.

1. Membangun Kedekatan Emosional

Dalam meraih kemenangan di Pilkada Kabupaten Kendal 2020, Dico-Basuki sebagai salah satu kandidat yang maju dalam kontestasi tersebut tentu memiliki dan menerapkan strategi komunikasi politik secara spesifik. Dico-Basuki merupakan calon kandidat yang berasal dari luar daerah. Keduanya sama-sama bukan warga asli Kendal. Dico yang berasal dari Jakarta berpasangan dengan Basuki yang berasal dari Semarang mencoba menjajaki pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kendal. Dico-Basuki pernah menjadi calon anggota legislatif Dapil I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga), akan tetapi keduanya gagal dalam pencalonan tersebut. Meskipun Dico-Basuki belum terlalu dikenal oleh masyarakat Kendal, akan tetapi pencalonan keduanya sebagai anggota legislatif menjadi modal bagi keduanya untuk mengenal Kabupaten Kendal baik dari masyarakatnya sampai wilayah Kabupaten itu sendiri.

“Sebelum pak Dico dan pak Basuki mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, keduanya juga sudah pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR-RI. Jadi selama satu tahun itu pak Dico dan pak Bas sudah mengenal kondisi di Kendal, masyarakat Kendal juga sebenarnya sudah mengenal pak Bas dan pak Dico. Meskipun beliau bukan masyarakat Kendal, tetapi keduanya sudah pernah masuk di Kendal, sehingga beliau sudah mengerti strategi-strategi apa yang harus diterapkan ketika kampanye,” (Wawancara Khusnul Khotimah, 6 Juli 2021)

Dico-Basuki menyadari pentingnya membangun ketokohan yang dimau oleh masyarakat tidak dengan cara instan dan mendadak. Tetapi membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan kiprah nyata di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan menilai para tokoh yang benar-benar membantu masyarakat, bukan hanya dengan publikasi yang sifatnya searah.

Dico berusaha tampil di masyarakat di setiap kesempatan. Terlebih masyarakat yang sedang membutuhkan uluran bantuan.

Seperti dikemukakan oleh Khusnul, salah satu tim sukses Dico-Basuki Daerah pilihan 2 (Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, dan Kecamatan Brangsong) bahwa pemilih di Dapil 2 bahwa Dico sebelumnya tidak terlalu dikenal baik oleh masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui dua calon kandidat yang menjadi lawan politik Dico-Basuki dalam Pilkada 2020 yaitu Ali Nurudin dan Mukh. Mustamsikin yang notabene keduanya merupakan warga asli daerah pilihan tersebut. Kemudian Dico mulai terjun ke masyarakat untuk membangun kedekatan emosional dengan warga. Masyarakat rupanya simpati dengan cara Dico mendekati masyarakat. Menurutnya, dengan kecakapan dan jiwa millennialnya, Dico sangat mudah akrab dengan siapa pun. Selain itu, Dico tidak segan-segan untuk selalu menyempatkan hadir dalam setiap sosial-keagamaan seperti hadir pengajian yang diadakan warga maupun pondok-pondok pesantren. Inilah yang membuat masyarakat Kendal semakin jatuh hati pada Dico.

“Kabupaten Kendal, khususnya wilayah Kaliwungu itu kan terkenal banyak pondok-pondok pesantrennya. Kemarin waktu pak Dico berkesempatan diundang oleh salah satu pondok pesantren di Kaliwungu untuk melakukan pengajian bersama, beliau langsung menyetujui. Tidak hanya itu, pak Dico juga menyempatkan hadir dalam acara khitanan massal dan pengajian yang diadakan salah satu panti asuhan di Kaliwungu,” (Wawancara Khusnul Khotimah, 6 Juli 2021).

2. Membidik Pemilih Potensial Berbasis Daerah

Jika melihat hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Kendal, pada Pilkada 9 Desember 2020, maka Dico (pasangan urutan nomor 1), hampir menguasai suara seluruh kecamatan, terutama kecamatan yang jumlah pemilihnya terbanyak, seperti Kecamatan Sukorejo, Patean, Singorojo, Limbangan, Brangsong, Weleri, Cepiring, Patebon, Kendal, Rowosari dan Kangkung. Kecuali Kecamatan Kaliwungu Pageruyung dan Kaliwungu Selatan, yang masih dikuasai calon kandidat putra daerah, Ali Nurudin-Yekti Handayani. Berikut ini hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal 2020:

Tabel 5. 1 Hasil Perolehan Suara Paslon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Kecamatan	Pasangan Calon			Jumlah
		01	02	03	
1	Plantungan	8.202	7.704	2.472	18.378
2	Pageruyung	9.369	10.883	1.855	22.107
3	Sukorejo	16.915	12.630	5.360	34.905
4	Patean	14.652	9.966	4.683	29.301
5	Singorojo	13.771	11.231	4.893	29.895
6	Limbangan	10.300	6.915	4.037	21.252
7	Boja	18.787	17.061	6.777	42.625
8	Kaliwungu	16.823	15.097	4.428	36.348
9	Brangsong	14.972	10.885	3.011	28.868
10	Pegandon	10.925	8.375	2.399	21.699
11	Gemuh	11.949	10.593	6.438	28.980
12	Weleri	17.190	10.284	4.501	31.975
13	Cepiring	17.452	9.483	2.400	29.335
14	Patebon	18.505	12.450	3.595	34.550
15	Kendal	17.299	11.303	3.595	32.197
16	Rowosari	14.791	11.261	3.197	29.249
17	Kangkung	15.914	9.953	2.693	28.560
18	Ringinarum	10.823	8.315	1.948	21.086
19	Ngampel	10.129	7.603	2.198	19.930
20	Kaliwungu Selatan	10.864	12.307	3.891	27.062
Jumlah		279.632	214.299	74.371	568.302

Sumber: KPU Kabupaten Kendal

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kendal, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020, secara geografis wilayah Kabupaten Kendal dapat dipilah menjadi dua wilayah pemilihan yaitu wilayah Utara dan wilayah Selatan. Kecamatan yang berada di Utara adalah Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, Gemuh, Weleri, Cepiring, Patebon, Kendal, Rowosari, Kangkung, Ringinarum dan Ngampel.

Jika melihat data di atas, maka presentase perolehan suara di wilayah Utara Kendal untu Dico-Basuki adalah sebagai berikut: di Kecamatan Kaliwungu sekitar 46,3 persen; Kecamatan Brangsong sekitar 51,9 persen;

Kecamatan Pegandon sekitar 50,3 persen; Kecamatan Gemuh sekitar 41,2 persen; Kecamatan Weleri sekitar 53,8 persen; Kecamatan Cepiring sekitar 59,5 persen; Kecamatan Patebon sekitar 53,6 persen; Kecamatan Kendal sekitar 53,7 persen; Kecamatan Rowosari sekitar 50,6 persen; Kecamatan Kangkung sekitar 55,7 persen; Kecamatan Ringinarum sekitar 51,3 persen; dan Kecamatan Ngampel sekitar 50,8 persen.

Sedangkan wilayah Selatan meliputi Kecamatan Plantungan, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Berikut presentase perolehan suara di wilayah Selatan Kendal untuk Dico-Basuki adalah sebagai berikut: di Kecamatan Plantungan sekitar 44,6 persen; Kecamatan Pageruyung sekitar 42,4 persen; Kecamatan Sukorejo sekitar 48,4 persen; Kecamatan Patean sekitar 50,0 persen; Kecamatan Singorojo sekitar 46,1 persen; Kecamatan Limbangan sekitar 48,5 persen; Kecamatan Boja sekitar 44,1 persen; dan Kecamatan Kaliwungu Selatan sekitar 40,1 persen.

Perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 atau calon kandidat putra daerah unggul di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pageruyung (49,2 persen) dan Kecamatan Kaliwungu Selatan (45,5 persen). Sedangkan untuk perolehan suara Dico dan Basuki atau pasangan calon nomor urut 1 unggul di 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Plantungan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Weleri, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, Kecamatan Kendal, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Ringinarum dan Kecamatan Ngampel.

Dico-Basuki dan tim pemenangannya sangat strategis untuk memainkan isu tentang pendidikan, anak, kesehatan dan kesejahteraan yang menjadi prioritas utama. Dico meyakini, bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, harus dimulai dari kesehatan, kesejahteraan, dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Kemudian, jika ditelisik lebih jauh, mengenai penyebaran pemilih di daerah-daerah, bahwa jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Weleri yaitu sebesar 48.318. Sementara di bawahnya yaitu Kecamatan Kaliwungu, Sukorejo, Patebon, Kendal, Rowosari, Cepiring, Kangkung, Singorojo, Gemuh dan Patean yang jumlah pemilihnya di atas

40.000 orang. Jika melihat kecamatan yang jumlah pemilihnya di atas 40.000, adalah sebagian besar termasuk daerah perkotaan.

Masyarakat perkotaan identik dengan tingkat ekonomi yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, gaya hidup yang modern, serta logika berpikir yang realistis. Maka, segmentasi politik Dico dan tim pemenangannya bergerak di kecamatan-kecamatan yang jumlah pemilihnya besar, dan itu sebagian besar terdapat di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pasangan Dico-Basuki beserta tim pemenangannya lebih mengetengahkan pesan politik yang elegan, realistis, dan mudah di logika oleh publik. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang cerdas untuk menentukan calon pemimpinnya, didasarkan pada asumsi dan logika yang masuk akal tentang program-program para kandidat. Meskipun fanatisme dalam memberikan dukungan selalu ada.

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal 2020

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Tetap		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Plantungan	13.111	12.667	25.778
2	Pageruyung	14.424	14.294	28.718
3	Sukorejo	24.029	23.314	47.343
4	Patean	20.894	20.791	41.685
5	Singorojo	20.323	20.359	40.682
6	Limbangan	13.610	13.769	27.379
7	Boja	29.353	30.144	59.497
8	Kaliwungu	23.558	23.896	47.454
9	Brangsong	19.431	19.655	39.086
10	Pegandon	14.291	14.264	28.555
11	Gemuh	20.188	20.679	40.867
12	Weleri	23.876	24.442	48.318
13	Cepiring	20.421	21.141	41.562
14	Patebon	23.087	23.625	46.712
15	Kendal	22.031	22.440	44.471
16	Rowosari	20.988	21.044	42.032
17	Kangkung	19.918	20.097	40.012
18	Ringinarum	14.845	14.376	29.222
19	Ngampel	13.948	14.299	28.247
20	Kaliwungu Selatan	18.723	18.960	37.683

Sumber: KPU Kabupaten Kendal

Kecamatan Weleri masuk ke dalam wilayah Kendal bagian utara. Kecamatan ini memang tidak pernah sepi dari perdagangan. Kecamatan ini menjadi transit dan tujuan para pedagang dari seluruh penjuru Kabupaten bahkan wilayah Indonesia. Dengan sarana transportasi (dua terminal dan satu stasiun Kereta Api) dan sarana komunikasi yang lebih komplit dari kecamatan lainnya, menjadikan Weleri lebih sempurna karena ramai dan mudah diakses. Selain itu, secara sosial, para pedagang yang berasal dari luar daerah Kendal seperti pedagang Klaten-Solo membentuk suatu perkampungan khusus yaitu Kampung Solo. Perkampungan tersebut terletak di dukuh Kedonsari, Kelurahan Penyangkringan. Dari pengaruh perubahan sosial inilah menjadikan Weleri sebagai kecamatan yang perkembangan perdagangan lebih pesat dengan ditandai banyaknya pasar tradisional. Weleri juga dikenal sebagai kota kecil yang multietnis di Kendal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Subakir, tim sukses tingkat kabupaten, bahwa daerah perkotaan merupakan sasaran utama dalam menggalang dukungan. Strategi komunikasi akan dilakukan secara masif di daerah-daerah tersebut. Apalagi, partai pendukung Dico adalah partai modern dengan basis perkotaan dan pemilih terpelajar yang cukup solid, yaitu Golkar, Demokrat, PAN, PKS dan Perindo. Hal seperti disampaikan Ahmad Subakir, yaitu sebagai berikut:

“Saya bersama tim sukses lainnya gencar menyerang daerah-daerah dengan kantung-kantung suara terbanyak. Dan saya lihat, kebanyakan berada di daerah perkotaan . Tentu kami memainkan isu-isu untuk konsumsi para pemilih terpelajar, di mana mereka lebih mengedepankan pada logika. Strategi komunikasi politik yang dibuat juga bersifat lebih elegan dan cerdas. Kabupaten Kendal secara keseluruhan merupakan daerah perkotaan dan pedesaan, yang tentu memiliki paradigma berpikir layaknya orang perkotaan yang lebih kepada rasionalitas dan orang pedesaan yang menjunjung tinggi persaudaraan dan gotong royong. Yang jelas bagaimana tim sukses harus bisa merebut suara-suara di kecamatan-kecamatan yang jumlah pemilihnya besar,” (Wawancara Ahmad Subakir, 11 April 2021).

Melihat penyebaran jumlah pemilih di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, para kandidat akan berlomba-lomba untuk menerapkan strategi komunikasi yang tepat, sesuai karakter daerahnya. Setiap kecamatan tentu memiliki karakter dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda,

sehingga kemampuan menganalisa kondisi pemilih di setiap daerah atau kecamatan menjadi kunci untuk merebut simpati dari masyarakat Kendal.

3. Menggalang Dukungan Semua Kalangan

Sudah dibahas sebelumnya, bahwa pasangan Dico-Basuki didukung oleh Golkar, Demokrat, PAN, PKS dan Perindo, yang dilihat dari perolehan suara pada pemilihan legislatif tidak terlalu signifikan atau besar. Maka dari itu, pasangan ini masih harus bekerja keras untuk bisa merebut hati para pemilih, khususnya kantung-kantung pemilih di luar partai pengusung. Sebagaimana diketahui, Kendal bisa dikatakan basisnya pendukung PKB dan PDIP.

Berangkat dari hal tersebut, Dico menggalang kekuatan di daerah-daerah, dengan tidak menonjolkan baju kepartaian. Dico lebih menjual pada kekuatan figur dan program-program yang pro rakyat. Oleh karena itu, perolehan suara yang diraih Dico menunjukkan pada kekuatan figur, selain didulang oleh suara dari basis pendukung partai, yaitu Golkar, Demokrat, PAN, PKS dan Perindo. Dico dianggap memiliki visi yang lebih menasar dan mengedapankan silaturahmi dengan lembaga atau organisasi yang berada di Kabupaten Kendal.

“Kami (tim sukses) menjaga kualitas atau *performance* calon yang kita usung. Kami terjun ke masyarakat tidak menjual persoalan kepartaian, bahkan tidak memakai baju partai. Kami mensiasati agar tidak terjadi penolakan yang cukup keras di masyarakat. Karena pilihan masyarakat kan berbeda-beda, takutnya ada yang lebih suka partai A atau partai B. Sehingga tugas tim sukses menyampaikan visi, misi dan beberapa program unggulan calon kandidat yang kita usung,” (Wawancara Abdul Karim, 2 Mei 2021).

Lebih lanjut, Dico juga terus menggalang kekuatan dengan mengajak dan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Kendal. Struktur masyarakat Kendal yang terkenal akan religiusitas dan tingkat fanatisme terhadap kyai dan ulama, menjadikan pasangan Dico-Basuki membuat strategi politik yakni dalam bentuk berkunjung ke kediaman para ulama dan kyai yang berpengaruh di Kabupaten Kendal. hal ini dimaksudkan sebagai sebuah strategi untuk menciptakan *image* politik pasangan Dico-Basuki yang sudah mendapatkan restu dari para ulama dan kyai. Menurut Basuki, salah satu cara memimpin Kabupaten Kendal dengan selalu dekat kepada para tokoh agama dan para ulama sehingga apapun yang akan dilakukan olehnya tentunya atas restu dari para tokoh tersebut. Dilansir dalam

wawasan.co, bahkan Dico-Basuki berkesempatan menghadiri Forum Silaturahmi Kyai dan tokoh masyarakat Kabupaten Kendal di salah satu pondok pesantren. Dengan sukarela, para kyai dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum tersebut memberikan dukungan kepada pasangan Dico-Basuki. Dengan dukungan jumlah kyai dan ulama yang banyak di Kabupaten Kendal, membuat strategi lebih efisien karena dapat menjangkau keseluruhan kyai dan ulama yang menyebar di berbagai tempat dengan waktu secara bersamaan.

Tidak hanya mendekati dan meminta restu dengan para kyai dan ulama yang berada di Kabupaten Kendal, pasangan Dico-Basuki juga berkesempatan melakukan silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kendal. Menurut Dico, FKUB merupakan suatu organisasi yang sangat penting dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya di Kabupaten Kendal. FKUB akan menjadi salah satu yang mengawal apabila Dico-Basuki terpilih untuk memastikan program-program terkait dengan pendidikan, keagamaan dan kerukunan bisa berjalan.

Mengutip *Gatra.com*, dalam upaya membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Dico-Basuki bersama tim pemenangan menggelar diskusi terkait visi dan misi dengan perwakilan aliansi dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Kendal. Selain mensosialisasikan dan memaparkan visi dan misi pasangan calon, juga memaparkan kontrak politik di atas nota resmi terkait dengan salah satu program unggulan Dico-Basuki yaitu memberikan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 100-300 juta per dusun per tahun.

“Kontrak politik adalah komitmen dari pasangan calon Dico-Basuki dalam bentuk program kerja dan besaran mata anggarannya tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dengan begitu ada konsekuensi hukum dan moral apabila program tersebut tidak dilaksanakan oleh pasangan calon. Sehingga warga dapat menuntut kepada calon atau pasangan calon terpilih jika tidak menepatinya,” (pernyataan Idham Nurkholis, selaku Koordinator Tim Relawan).

Selain strategi membangun *image* sebagai pribadi yang dekat dengan kalangan religius seperti kyai dan ulama, tokoh agama melalui silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan menawarkan kontrak politik dengan Ormas dan LSM sebagai upaya membentuk kepercayaan publik terhadap Dico-Basuki, tim pemenangan juga melakukan

strategi lain yakni dengan memunculkan sosok Dico-Basuki sebagai pribadi yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan tim pemenangan dengan melakukan kampanye langsung dengan mendatangkan Dico-Basuki ke beberapa daerah. Rekor yang dicapai Dico-Basuki dengan datang langsung ke beberapa wilayah khususnya desa/kelurahan di Kabupaten Kendal yaitu 286 desa/kelurahan hanya dalam tengat waktu 29 hari. Bahkan kurang lebih 900 dusun sudah disambangnya. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu program unggulan terkait memberikan alokasi tambahan dana bagi dusun Rp 100 s/d 300 juta per dusun per tahun.

Tim pemenangan juga menargetkan pemilih pemula dalam menjangring mobilisasi suara pada Pilkada Kabupaten Kendal 2020. Perhatian khusus ditujukan kepada generasi milenial yaitu pemilih pemula dan pemilih muda. Karena sebagian dari mereka masih belum yakin dengan pilihannya, atau dapat dipengaruhi orang lain sehingga memilih kandidat mengikuti temannya.

“Target kita ya seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih, namun kita fokuskan dan memberikan perhatian lebih kepada generasi milenial atau pemilih pemula usia 17-25 tahun. Biasanya anak-anak muda atau pemilih pemula masih bingung dalam menentukan pilihannya, jadi kita yakinkan mereka bahwa kandidat yang kita usung merupakan sosok pemuda yang cerdas dan inovatif, Insha Allah dapat mewakili anak muda. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan, agar mereka tahu proyeksi ke depan dari tim bagaimana terkhusus dengan kandidat,” (wawancara Tardi, 26 Juni 2021).

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia juga berdampak pada penerapan strategi kampanye yang dilakukan tim pemenangan Dico-Basuki. Mereka tidak bisa melakukan pendekatan yang lebih intens dengan masyarakat melalui beragam kegiatan tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Kendal. Tradisi dan kebudayaan di Kabupaten Kendal sementara ditiadakan karena mengingat masih dalam suasana pandemi Covid-19. Menurut Khusnul Khotimah, strategi komunikasi melalui pendekatan budaya sejatinya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kendal 2020.

“Dulu sebelum adanya pandemi Covid-19, pak Dico-Basuki bersama tim pemenangannya sudah jauh-jauh hari merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan yang ada di Kendal, seperti Suronan, Weh-Wehan, Syawalan dan lain sebagainya. Hari Mulid Nabi ada tradisi Weh-Wehan di Kaliwungu, seminggu setelah Hari

Raya Idul Fitri biasanya ada tradisi syawalan, semua itu sudah kami rencanakan, sudah kami tata bagaimana strategi yang akan dilakukan. Akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19, semua tradisi tersebut ditiadakan. Kami tetap mendukung keputusan Pemerintah Daerah,” (Wawancara Khusnul Khotimah, 6 Juli 2021).

4. Program Pro Rakyat

Selain mendatangkan sosok Dico-Basuki secara langsung ke masyarakat, tim pemenangan gencar memperkenalkan sosok Dico-Basuki yang memahami betul aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Namun tidak hanya sampai di situ saja, pembangunan *image* Dico-Basuki sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat diimplementasikan oleh Dico-Basuki dan tim pemenangan ke dalam program-program kerja yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga kesehatan.

Menurut Tardi, bahwa faktor utama yang masih dominan dan menjadi isu sentral permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar selama ini antara lain dari sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan, yang berujung pada kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Menurutnya bahwa masyarakat Kendal harus bermimpi mencita-citakan kesejahteraan yang lebih baik, tetapi harus juga berpijak pada realitas, bahwa dalam mewujudkan impian-impian masa depan untuk lebih mensejahterakan masyarakat Kendal dengan berbekal pada potensi unggulan dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, maka satu hal yang harus diperhatikan dan merupakan kunci pokok keberhasilan itu adalah upaya peningkatan kebersamaan dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Kendal yang mandiri.

Dari penjelasan Tardi, strategi yang dilakukan untuk membangun *image* seorang Dico-Basuki merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat diimplementasikan oleh Dico-Basuki dan tim pemenangannya ke dalam visi dan misi pencalonan. Adapun penjabaran program-program unggulan sebagai implementasi visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur

- a. Memberikan alokasi tambahan anggaran Rp 100-300 juta per dusun per tahun yang difokuskan pada pembangunan fisik, pengembangan Sumber Daya Manusia dan perekonomian mikro;

- b. Revitalisasi dan penataan Alun-Alun Kabupaten, Alun-Alun Kaliwungu dan Ruang Terbuka Hijau Plus berbasis kecamatan (sarana rekreasi, olahraga, dan pelayanan publik);
 - c. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pelayanan dasar di area-area wisata.
2. Program Perekonomian dan Pariwisata
- a. Mengawal proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan memprioritaskan kepentingan daerah, mulai dari tenaga kerja hingga pengusaha di tingkat lokal;
 - b. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata baru untuk menggerakkan perekonomian daerah;
 - c. Mengembangkan konsep *One Village One Product* (OVOP).
3. Program Pertanian
- a. Pembangunan BUMD pertanian untuk optimalisasi potensi pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan (budidaya dan tangkap/nelayan);
 - b. Pembangunan kawasan agro industri berbasis potensi daerah (durian, rambutan, jagung, dan sebagainya);
 - c. Pengembangan pertanian organik untuk meningkatkan kualitas produk dan penghasilan petani;
 - d. Pemberdayaan masyarakat pinggiran hutan;
 - e. Revitalisasi petugas Penyuluhan Lapangan (PL).
4. Program Agama dan Budaya
- a. Memberikan bantuan operasional pondok pesantren, tempat ibadah dan aktivitas keagamaan, intensif Takmir Masjid, Modin, Guru Ngaji Pegiat Budaya dan Penjaga Makam;
 - b. Memberikan Umroh untuk pegiat keagamaan di kampung;
 - c. Melaksanakan Sholat Subuh berjamaah;
 - d. Memberikan Beasiswa Guru Diniyah hingga S-2
 - e. Program pengembangan *santriprenuer* (Santri Berwirausaha);
 - f. Memberikan Beasiswa santri berprestasi (akademik, olah raga, seni dan budaya);
 - g. Pengembangan bisnis *online*, *market place*, dan *start up* (satu pondok pesantren 1 *start up*);
 - h. Memberikan Beasiswa Hafidz dan Hafidzoh.
5. Program Pendidikan
- a. Memberikan pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, hingga SLTP;

- b. Program 10.000 beasiswa SMA/MA/SMK/Sederajat dan Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu;
 - c. Memberikan bantuan seragam dan peralatan sekolah;
 - d. Memberikan studi lanjut untuk guru berprestasi;
 - e. Melakukan percepatan sertifikasi guru;
 - f. Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama.
6. Program Kesehatan
- a. Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan perluasan keanggotaan BPJS masyarakat;
 - b. Program Dokter *On Call*;
 - c. Puskesmas yang terakreditasi A;
 - d. Mengoptimalkan posyandu ibu hamil, anak, serta lanjut usia dengan memberikan nutrisi dan makanan.
7. Program Sosial
- a. Pemberian *Social Security Number* (Satu Kartu Untuk Semua Layanan Sosial);
 - b. Program Keluarga Harapan Plus APBD Kabupaten Kendal;
 - c. Mewujudkan Badan Usaha Miliki Dusun (BUMDus);
 - d. Pengembangan koperasi berbasis segmen (koperasi wanita, petani, nelayan, LMDH, PKL, dan sebagainya).
8. Program Ketenagakerjaan
- a. Mewujudkan MoU penyerapan tenaga lokal bagi setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal;
 - b. Mewujudkan 10.000 Wira Usaha Baru melalui bantuan permodalan bergulir (Satu Dusun Satu WUB);
 - c. Meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta;
 - d. Mendorong tumbuhnya industri kreatif, *start up* dan bisnis *online*;
 - e. Menyelenggarakan program *Job Market Fair* (Festival Tenaga Kerja);
 - f. Program “jemput kerja” bagi keluarga tidak mampu usia produktif untuk disalurkan ke lapangan pekerjaan.
9. Program Tata Kelola Pemerintahan
- a. Penerapan zona bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);
 - b. Mereformasi birokrasi dengan menerapkan *merit system*;
 - c. Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (*e-services*), pengawasan/*command center* (*e-monitoring*), perencanaan pembangunan (*e-planning*),

pengangguran (*e-budgeting/real time budgeting*), pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*).

Melalui program-program unggulan di atas, Dico-Basuki berusaha meraih dukungan publik dan dapat memenangkan Pilkada Kendal 2020. Dico-Basuki berkomitmen membangun Kendal dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kendal. Program pro rakyat yang sudah dirancang pasangan tersebut diyakini dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspek baik ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

5. Pemanfaatan Saluran Komunikasi/Media Komunikasi

Saluran komunikasi politik merupakan sarana-sarana yang dapat memudahkan orang dalam menyampaikan pesan. Pesan disini baik dalam bentuk lambang, gambar, kata ataupun tindakan dan bisa juga merupakan gabungan dari hal-hal tersebut. Sialian hal-hal tersebut manusia merupakan sarana bagi saluran komunikasi yang paling utama. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan pola komunikasi politik yang berlaku dalam sistem politik, namun saluran komunikasi pada umumnya adalah sama. Saluran komunikasi politik dapat diambil pengertian tentang siapa berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana dan sejauh mana dapat dipercaya.

Komunikasi politik yang paling sering digunakan adalah melalui media massa. Akan tetapi, tidak hanya media massa yang menjadi saluran informasi politik. Komunikasi politik juga dapat terjadi melalui kelompok-kelompok kepentingan maupun partai-partai politik. Kelompok-kelompok kepentingan dan partai-partai politik berperan sebagai saluran yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara vertikal dan horizontal, baik antara pejabat-pejabat politik, pejabat-pejabat administrasi maupun dengan rakyat.

Saluran komunikasi sangat diperlukan oleh setiap kandidat, karena melihat peta penyebaran jumlah pemilih di setiap daerah sehingga membutuhkan media komunikasi yang tepat untuk bisa meraih dukungan publik. Beberapa kandidat masih menggunakan media komunikasi konvensional seperti baliho, spanduk, banner, pamflet, leaflet dan poster-poster yang ditempel di tempat-tempat strategis.

Seiring majunya teknologi informasi, di mana hampir semua orang memiliki gadget, media sosial menjadi alternatif yang efektif bagi para

kandidat untuk memasarkan program-program atau profil kandidat di tengah-tengah masyarakat. Dico-Basuki dan tim pemenangan memanfaatkan saluran media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp* untuk membesar peluang keberhasilan kampanye dari pasangan kandidat karena media sosial memang sudah menjadi pusat dan digandrungi oleh berbagai kalangan di masyarakat.

Tidak hanya memanfaatkan media massa, Dico-Basuki juga terus melakukan komunikasi secara *face-to-face* dengan berbagai kalangan masyarakat meskipun perannya hanya sekedar membentuk opini publik (pendapat umum). Hal yang paling menonjol dari sosok Dico-Basuki adalah kedekatannya secara sosial dengan masyarakat. Kunjungan ke daerah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat adalah hal yang sering dilakukannya.

“Pasangan Dico-Basuki sangat konsen terhadap pemanfaatan media. Terutama media massa memiliki posisi yang sangat strategis baik sebagai alat komunikasi juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menumbuhkan citra. Melalui media cetak ya lewat spanduk, poster-poster yang ditempel di jalan, pamflet dibagikan ke masyarakat. Dico-Basuki bersama tim pemenangan juga aktif memanfaatkan media komunikasi politik modern, seperti aplikasi media sosial yang sedang tren, seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*. Komunikasi secara tatap muka baik dari tim maupun kandidat yang secara langsung terjun ke masyarakat untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Akan tetapi karena faktor pandemi (Covid-19), kami tidak bisa melakukan kampanye secara terbuka, kami hanya bisa mengumpulkan beberapa orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” (wawancara dengan Miskam 10 April 2021).

Kontak informal dan relasi *face to face* merupakan sarana komunikasi yang paling umum dan paling sering terjadi dalam setiap masyarakat, meskipun peranannya lebih sebagai pembentukan opini publik (pendapat umum). Hal ini juga dilakukan oleh Dico-Basuki untuk semakin melekatkan diri dengan masyarakat. Dikatakan oleh ahli bahwa pengaruh media massa atau perilaku pemilih terjadi melalui apa yang disebut *opinion leaders* (para pembentuk opini umum). *Opinion leaders* ini mirip satu sama lain, dan secara tipikal terdiri dari orang-orang dari keluarga yang sama, sahabat-sahabat dan tokoh-tokoh pendukung. Ditemukan di lapangan bahwa relasi antarpribadi bersifat informal itu penting dalam tiga hal yaitu, pertama, sebagai saluran

informasi yang aktual, yang kedua sebagai sumber tekanan sosial atas individu untuk mematuhi berbagai norma tingkah laku, dan ketiga sebagai sumber dukungan atas norma-norma tersebut, dan karena itu dapat berguna bagi keutuhan kelompok atau para pendukung. Meskipun demikian kontak-kontak antarpribadi atau interpersonal tersebut juga dipengaruhi oleh opini atau berita di media massa (Sari, 2018).

6. Penguatan Ketokohan (*Ethos*) Kandidat

Pada pembahasan ini, akan dipaparkan tentang sejauh mana hasil dari tindakan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pasangan Dico-Basuki dalam membangun atau menguatkan ketokohan pasangan. Berbagai strategi komunikasi politik yang telah diterapkan, diharapkan mampu menaikkan kekuatan figur pasangan, yang pada akhirnya masyarakat percaya untuk memilihnya menjadi pemimpin di Kabupaten Kendal.

Sebagaimana diketahui, pembicaraan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), tidak terlepas dari para kandidat atau calon yang diusung. Jauh-jauh hari, mereka telah melakukan sosialisasi atau memperkenalkan diri ke masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Para kandidat harus bisa memastikan bahwa figurnya telah dikenal dengan baik atau keunggulan yang dimiliki oleh kandidat, mulai dari kepribadiannya, asal usulnya, kompetensi, kecakapan atau keahlian yang dimiliki, sepak terjang atau kiprah di masyarakat selama ini, pengalaman menjadi pemimpin, prestasi atau kinerja yang dicapai, serta orang-orang di sekitarnya. Sangat penting bagi seorang kandidat atau yang mencalonkan menjadi kepala daerah untuk membangun ketokohan atau figur yang kuat, yang bisa dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Rakhmat dalam Sari (2018: 102), bahwa ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Ketokohan juga bisa disebut *ethos*, yang merupakan gabungan antara kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Dimensi *ethos* yang paling relevan adalah kredibilitas yaitu keahlian komunikator (pemimpin) atau kepercayaan kepada pemimpin tersebut.

Oleh karena itu, memelihara atau merawat ketokohan dijadikan sebagai langkah strategi utama untuk melakukan komunikasi politik. Hal ini sangat penting dilakukan karena merupakan faktor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye, pencitraan, dan pemberian suara dalam pemilihan umum.

Maka, ketika calon pemimpin memiliki kredibilitas yang baik, akan semakin mudah mempengaruhi cara pandang komunikan. Dengan kata lain, kredibilitas seseorang mempunyai peranan yang penting dalam mempersuasi komunikan untuk menentukan pandangannya. Komponen penting di dalam menentukan kredibilitas komunikator dapat dilihat dari: (1) *Competences*; (2) *Trustworthiness*; (3) *Dynamism*; dan (4) (*Co-orientation*). Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya, akan diketengahkan figur atau ketokohan pasangan Dico-Basuki dilihat dari empat faktor tersebut:

a) Kompetensi Calon Pemimpin (*Competence*)

Kompetensi mengandung arti bahwa seorang komunikator itu adalah profesional, ahli bidangnya, berharga, pintar, dapat diandalkan, berkualifikasi, mempunyai keahlian, berpengalaman, dan terlatih. Orang yang baik belum tentu dipercaya atau dipilih jika dinilai kurang kompeten dan sebaliknya, orang yang kompeten belum tentu dipercaya jika tidak baik karakternya (Haroen, 2014). Komunikator dapat lebih bisa menyakinkan apabila mempunyai pengetahuan dan keahlian yang cukup tentang apa yang dibicarakannya.

Sebagaimana diketahui, bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki merupakan satu-satunya pasangan calon yang berasal dari luar daerah Kendal. Figur Dico-Basuki cukup akrab dan dikenal hampir semua lapisan masyarakat yakni dari masyarakat lapisan atas hingga lapisan masyarakat bawah. Dico mengikuti jejak ayahnya untuk terjun langsung di dunia politik.

Karir politiknya dimulai ketika dirinya masuk menjadi anggota DPP Partai Golkar dan terpilih menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dico juga aktif di organisasi sayap Partai Golkar seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan membentuk Gema Golkar dengan posisi ketua. Pada tahun 2019, Dico mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, namun usahanya dalam pencalegan belum bisa membuatnya melangkah ke Senayan. Meskipun gagal, pengalaman Dico dalam hal kepemimpinan tidak perlu diragukan. Dico yang merupakan lulusan Amerika memiliki latar belakang organisasi yang cukup banyak, antara lain Petroleum Engineering sebagai *Member of Society* tahun 2008-2012, PERMIAS Tulsa sebagai Anggota tahun 2008-2010, PERMIAS Tulsa sebagai Wakil Presiden tahun 2010-2011, PERMIAS Tulsa sebagai Presiden tahun 2011-2012 dan ISSI DKI sebagai Bendahara Umum tahun

2019. Sehingga secara kompetensi yang dimiliki pada diri Dico tidak bisa diragukan.

“Pak Dico itu sosok pemimpin yang cerdas, ulet, dan berpengalaman. Beliau juga sosok yang humanis, mau mendengarkan keluh kesah masyarakat. Saya rasa pak Dico akan bisa memimpin Kabupaten Kendal dan siap membawa perubahan yang lebih baik serta bisa menciptakan terobosan-terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Kendal,” (wawancara Tardi, 17 Mei 2021).

Oleh karena itu, pengalamannya memimpin sebuah organisasi sudah tidak diragukan lagi. Keprihatinan terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Kendal menjadi tonggak awal untuk turut serta memberi solusi melalui jalur politik. Dico ingin merangkul semua elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjadikan Kendal yang mandiri dan sejahtera.

Menurutnya bahwa mandiri berarti masyarakat Kendal mampu berdiri dengan kaki sendiri, yakni dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan sendiri. dia optimis dengan kemandirian tersebut, karena indeks kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pasti akan terwujud. Layanan dasar yang dimaksud adalah mencakup semua aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi yang didukung dengan nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri masyarakat Kendal.

Visi dan misi yang telah disusun tersebut akan diwujudkan saat Dico dipercaya menduduki kursi sebagai Bupati periode 2021-2024. Calon bupati nomor urut 1 (satu) pada Pilkada 2020 ini berjanji akan memberikan pelayanan dokter *on call* agar pelayanan kesehatan dapat dijangkau sampai perbatasan/pelosok. Program tersebut merupakan salah satu program pemenuhan kesehatan dasar bagi warga Kendal. Sedangkan dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Kendal, Dico-Basuki akan memprioritaskan pada tiga pilar yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiganya sekaligus menjadi kunci komitmen bekerja untuk rakyat, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pembangunan lima tahun benar-benar mampu meningkatkan derajat dan harkat hidup masyarakat.

b) Kepercayaan Masyarakat Kepada Calon Pemimpin (*Trustworthiness*)

Sebagaimana diketahui bahwa *trustworthiness* mengandung arti bahwa seorang komunikator dapat dipercaya, dapat bersosialisasi, periang dan berkata benar, berbudi luhur, baik, tidak mementingkan dirinya sendiri, menyenangkan, jujur, ramah, sederhana, amanah atau dapat dipercaya (Appalbaum dan Anatol, dalam Sari, 2018). Kepercayaan komunikator tidak bisa dipisahkan dari karakter, kompetensi, dan kekuatan. Dalam politik kepercayaan adalah faktor yang paling kuat untuk mempersuasi pemilih untuk memilih calonnya. Membangun *trust* dapat dilakukan dengan tiga basis fundamental yaitu karakter, kompetensi dan kekuatan. *Trust* publik tidak saja menuntut kandidat harus menjadi orang yang benar (berkarakter), tetapi juga menuntut menjadi orang yang ahli secara *skill* dengan dukungan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan apa yang dijanjikan (Haroen, 2014).

Berbicara tentang kepercayaan masyarakat Kendal terhadap Dico sebagai calon pemimpin, sudah tidak terbantahkan lagi. Menurut pengamat politik, Mudjahirin Thohir menguatkan kesimpulan ini tentang kekuatan figur atau sosok Dico di mata masyarakat Kendal.

“Kabupaten Kendal membutuhkan pemimpin yang kompeten (mumpuni), memiliki kemampuan dan pengalaman profesional yang sejalan dengan kebutuhan dan dinamika zaman. Diperlukan kepemimpinan yang inovatif yang mampu menangkap berjuta peluang dan berani melakukan terobosan kebijakan untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Kendal. pasangan Dico-Basuki merupakan pasangan yang mempunyai paket komplit. Dengan jiwa mudanya Dico yang dapat memimpin daerah dengan ilmu, pengalaman dan cekatannya, yang dipasangkan dengan Basuki dimana dengan pemikiran kebijaksanaannya yang dimiliki tentunya akan menjadikan Kabupaten Kendal lebih baik,” (pernyataan Mudjahirin Thohir, dikutip *halosemarang.id*).

c) Calon Pemimpin yang Dinamis (*Dynamism*)

Rakhmat (dalam Sari, 2018:106) mengatakan komunikator memiliki dinamisme, bila ia dipandang memiliki gairah, bersemangat, aktif, tegas, dan berani. Sebaliknya komunikator yang tidak dinamis dianggap sebagai orang yang pasif, ragu-ragu, lesu dan lemah. Dinamisme biasanya berkenaan dengan cara berkomunikasi seseorang. Dalam

komunikasi, dinamisme akan memperkokoh kesan keahlian dan kepercayaan. Sedangkan kharisma adalah bentuk dari dinamisme. Orang yang memiliki kharismatik, memiliki pesona, bakat, menarik seperti magnet dan kualitas lainnya yang membuat seseorang terlihat menarik dan energik.

Maka, jika melihat sosok Dico, beliau adalah sosok yang dinamis, tidak hanya terpaku pada hal-hal yang monoton. Dico memiliki banyak aktivitas di berbagai organisasi. Dico memiliki *respect* yang tinggi terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dico selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Tidak hanya Dico, wakilnya Basuki juga memiliki kecepatan untuk bertindak ketika terjadi permasalahan atau kendala di masyarakat. Contohnya terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan bantuan dan solusi bagi korban bencana alam seperti banjir rob yang terjadi di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal. pemimpin yang memiliki kecepatan bertindak dengan tepat yang akan dimaui oleh masyarakat. Bukan pemimpin yang lambat merespon, apalagi hanya melakukan pencitraan semata.

“Pak Dico merupakan sosok anak muda yang cekatan dan cepat merespon sesuatu. Jika diundang dalam forum-forum pengajian atau kemasyarakatan yang lain, beliau selalu bisa menyempatkan waktu dengan baik. Wakilnya pak Basuki, beliau juga sama dengan pak Dico, sama-sama memiliki jiwa kepedulian yang cukup tinggi. Kemarin saat adanya bencana banjir rob di Kelurahan Bandengan, pak Basuki langsung terjun ke masyarakat memberikan bantuan dan juga memberikan solusi agar bencana banjir rob bisa ditangani,” (Wawancara Ahmad Subakir, 11 April 2021).

d) Kemampuan Ko-Orientasi Calon Pemimpin (*Co-Orientation*)

Untuk dapat dipercaya oleh komunikan atau audiensm seorang komunikator dalam hal ini kandidat atau calon kepala daerah harus memiliki kesamaan dengan komunikannya. Kesamaan antara komunikator dengan komunikannya ini untuk memudahkan terjadinya perubahan pendapat, hal ini dimaksudkan sebagai strategi dari komunikator untuk mempengaruhi orang lain. komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menengaskan kesamaan antara dirinya dengan komunikan. Ko-orientasi adalah kesan komunikan tentang komunikator sebagai orang yang mewakili kelompok yang disenangi yang

dianggap mewakili nilai-nilai bersama (Rakhmat, dalam Sari, 2018). Komunikator yang memiliki kesamaan dengan komunikan cenderung berkomunikasi dengan efektif karena ada ketertarikan komunikan pada komunikatornya disebabkan adanya kesamaan itu. Jika komunikator dan komunikan memiliki kesamaan persepsi mengenai sikap dan kepercayaan terhadap sesuatu persoalan maka akan lebih mudah untuk memecahkan sebuah persoalan, karena mempunyai keinginan dan harapan yang sama pula dalam memandang persoalan ini.

Oleh karena itu, termasuk langkah strategis berikutnya yang harus dilakukan seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah menciptakan dan menentukan orientasi yang jelas kepada masyarakat (khalayak). Hal ini dilakukan dengan cara mengenal masyarakat dan menyusun pesan politik yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut.

Anwar Arifin (dalam Sari, 2018: 108) menyatakan bahwa suasana *homofili* yang harus diciptakan antara politikus dengan khalayak adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), persamaan busana, persamaan kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan media politik. Namun yang sangat penting adalah siapa tokoh yang akan melakukan komunikasi kepada khalayak. Artinya, politikus atau aktivis telah memiliki banyak persamaan dengan khalayaknya.

Dico sebagai calon pemimpin yang tidak pernah menganggap rivalnya sebagai musuh. Dico selalu mengajak untuk bersama-sama dalam membangun daerah Kendal yang lebih baik. Siapa pun tokoh-tokoh di Kendal yang memiliki pengaruh besar di masyarakat akan didekati dan dimintai pendapatnya tentang pembangunan di Kendal.

“Dico sosok yang mudah akrab dan bergaul dengan masyarakat. Pembawaannya yang fleksibel dan ramah, memudahkan beliau untuk mudah diterima oleh masyarakat. Dico sanggup merangkul semua kepentingan. Melakukan komunikasi baik dengan tokoh-tokoh penting maupun dengan masyarakat secara langsung untuk melakukan persamaan persepsi untuk menjadi tujuan bersama dalam hal membangun daerah dengan sebaik-baiknya,” (Wawancara Tardi, 26 Juni 2021).

Dico menerapkan strategi untuk membangun kebersamaan di masyarakat dengan segala budaya yang dimiliki. Selama tidak memiliki

agenda acara yang penting. Dico akan lebih memilih untuk menghadiri acara di masyarakat, dimana beliau dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan warga. Dengan cara ini, figur atau ketokohan Dico akan dianggap mewakili atau mempresentasikan kebutuhan masyarakat yang ingin selalu kehadiran sang pemimpin. Termasuk ketika warga mengalami permasalahan atau kendala dalam segala hal, maka Dico dengan cekatan memberikan alternatif solusinya, meskipun secara bertahap. Tetapi masyarakat akan bisa menilai bagaimana kesungguhan dan komitmen Dico untuk membangun Kabupaten Kendal menjadi lebih baik.

B. Sumber Daya dalam Komunikasi Politik Dico-Basuki

1. Sumber Daya Finansial

Dalam undang-undang memang tidak disebutkan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat tanpa ada perwakilan akan tetapi setelah undang-undang KPU diterbitkan 2015 lalu tentang pemilihan umum, presiden, gubernur, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat, maka mengharuskan setiap pasangan calon harus mempunyai harta yang melimpah sebagai *cost* politik atau *political fee*. Finansial menjadi hal penting bagi setiap kandidat, oleh karena itu bagi mereka yang tidak memiliki harta kekayaan yang melimpah dengan sendirinya tersingkir dari bursa calon dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Publik mungkin sama-sama mengetahui bahwa, biaya politik itu tidaklah murah.

Keterbatasan biaya akan menjadi hambatan bagi mereka yang mempunyai kredibilitas dan layak mencalonkan diri di pesta demokrasi lima tahunan ini. Kalkulasi dana dari pembelanjaan politik suatu pasangan calon bisa puluhan miliar rupiah, diantaranya pembelian partai politik sebagai kendaraan politik, persiapan pembuatan tim sukses, penyediaan atribut kampanye dan masih banyak lagi. Dengan sistem seperti ini, para pengusaha sukses bisa menjadi salah satu kandidat yang ideal dalam mengikuti kontestasi pilkada. Tidak heran, kini fase perpolitikan di Indonesia dominan dikuasai oleh para pengusaha. Apabila semua keperluan politik dalam sebuah kontestasi di pemilihan kepala daerah ditanggung sendiri oleh setiap pasangan calon, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan Dico dan Basuki untuk maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Kendal 2020.

Dico M Ganinduto adalah politisi sekaligus pengusaha muda. Seusai menempuh pendidikan di luar negeri, Dico memulai usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Wakilnya, Windu Suko Basuki juga tidak kalah hebatnya. Pria yang akrab disapa “Pak Bas” adalah purnawirawan TNI

sekaligus pengusaha. Tidak hanya beberapa perusahaan yang dimilikinya, beliau juga mengelola SPBU di beberapa kota di Jawa Tengah. Berikut daftar jumlah kekayaan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Kabupaten Kendal 2020:

Tabel 5. 3 Harta Kekayaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal

No	Nama Pasangan Calon	Jabatan	Total Harta Kekayaan
1	DICO M GANINDUTO	Calon Bupati	Rp. 7.714.104.826
	H. WINDU SUKO BASUKI, S.H	Calon Wakil Bupati	Rp. 47.339.435.568
2	H. ALI NURUDIN, S.Sos., M.Si	Calon Bupati	Rp. 28.313.366.558
	Hj. YEKTI HANDAYANI, S.Pd	Calon Wakil Bupati	Rp. 3.551.067.817
3	H. TINO INDRA WARDONO	Calon Bupati	Rp. 7.590.420.397
	H. MUKH MUSTAMSIKIN	Calon Wakil Bupati	Rp. 2.086.499.897

Sumber: KPU Kabupaten Kendal

Dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi, setiap kandidat perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Modal ekonomi sangat penting sebagai penggerak mesin politik yang dipakai. Biasanya, dana politik kandidat tidak hanya bersumber dari dana pribadi saja, melainkan juga dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem Pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif. Sumber daya finansial ini tentunya akan menjadi modal ekonomi untuk membiayai semua tahap-tahap pemilihan kepala daerah oleh kandidat dan tim pemenangan. Di dalam kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan dan berbagai kebutuhan yang lainnya.

Mengambil data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal mengenai Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal 2020, pasangan Dico-Basuki mengeluarkan dana sebesar Rp. 50.031.602 dan barang sebesar Rp. 3.632.500.000. Dana yang dipakai merupakan dana pribadi pasangan Dico-Basuki. Dana yang dikeluarkan dipakai untuk pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye

kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye, administrasi bank serta pengeluaran lain-lain yang tidak disebutkan.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor yang cukup dominan dalam kemenangan pasangan Dico-Basuki adalah faktor koalisi partai politik yang disebut sebagai mesin partai pengusung. Aspek tersebut menjadi salah satu faktor yang sejati yang selalu ada dalam setiap kandidat yang bertarung dalam kompetisi politik, dengan tujuan untuk mendapatkan medan magnet elektoral dan eksistensi dari partai maupun pasangan calon yang diusung. Kekuatan sumber daya manusia Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki terletak pada tim suksesnya yang berasal dari koalisi partai politik yang mengusungnya. Partai-partai tersebut ialah Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan Perindo. Gabungan partai menjadi “kendaraan politik” Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki dalam pelaksanaan kontestasi pemilihan umum kepala daerah. Fenomena banyaknya dukungan politik kepada Dico-Basuki menunjukkan kompetensi manuver dan lobi politik yang baik dari pasangan tersebut.

Banyaknya partai memberikan keuntungan, dimana peran partai dalam memenangkan calon kandidat yang bertarung dalam kontestasi pemilihan. Dengan adanya dukungan dari partai-partai pengusung, otomatis mesin partaupun akan berjalan mendukung pasanganya yang diusung yang dilakukan oleh tim sukses. Bagaimana partai membantu kandidat dapat memenangkan pemilihan bupati dengan menyiapkan kader-kader terbaiknya baik ditingkat DPD, DPC, PAC dan Ranting agar bisa meraih suara yang cukup dalam pemilihan bupati tersebut.

Pembentukan tim sukses ini juga diperjelas dengan konfirmasi dari Tardi yang merupakan ketua tim kemenangan Dico-Basuki sekaligus kader Golkar. Tardi menambahkan bahwa secara keseluruhan, tim inti Dico-Basuki terbagi atas dewan penasehat yang berisi elit-elit partai politik dan juga tokoh masyarakat serta tim kemenangan yang sekaligus menjadi tim sukses Dico-Basuki.

“Tim kemenangan dibagi menjadi dua kelompok, tim inti dan tim pelaksana. Tim inti dibentuk oleh partai-partai pengusung dan pendukung, yang terdiri dari para elit partai politik yang didaftarkan di KPU yang khusus menangani atau menyikapi isu-isu. Sedangkan untuk tim pelaksana terdiri dari beberapa relawan yang memenangkan DiBas dan membantu kerja tim kemenangan pusat. Dalam tim relawan dibentuk lagi, ada Koordinator Kabupaten (Korkab), Koordinator

Kecamatan (Korcam), Koordinator Desa (Kordes) dan Koordinator RT (Kor-RT). Tim relawan inilah yang mempresentasikan program di lapangan,” (Wawancara dengan H. Tardi, SP , 17 Mei 2021).

Dari penjelasan narasumber di atas menunjukkan bahwa dalam pembentukan tim pemenang tingkat pusat, Dico-Basuki menggabungkan antara orang-orang dari partai politik pendukung dan juga orang-orang non partai. Hal ini dilakukan karena Dico memiliki jaringan sosial yang cukup luas baik itu di kalangan politik maupun di kalangan orang-orang non politik. Pemetaan jaringan sosial ini terdiri dari jaringan elit politik partai pengusung dan pendukung dan tim jaringan relawan.

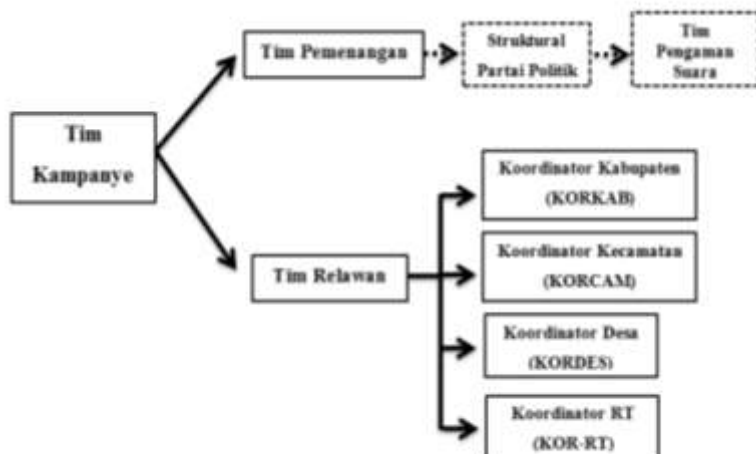
Tabel 5. 4 Struktur inti Tim Pemenangan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki

Dewan Pengarah	1. Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H
	2. H. A Sukawijaya, SE
	3. dr. H. Joko Kartono, M.Kes
	4. H. Sakdullah Mas'ud, S.Sos, M.H
	5. H. Bukhori Yusuf, L.C, M.A
	6. Siswandi Selo Dipuro
	7. H. Moh Suwindi, S.E
	8. Sigit Priyono, S.E, M.M
Ketua Tim Pemenangan	H. Tardi, SP (Golkar)
Wakil Ketua Tim Pemenangan	1. H. Wahyu Kris Hantoro, S.T, M.M (Demokrat)
	2. Ardian Yuniarko (Perindo)
Sekretaris	1. H. Nashri, ST (PAN)
	2. H. Sulistiyo Ari Wibowo, S.Hut (PKS)
Bendahara	1. Desita Kartika Ratri, SH
	2. Susqoifah

Sumber: KPU Kabupaten Kendal

Dalam pembentukan tim sukses ini, Dico-Basuki membangun tim sukses tidak hanya terdiri dari orang-orang partai saja. Akan tetapi juga mengandalkan dari jaringan sosial yang dimiliki sampai ke akar rumput. Tim sukses yang dibangun sebagai mesin politik ini terbagi menjadi empat sektor meliputi Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Koordniator Desa dan Koordinator RT. Dengan adanya pemilihan umum kepala daerah secara langsung membuat seorang calon kandidat perlu membangun hubungan

dengan masyarakat hingga ke tingkat bawah sebagai modal untuk mendulang suara menjadi lebih signifikan.



Gambar 5. 1 Struktur Tim Pemenangan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki

Tim pemenangan Dico M Ganinduto dan Windu Suko Basuki dalam sistem kerja dibantu oleh beberapa relawan membantu menyampaikan program serta visi-misi calon. Terdapat lebih dari 20 relawan yang bekerja dibawah koordinator tim pemenangan dan melakukan pendekatan sesuai dengan kemampuannya, pembentukan relawan dibentuk dengan sukarela dari masyarakat sendiri yang ingin mendukung pasangan tersebut dan ingin menjadikan Kabupaten Kendal lebih baik lagi sesuai dengan program-program unggulan serta visi misi yang dibawa selama masa kampanye. Tim sukses dituntut untuk dapat menjalankan program serta dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang perlunya perubahan baru dalam pemerintahan yang akan datang.

Strategi yang dilakukan oleh tim pemenangan Dico-Basuki adalah dengan menitikberatkan kepada teknik-teknik yang mampu membuat masyarakat mudah mengenali siapa calon bupati yang akan memimpin nantinya. Teknik-tekniknya yaitu tim sukses harus mendapatkan kepercayaan dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT, dengan membentuk koordinator dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan komunikasi politik dapat menyentuh masyarakat sampai tingkat bawah.

Tim pemenang suara yang terdapat dalam bagian tim pemenangan elit partai politik merupakan tim yang bertugas melakukan pendataan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Tim pemenang suara ini mempromosikan Dico-Basuki di struktural terkecil masyarakat yakni di lingkup RT dan RW dan ditugaskan melakukan pendataan serta dapat

meyakinkan masyarakat sehingga dapat memberikan suaranya kepada Dico-Basuki dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal.

Para tim pemenang suara di tingkat RT dan RW sebelumnya telah membuat semacam daftar nama-nama warga masyarakat dalam satu wilayah lingkup RT/RW. Daftar ini disusun oleh para tim pemenang suara dengan melalui dua proses, yaitu dipetakan dahulu siapa saja masyarakat yang berpotensi untuk memberikan dukungan suaranya, dan dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Pendataan dilakukan melalui sistem pintu ke pintu dengan mencatat identitas dari calon pemilih atau dalam praktiknya biasanya para calon pemilih akan dimintai fotokopi KK sebagai bukti. Selain pendataan dan penyerahan identitas diri dari calon pemilih, pemetaan pemilih juga dilakukan dengan memberikan tanda berupa stiker atau poster bergambar calon pada rumah-rumah calon pemilih tersebut sebagai bagian dari strategi pemetaan pemilih. daftar calon pemilih ini nantinya akan digunakan oleh para tim pemenang suara untuk menyalurkan barang balas jasa dar calon kandidat kepada masyarakat. Di hari pemilihan, para tim pemenang suara akan diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa para calon pemilih yang telah di data hadir pada hari pemilihan untuk memberikan suaranya kepada calon kandidat yang diusung (Adliima, 2021).

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai strategi komunikasi politik pasangan Dico-Basuki dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal 2020 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pasangan Dico-Basuki merupakan pasangan yang cukup menarik perhatian di masyarakat. Hal ini dikarenakan baik Dico dan Basuki merupakan nama baru yang muncul dalam dinamika perpolitikan di Kabupaten Kendal. Hal ini menjadi semakin menarik ketika mengetahui bahwa keduanya juga bukan berasal dari Kabupaten Kendal. Fenomena ini menarik untuk diamati mengingat saingan dalam pilkada serentak kali ini meliputi pasangan Ali Nurudin-Yekti Handayani yang bertagline putra daerah dan pasangan Tino Indra Wardono-Mukh. Mustamsikin, yang di mana Mustamsikin sudah memiliki pengalaman menjabat sebagai Wakil Bupati Kendal periode 2010-2015. Hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki, dengan perolehan suara sah 279.632 (49,2%). Sedangkan pasangan Ali Nurudin dan Yekti Handayani mendapatkan perolehan suara yang selisihnya tidak cukup jauh dari pasangan Dico M. Ganinduto dan Windu Suko Basuki yakni 214.299 suara (37,7%). Dan Tino Indra Wardono dan Mukh. Mustamsikin mendapatkan 74.371 suara (13,1%).

Kemenangan Dico-Basuki tidak terlepas dari strategi komunikasi politik yang digunakan bersama tim pemenangannya. Sebelum ke tahap pelaksanaan strategi, dalam upaya memobilisasi suara masyarakat dan berakhir dengan meraih kemenangan, Dico-Basuki bersama tim pemenangannya melakukan pemetaan wilayah seperti memahami struktur masyarakat Kendal dan memahami dinamika politik di Kabupaten Kendal dalam upaya merumuskan suatu strategi komunikasi politik yang akan digunakan Dico-Basuki. Selain itu, Dico-Basuki beserta tim pemenangannya melakukan pemetaan lawan politiknya dengan melihat latar belakang dari masing-masing calon kandidat, agar mengetahui potensi dan kelemahan apa yang dimiliki oleh pihak lawan, serta program kerja apa yang harus dirancang untuk bisa mendulang suara pemilih.

Strategi yang dirancang tidak akan berhasil jika tidak diimplementasikan dengan baik. Berikut bentuk tindakan atau implemementasi strategi komunikasi Dico-Basuki selama kampanye:

1. Membangun kedekatan emosional

Tindakan ini dijalankan sebagai bentuk pendekatan lebih dekat kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami permasalahan krusial di salah satu daerah. Pendekatan secara emosional memberikan dampak positif untuk membangun citra kandidat.

2. Membidik pemilih potensial berbasis daerah

Tindakan ini dilakukan dengan melakukan pemetaan wilayah dan pemetaan pemilih yang berpotensi dapat memberikan suara kepada Dico-Basuki.

3. Menggalang dukungan semua kalangan

Dukungan dari berbagai pihak yang diperlukan, mengingat keberhasilan seorang kandidat dalam sebuah kontestasi tidak terlepas dari pengaruh atau sokongan pendukungnya. Tidak hanya melakukan pendekatan dengan salah satu golongan masyarakat, melainkan semua golongan agar terjadi keseimbangan dan keselarasan dalam memperoleh dukungan dan suara.

4. Program Pro Rakyat

Penawaran program dilakukan ke masyarakat untuk memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dialami. Penjabaran program juga diyakini akan memberikan timbal balik dan kepercayaan dari masyarakat terkait konsistensi kandidat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di Kabupaten Kendal.

5. Pemanfaatan Saluran/Media Komunikasi

Saluran komunikasi politik merupakan sarana-sarana yang dapat memudahkan orang dalam menyampaikan pesan. Pesan disini baik dalam bentuk lambang, gambar, kata ataupun tindakan dan bisa juga merupakan gabungan dari hal-hal tersebut. Sialan hal-hal tersebut manusia merupakan sarana bagi saluran komunikasi yang paling utama. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan pola komunikasi politik yang berlaku dalam sistem politik, namun saluran komunikasi pada umumnya adalah sama. Saluran komunikasi politik dapat diambil pengertian tentang siapa

berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana dan sejauh mana dapat dipercaya.

6. Penguatan Ketokohan (*Ethos*) Kandidat

Memelihara atau merawat ketokohan dijadikan sebagai langkah strategi utama untuk melakukan komunikasi politik. Hal ini sangat penting dilakukan karena merupakan faktor yang mendasar dalam komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kampanye, pencitraan, dan pemberian suara dalam pemilihan umum. Figur atau ketokohan pasangan Dico-Basuki dilihat dari empat kredibilitas antara lain: (1) *Competences*; (2) *Trustworthiness*; (3) *Dynamism*; dan (4) (*Co-orientation*).

Strategi komunikasi politik tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa ada sokongan dari kekuatan politik yang cukup besar. Kekuatan politik yang mendukung kemenangan Dico M Ganinduto – Windu Suko Basuki dalam pemilihan Bupati Kabupaten Kendal tahun 2020 dan juga menjadi faktor pendukung kemenangan beliau adalah adanya kekuatan sumber daya manusia sebagai penggerak mesin politik dan sumber daya finansial sebagai modal menyusun strategi komunikasi untuk memobilisasi suara pemilih.

B. Saran

1. Keefektifan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan, akan tetapi harus melihat kesesuaian serta kondisi dari setiap daerah.
2. Kepada kandidat yang terpilih semoga dapat mengemban amanat rakyat dengan sebaik mungkin, menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan mengedepankan aspirasi-aspirasi yang muncul di masyarakat.
3. Pola pikir masyarakat harus dirubah dari memilih karena alasan visi dan misi para kandidat, bukan memilih karena lebih mengacu pada kepentingan pribadi setiap pemilih. Pola pikir tersebut belum dapat menjadi acuan akan melahirkan pemimpin yang mempunyai kredibilitas bukan popularitas.
4. Dengan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti lain diharapkan untuk mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut dengan wilayah yang berbeda dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayah, Ahmad Yozi “Strategi Komunikasi Politik Rohidin Mersyah Sebagai Calon Petahana Pilkada 2020 Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Komunikasi dan Budaya* Vol. 1 No. 1, 2020.
- Arifin, A. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cibro, R. (2018). *Strategi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Singkil (Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid-Sazali pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017*. Tesis. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Effendy, O. J. (1990). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- El Adawiyah, dkk “Strategi Komunikasi Politik Perempuan dalam Meraih Kepemimpinan Daerah”, *Metacommunication : Journal of Communication Studies* Vol. 4 No. 1, 2019.
- Farhan, Abraham Zakky Zulhazmi “Komunikasi Politik Kontestan Pilkada Jawa Tengah 2018”, *KOMUNIKA : Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 13 No. 2, 2019.
- Fatimah, Siti “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik”, *RESOLUSI : Jurnal Sosial Politik* Vol. 1 No. 1, 2018.
- Firdausi, Indriarti Azhar dan Ahmad Sururi. *Kegagalan Komunikasi Politik Dinasti dalam Pemilukada Kota Serang 2018*. Jurnal Warta. Vo. 2, No. 1, 2019.
- Firmanzah.(2012).*Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Pustaka Obor.
- Haryati, & Thasimmim, S. N. (2019). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Periode 2019-2024. *Purnama Berazam*, 1(1), 6-8.
- Hamzah. (2013). *Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*. Disertasi. Makassar: UIN Alauddin.

- Indrawan, Raden Mas Jerry. *Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat*. Wacana: Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 16 No. 2, 2017.
- Janitra, A. (2020). Kumparan di m.kumparan.com/amp/19321020/pilkada-2020di-tengah-pandemi-tantangan-bagi-komunikasi-politik-1uoprFK3q2M (diakses 28 Februari 2021).
- kendalkab.bps.go.id
- kab.kendal.kpu.go.id
- Margiansyah, Dbfry. *Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019*. Jurnal Penelitian LIPI Vo. 16 No.1, 2019.
- Moloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nahriyati, M. A. (2019). *Strategi Komunikasi Politik Anggota Legislatif Dapil 5 Partai PDI Perjuangan dalam Pemenangan Pemilu di Kabupaten Ngawi Tahun 2019*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Nawawi, H. (1990). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patilima, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rangkuti, F. (2006). *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Schroder, P. (2010). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit.
- Slamet, Ardiyana. *Identitas Politik dalam Komunikasi Politik Calon Gubernur Jawa Barat 2018*. LINIMASA: Jurnal Komunikasi. Vol. 2 No. 1, 2019.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, T. (2009). *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryadi, E. (2018). *Strategi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Susanto, Eko Harry. *Media Sosial sebagai pendukung jaringan Komunikasi Politik.*

Jurnal ASPIKOM Vol. 3 No. 3, 2017.

Thaibah. (2018). *Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Akmal Ibrahim Pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017.* Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Tjiptono, F. (1997). *Strategi Pemasaran, Edisi 1.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wulan Purnama Sari. (2018). *Strategi Komunikasi Politik dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasangan Kandidat Yuni-Dedy Pada Pilkada Sragen 2015.* Skripsi: Universitas Sebelas Maret.

Zainal, Anna. (2018). *Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan.* Meta Communication; Journal of Communication Studies, 3 (1).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 75435986, Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : B-717/Un.10.6/K/KM.051/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pemenangan Pasangan Dico M Ganinduto-Windu Suko Basuki
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dico-Basuki dalam Kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal 2020" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Sri Puji Lestari
NIM : 1706016055
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kendal/14 Agustus 1999
CP/e-mail : sripujilestari1206@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Ngamini
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Protokulon 03/01, Protomulyo, Kec. Kaliwungu Selatan,
Kab. Kendal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 2 Mei 2021
An. Dikan
Resub Reg Akademik

H.A. Gunawan, S.Ag, MH

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2. Draf Wawancara

1. Bagaimana mekanisme pembentukan tim sukses pada pilkada 2020 ini?
2. Bagaimana *master plan* (perencanaan) strategi komunikasi politik pada pilkada 2020?
3. Bagaimana proses perumusan strategi komunikasi politik dalam mengantisipasi dinamika politik pada pilkada 2020?
4. Bagaimana Dico-Basuki bersama tim pemenangan melakukan pemetaan wilayah untuk memobilisasi suara pemilih?
5. Bagaimana Dico-Basuki memahami struktur dan kultur masyarakat Kendal?
6. Apakah tim kemenangan melakukan pemetaan pemilih sebagai upaya menentukan komunikan atau pihak yang menjadi target tim sukses?
7. Bagaimana Dico-Basuki memetakan lawan politiknya dalam Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2020?
8. Pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan kepada masyarakat?
9. Tindakan apa yang dilakukan Dico-Basuki bersama tim pemenangan setelah memetakan wilayah dan lawan politiknya?
10. Media apa saja yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat?
11. Bagaimana kondisi di lapangan saat tim relawan menyampaikan visi dan misi kandidat yang diusung?

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sri Puji Lestari
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kendal/14 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM/Jurusan : 1706016055
6. Jurusan : Ilmu Politik
7. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat : Protokulon RT 03/RW 01, Protomulyo,
Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal
10. E-mail : sripujilestari1206@gmail.com
11. Nomor HP : 0895359979131

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Protomulyo
2. SMP Negeri 1 Kaliwungu
3. SMA Negeri 1 Kaliwungu
4. S-1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Muhammad Kasman (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : Protokulon RT 03/RW 01, Protomulyo, Kecamatan
Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal
2. Nama Ibu : Ngamini
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Protokulon RT 03/RW 01, Protomulyo, Kecamatan
Kaliwungu Selatan, Kab. Kendal

Semarang, 19 Juni 2021



Sri Puji Lestari

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



**Peneliti Bersama Tim Sukses
Bapak Miskam, SH**



**Peneliti Bersama Koordinator Kecamatan Dapil II (Kecamatan Kaliwungu,
Kecamatan Kaliwungu Selatan, dan Kecamatan Brangsong)
Bapak Abdul Karim**



**Peneliti Bersama Koordinator Kabupaten
Bapak Ahmad Subakir, S.Sos**



**Foto Bersama Ketua Tim Pemenangan
Bapak H. Tardi, SP**